Refleksi Kritis dan Kreatif
SURAT KABAR PIJAR

Mahasiswa dalam Lakon Efisiensi

Sorot

Risalah Tentang Ide yang Retak di Atas Meja
Anggaran, Kala Bayang-Bayang Efesiensi Meredupkan Denyut Nadi Mahasiswa

Dialektika

PTN-BH Mandiri, Kampus Menjual Diri, Kampus Kian Terbatas dalam Cengkeraman Efesiensi yang Menindas

Opini

Mencerdaskan Bangsa atau Tipuan Angka? Bagaimana MBG Mencuri Rp223 Triliun Hak Anak atas Pendidikan Kualitas

BPMF
BIRO PERS MAHASISWA FILSAFAT
PIJAR

SUSUNAN PENGURUS

Pemimpin Umum	: Fadillah Akbar Manurung
Sekretaris	: Fini Kezia Fortunatal Waruwu
Bendahara	: Inggrid Manusatun Nadia
Pemimpin Redaksi	: Muhammad Iqbal
Kadiv. Artistik	: Faris Ahmad Murtadha
Kadiv. Perusahaan	: Risdayanti Br Purba
Kadiv. Litbang	: Muhammad Arya Hakiim

Koordinator Surat Kabar Pijar
Fradipta Azzahra

Tim Kreatif Surat Kabar Pijar
Ariel johan Sulistyo, Jati Nurbayan Shidiq, Salwa Fitria, Veni Febriani

Penyunting
Giovanni Ramadhani, Fadillah Akbar Manurung, Muhammad Iqbal, Muhammad Teuku Thamrin, Muhammad Arya Hakiim, Fini Kezia Fortunatal Waruwu, Bilal Surya Nugraha, Ilham Perdana Lazuardhi, Muhammad Zaky Al Ghifari, Ariful Fathoni, Risdayanti Br Purba,

Penulis
Jati Nurbayan Shidiq, Aqsa Syakira, Zidad Arditi Paturohman, Anggun Ravisti, Farez Dearen Wardana Noor Seputra, Ahmad Yinfa Cendikia, Agito Yacobson Sitepu, Fadillah Akbar Manurung, Laely Puspita Sari, Elsa Rahma Sari, Salwa Fitria, Dinara Nafiisa, Muhammad Fauzi Akbar, Deni Rizqi Pradeta, Muhammad Nur Syamsuddin, Muhammad Insan An Nafis, Adyatma Bhanu, Raden Ajeng Julian Christy Kusumo Purbonegoro, Inggrid Manusatun Nadia, Felicia Carlene Abygail Assa, Veni Febriani, Mallica Kezia Yousuf

Ilustrator
Judith Egalita Adliah, Ariel Johan Sulistyo, Nabila Syefa Lulu Sahafa, Faris Ahmad Murtadha, Ridho Alam Firdaus, Muhammad Affan Fitrah, Fradipta Azzahra, Mega Theresia Narwadan

Fotografer
Ariel Johan Sulistyo, Muhammad Hafidz Osmond, Fadillah Akbar Manurung, Jati Nurbayan Shidiq, Jusuf Islam, Jogi Josafat Hutauruk, Muhammad Iqbal

Kontributor
Dhimas Yudha Prasetya, Bintang Muhammad Surya Al-Farisy, Mulky Aulia Ramadhan B, Mega Theresia Narwadan, Citra Jasmin Pertiwi, Muhammad Teuku Thamrin, Marcha Lorraine

DAFTAR ISI

CAKRAWALA | 3
Penjaga Nyala Lilin Api

SOROT | 4
Risalah Tentang Ide yang Retak di Atas Meja Anggaran

SOROT | 7
Kala Bayang-Bayang Efesiensi Meredupkan Denyut Nadi Mahasiswa

CARIK | 10
Piala Emas dan Dompet Logam

PIKSEL | 13

DIALEKTIKA | 15
PTN-BH Mandiri, Kampus Menjual Diri

DIALEKTIKA | 18
Kampus Kian Terbatas dalam Cengkeraman Efesiensi yang Menindas

CANDRADIMUKA | 21
Melihat Relevansi Filsafat

PERISTIWA | 23
Pameran Sutartinah Kembali, Kini Memperjuangkan Nama Abadi

RESENSI | 25
Kekerasan Budaya Pasca 1965

SOSOK | 27
Pekik Senja Winarso, Menolak Lupa Sejarah Kelam

ESTETIKA | 30
Anakin Skywalker, Estetika, dan Api Kejatuhan

KOMUNITAS | 33
Kebaya, Rumah Aman Memeluk Kemanusiaan Tanpa Sekat

OPEN KONTRIBUTOR | 36

PUISI | 37

KANVAS | 39

CERPEN | 41
Simbah, Katib, dan Kitab

OPINI | 43
Mencerdaskan Bangsa atau Tipuan Angka? Bagaimana MBG Mencuri Rp223 Triliun Hak Anak atas Pendidikan Kualitas

REFLEKSI | 48
Tawa Hambar di Kota Gudeg

Sampul:
Mega Theresia Narwadan, Fradipta Azzahra, Ariel Johan Sulistyo, Fariz Ahmad Murtadha, Jusuf Islam

Tata Letak:
Ariel Johan Sulistyo & Fradipta Azzahra

Penjaga Nyala Lilin Api

Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 kini bukan lagi gema jauh dari pusat kekuasaan. Gaungnya telah merambat secara perlahan, menembus pagar institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pengetahuan berkembang tanpa batas. Kini, ruang yang dahulu menjadi penyangga peradaban itu harus menunduk pada logika efisiensi, yang katanya memperbaiki regulasi pendanaan. Efisiensi merupakan sebuah perintah yang, jika dicermati, terasa getir dan tak selaras dengan martabat lembaga yang diberi amanah untuk mencerdaskan bangsa.

Mungkin, persoalan ini tak begitu mengusik bagi mereka yang mengartikan kuliah sebatas datang, duduk, lalu pulang. Namun di luar tembok ruang kelas, kehidupan kampus menyimpan ruang lain, tempat mahasiswa belajar tentang miniatur masyarakat—sebuah laboratorium sosial yang hidup dan bernapas. Di tempat tersebut, kebijakan pusat ini mulai terasa, menuntut kampus mengambil keputusan yang tak selalu sejalan dengan nurani pendidikannya. Sebuah ironi yang, bila dibiarkan, akan menjelma menjadi efek domino—pelan, tapi pasti, menjalar ke setiap urat nadi kehidupan kampus.

Gema diskusi ruang sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa bukan lagi membicarakan misi yang megah, melainkan bagaimana upaya untuk bertahan di tengah badai efisiensi anggaran yang perlu disesuaikan.

Anggaran pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang, benih yang menumbuhkan masa depan bangsa. Namun ketika ruang kritis dan kreativitas dikorbankan atas nama efisiensi yang tidak efisien, ironi itu menjelma luka: sebuah pengingkaran terhadap janji luhur institusi yang mengaku berdiri di atas cita-cita pencerdasan.

Saat kisruh ini mengetuk ruang-ruang kecil Pijar, kami sadar bahwa nyala lilin itu harus kembali disulut. Sebab sejak awal, Pijar tidak pernah sekadar jargon—Refleksi, Kritis, dan Kreatif—melainkan perihal menjaga api kecil agar tak padam di tengah gelap. Namun kini, bara itu seolah redup.

Jika mewartakan berita biasanya mengalir seperti air di sungai, maka proses penggarapan *Surat Kabar Pijar* edisi ini adalah semacam perjalanan spiritual. Setiap data dan informasi mesti dicari dengan napas panjang—di tengah kesibukan yang terus mengejar tanpa jeda. Namun, api itu tak padam. Dengan seluruh tenaga, keringat, dan waktu yang terkuras, BPMF Pijar akhirnya menyalakan bara itu dalam *Surat Kabar Pijar Edisi ke-28*, bertajuk **"Mahasiswa dalam Lakon Efisiensi"**.

Untuk membuka cakrawala, kami menyusun *Surat Kabar Pijar* dengan susunan tulisan tematik mencakup rubrik Sorot dan Dialektika. Sorot menjejaki kebijakan efisiensi yang menjalar hingga ke tubuh Unit Kegiatan Mahasiswa, menyisakan ruang gerak yang kian sempit. Sementara Dialektika menghadirkan refleksi filosofis melalui pembentangan kesejarahan neoliberalisasi pendidikan di Indonesia dan konteksualisasi pemikiran Giroux, menyingkap relasi antara nalar ekonomi dan pendidikan di tubuh universitas.

Melalui rubrik Sorot dan Dialektika, kami berupaya menyingkap realitas bahwa efisiensi anggaran telah menyesakkan napas dinamika perguruan tinggi, sekaligus menyingkap bagaimana kebijakan ini perlahan merayap ke dalam ruang Tridharma. Selain itu, kami hadirkan pula rubrik Carik. Rubrik yang melakonkan kekalutan dengan gaya sastra yang satir dan puitis, menggambarkan semrawutnya dunia mahasiswa. Sementara itu, *Surat Kabar Pijar Edisi ke-28* juga memuat rubrik non-tematik khas BPMF Pijar, serta karya-karya eksploratif berupa komik, piksel, dan kanvas. Di kolom Opini, tersaji pula kisah tragis serupa yang bergema di ruang-ruang lain kampus.

Usai sudah lembaran-lembaran ini disajikan, nyala lilin sunyi kini kami upayakan tetap menyala sekaligus memantik kesadaran. Bahwa demi sebuah pencerdasan, biaya untuk berpikir tak boleh dihitung. Dengan demikian api tak boleh dipadamkan.

Selamat ber-Pijar, selamat menyala dalam gelap!

Ilustrator: Judith

Risalah Tentang Ide yang Retak di Atas Meja Anggaran

Di balik suasana hangat saat persiapan program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), tersimpan kegelisahan yang tak kunjung reda. Cara pandang antara pihak kebijakan dan pelaksana di lapangan tampak tidak sejalan. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ikut mengubah pola pendanaan sekaligus cara kampus memaknai pendidikan. Tak heran, sejumlah perwakilan UKM menyampaikan keluhannya atas kebijakan ini.

Belum selesai di situ, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum membawa konsekuensi yang menuntut kemandirian kampus demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Upaya kemandirian kampus, tentu, tidak menjanjikan pendapatan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan tahunan. Akibatnya, ketidakkonsistenan ini acapkali dilimpahkan dalam kenaikan UKT, penurunan anggaran penelitian, dan pembatasan kegiatan mahasiswa—dalam hal ini adalah aktivitas UKM.

Berangkat dari dua sebab itu, mahasiswa yang bergabung dalam UKM merasa kebingungan. Pikiran mereka tersandung oleh dampak kebijakan—antara mimpi yang ingin dijalani dan mekanisme pendanaan yang menuntut izin setiap langkah. "Anggaran kemarin (sebelum efisiensi anggaran) saja sudah *pas-pasan*," ujar Pratita Amara, selaku ketua UKM Gadjah Mada Chambers Orchestra (GMCO). "Eh, sekarang malah dipangkas, jadi makin sulit bergerak," keluhnya.

Keluhan Amara senada dengan Kobe Susetyo, mahasiswa yang konsen terhadap dinamika komunikasi antar UKM. Sejauh pengamatan Kobe—yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Forum Komunikasi (Forkom) —menurutnya, semua UKM terdampak karena pemotongan pagu anggaran oleh Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa). "Mereka (mahasiswa UKM) mau bagaimanapun tetap harus *jalan*," tegas Kobe.

Lapisan Persoalan RKAT

	PENGELUARAN	
1	Belanja Pegawai	1.598.383.098.685
2	Belanja Barang dan Jasa	1.073.641.806.673
3	Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan	106.928.592.997
4	Belanja Perjalanan	168.599.768.478
5	Belanja Modal	350.852.611.194
6	Belanja *Science Techno Park* -ADB	42.961.384.000
7	Belanja PUAPT	50.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN	3.391.367.262.027
	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	253.747.640.002
	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2024	549.475.758.655
	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	803.223.398.657
	PENAMBAHAN DANA ABADI	70.000.000.000

Paparan RKAT UGM 2025 oleh MWA
(disahkan pada 16 Januari 2025)

Mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 UGM, yang diatur dalam peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UGM Nomor 1 Tahun 2025. UGM mengalami surplus senilai 253,7 miliar sebab pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran. Nominal ini kian diperbesar oleh sisa anggaran pada tahun 2024 sejumlah 549,4 miliar. Jika kita gabungkan total dana lebihnya atau surplus gabungannya maka akan didapat 803,2 miliar.

Namun, sebuah ironi tampak membayangi di tengah kelimpahan dana tersebut. UGM justru menarik kendali. Alih-alih mengalokasikan surplus untuk menopang penuh kegiatan operasional, dokumen RKAT 2025 justru menunjukkan bahwa UGM lebih fokus mengamankan dana tersebut. Berdasarkan publikasi MWA UGM Nomor 1 Tahun 2025, kami mencatat, di saat yang sama ketika kebijakan efisiensi diterapkan, universitas justru menganggarkan tambahan Dana Abadi *(Endowment Fund)* sebesar Rp89 miliar yang diambil dari surplus operasional. Tambahan ini menjadikan total Dana Abadi yang dikelola UGM mencapai Rp414 miliar per akhir 2024.

Anggaran Dana Abadi menimbulkan rasa penasaran yang tinggi dari beberapa kalangan mahasiswa. Dhimas Yudha, selaku perwakilan dari UKM Esports, secara terus terang mempertanyakan realisasi Dana Abadi dalam kegentingan kebijakan efisiensi anggaran.

> ***"Sebenernya menurutku, efisiensi anggaran ini nggak akan terlalu berdampak banyak ketika— yang namanya Dana Abadi UGM—bisa dimaksimalkan. Aku nggak tau penggunaan dana abadi ini bentuknya seperti apa, sampai saat ini,"*** ***heran Dhimas dalam keterusterangannya.***

Keresahan mahasiswa paling nyata terlihat pada dampak langsung pemotongan anggaran di level unit kegiatan. Kebijakan efisiensi tertulis dalam RKAT tahun 2025, salah satunya adalah penurunan 10 persen pada Pos Belanja Barang dan Jasa dari Rp1,192 triliun menjadi Rp1,073 triliun.

Di sisi lain, berdasarkan laporan tim redaksi, terdapat pemotongan anggaran UKM Atletik sebesar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 50 juta menjadi 25 juta. Rizky Ardiansyah sebagai ketua UKM Atletik mengeluhkan pengurangan jumlah pelatih dari dua menjadi satu orang per sesi latihan. Masalah mengharuskan Rizky untuk memutar otak supaya terselesaikan. "Awalnya latihan itu ada dua pelatih. Kami *rolling* jadi satu hari latihan satu pelatih," ucap Rizky.

Tidak hanya itu, masalah lain juga timbul pada pengurangan dalam partisipasi kompetisi karena kebijakan efisiensi. Hal tersebut membuat UKM Atletik harus memilah dalam partisipasi lomba berdasarkan mana yang paling layak. "Kami memilih-milih dulu lomba apa yang ingin kami ikuti dan *seworth it* apa untuk kami ikuti," ungkap Rizky.

Bergesernya Pendanaan

Peralihan kondisi dalam rangka efisiensi mendorong fakultas untuk menjadi lebih *mandiri* agar mampu menopang kebutuhan operasionalnya. Salah satunya adalah Fakultas Filsafat yang kembali menghidupkan kafenya dan terus menyediakan persewaan atas ruang-ruang dalam Fakultas Filsafat dengan harapan mampu mendapatkan dana tambahan. "*Bismillah* bisa nambah RKAT paling *nggak* nambah misalnya per bulan 13 juta," ujar Hastanti Widy selaku Wakil Dekan Fakultas Filsafat, yang mengatur keuangan dan aset dengan nada optimis yang ia hadirkan di tengah tuntutan administrasi dalam mengelola anggaran.

Lebih lanjut, Widy juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, kegiatan kemahasiswaan seperti *workshop* atau pelatihan mendapatkan dukungan penuh dari UGM. Namun, saat ini, ia mengungkap bahwa pembiayaan teknis dan perlengkapan menjadi terbatas. Hal ini membawa fakultas untuk tak lagi sepenuhnya bergantung pada alokasi dana. Namun, fakultas menciptakan sumber pendanaan mandiri demi keberlangsungan kegiatan. Widy juga menilai bahwa "sedikit demi sedikit pemerintah sudah mulai melepas tanggung jawab, jadi fakultas harus berjuang sendiri."

> ***"Setelah efisiensi, dana (untuk Fakultas Filsafat) dari pemerintah dipotong sampai sekitar 2-3 miliar. Awalnya dari kita itu dapat 19 miliar, tapi dipotong jadi 17 miliar,"*** ***ungkap Widy.***

Dalam ruang efisien terbentuk pula suatu sistem yang mulai tumbuh dan berkembang, mengarah pada universitas yang kini mulai mengambil bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh fakultas. Pembagian hasil menjadi tak terhindarkan "Universitas kini jadi semakin ekspansif. Melihat fakultas-fakultas memiliki kekayaan apa, mereka mulai meminta itu. Fakultas punya berapa, itu harus dibagi keuntungannya dengan universitas," ujar Widy.

Tak berhenti di situ, pada akhirnya perubahan kebijakan efisiensi ini merambat hingga ranah mahasiswa, ruang gerak yang mereka miliki menjadi semakin terbatas. Unit Kegiatan Mahasiswa mulai menanggung beban dana yang menghambat gerak mereka dalam mewujudkan berbagai program kegiatan, banyaknya program yang rutin untuk dijalankan menjadi perlu untuk disesuaikan kembali. Yanuar Agung, selaku ketua Unit Kesenian Jawa Gaya Surakarta (UKJGS), membeberkan bahwa beberapa kegiatan berbiaya besar perlu disesuaikan lagi dengan kebijakan anggaran saat ini. "*Event-event* yang kurang prioritas begitu kami pangkas dan hapuskan," jelas Yanuar. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pendanaan melalui mekanisme *sponsorship*, panggilan *job*, dan lain sebagainya," lanjutnya.

Upaya ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kobe. Ia mengatakan bahwa beberapa UKM berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dana melalui mekanisme *sponsorship* dan dana usaha. Kendati demikian, menurutnya, terdapat satu hal yang sifatnya kontradiktif, yakni bagaimana efisiensi ang-

garan pun juga dapat berdampak terhadap kemudahan mekanisme *sponsorship*. "Pun sekarang banyak perusahaan terdampak efisiensi anggaran, yah, mekanisme *sponsorship* jadi susah masuk," terang Kobe.

Keterbatasan dana pada akhirnya turut membatasi kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa. "Agak miris sih, kadang sampai *stop*, bentar ini ide kamu bagus cuman kalau misalkan direalisasikan dengan konsep yang kamu punya kelihatannya *nggak* masuk deh *budget* nya" ujar Clara Oda, salah satu anggota Teater Gadjah Mada. Ia melihat bagaimana kreativitas mahasiswa kini hanya berakhir di ruang-ruang sekre. Saat ini beban baru mulai ditanggung oleh para mahasiswa, dalam menjalankan programnya ada suatu pertimbangan dan pertanyaan dari manakah sumber dana ini bisa kita penuhi.

"Mati-matian itu teman-teman sponsorship, nih sekarang lagi susah-susahnya nyari sponsor. Untung saja mereka bisa mengatasinya" ujar Kobe.

Perihal Dampak

Sebagaimana umumnya organisasi kemahasiswaan, aspek kultural sebuah organisasi acapkali menuntut target akan suatu hal karena faktor kesejarahannya. Namun, perubahan kebijakan pendanaan ternyata cukup mengganggu produktivitas sebuah UKM. Kondisi tersebut diamini oleh Rizky. Ia mengaku potongan pagu anggaran sangat mengganggu dinamika unit. "Pun begitu, dari pihak UGM, khususnya Ditmawa ingin melihat UGM berprestasi, salah satunya dalam ranah olahraga," keluh Rizky.

Sebab tingginya ekspektasi Ditmawa, Rizky mencapai titik kekesalannya manakala ia turut serta dalam aksi Okupasi Balairung pada bulan Mei tempo lalu. "Gara-gara efisiensi, kita susah buat *ngajuin* upaya pembaharuan alat," keluh Rizky. Dalam titik kepasrahannya, Rizky terpaksa mengakali dengan mengorek dana pribadi anggotanya melalui mekanisme kas.

Tidak hanya UKM Atletik, berdasarkan penelusuran oleh tim redaksi terkait data pagu anggaran, UKM Judo pun turut terdampak. Pagu anggaran Judo yang sebelumnya sebesar 45 juta, setelah kebijakan ini, turun sebesar 10 juta. "Pagu sebelumnya pun bahkan belum mencukupi keseluruhan kebutuhan, sekarang diperparah efisiensi," terang salah satu anggota UKM Judo yang tidak berkenan disebutkan namanya.

Selain itu, Amara, seperti yang telah ia keluhkan sebelumnya, mengaku juga terdampak pemangkasan sebesar 25 persen. Dari yang mulanya sebesar 100 juta menjadi 75 juta. Menurut pengakuannya, GMCO gagal menyelenggarakan *grand concert* yang seharusnya diadakan tiap tahun sebab efisiensi anggaran yang menjadi faktor utama. "Tahun ini dua konser yang bisa terlaksana, selain karena efisiensi anggaran, kepindahan *sekre* juga *ngaruh*," ujar Amara. "Tahu *lah ya* potongan 25 juta seberpengaruh apa," sindirnya. Padahal, tahun lalu, Amara membeberkan bahwa GMCO bisa mengadakan tiga *grand concert* seperti yang dilaksanakan tahun-tahun sebelum adanya kebijakan ini.

Tak lelah layaknya api yang merambat dan semakin membesar, UKM Teater Gadjah Mada (TGM) senasib dengan UKM lainnya. Clara mengeluhkan pemangkasan pagu anggaran sebesar 15 juta dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar 70 juta, kini tersisa 55 juta. Kendati menurutnya, TGM memerlukan biaya tahunan yang tidak sedikit.

Mengingat kebutuhan TGM yang tidak sedikit, Clara mengeluhkan potensi anggotanya yang tidak dioptimalkan sebab minimnya fasilitas—dalam hal ini karena efisiensi anggaran. "Kalau *nggak* ada fasilitas yang mumpuni, bagaimana kita mau menghasilkan kreativitas yang *wow*," kesal Clara. "Jadi *ya* harus terwadahi," tegasnya.

"Mungkin mereka (anggota TGM) mempunyai ide-ide liar untuk mendatangkan artistik yang mahal tapi karena adanya efisiensi jadi harus 'ngalah' gitu ibaratnya," ujar Clara.

Dibalik tirai kemegahan kampus dengan Dana Abadi dan surplus miliaran rupiah, terhampar ironi yang nyata. Suara-suara anggota UKM berupaya menolak pembatasan mimpi. Dari sunyi senyapnya *grand concert* GMCO yang urung digelar, hingga upaya anggota TGM untuk merealisasikan mimpi yang megah, anggota UKM tetap berupaya memenuhi ekspektasi pemangku kebijakan. Inilah drama yang nyata, perjuangan antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan.

Mahasiswa yang merupakan penjaga marwah kreativitas dan prestasi, kini mencari celah untuk tetap membuat kreativitas tetap hidup. Sambil menjaga ide agar tidak terkukung dalam ruang sekretariat yang pengap, kini gejolak efisiensi anggaran bukan hanya sebuah angka-angka yang defisit, melainkan sebuah tuntutan lembut akan dialog, transparansi, dan ruang bernapas yang dipersempit oleh bayang-bayang kebijakan.

[Aqsa, Anggun, Zidad]

Ilustrator : Affan

Kala Bayang-Bayang Efisiensi Meredupkan Denyut Nadi Mahasiswa

Di ruang sempit berukuran sekitar empat kali enam meter di lantai tiga Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada (UGM), ditemukan tumpukan alat musik orkestra yang berjajar bersisian dengan kardus-kardus berisi arsip lama. Kondisi ruangan tersebut menunjukkan kesan yang tidak terawat. Saat pintu dibuka, tercium bau lembab khas bangunan tua, terlihat jejak air hujan di langit-langit, serta cahaya temaram yang memantul pada senar biola yang diletakkan di sana.

Kini, ruangan tersebut telah beralih fungsi total. Ruangan sederhana di gedung yang terletak di Jalan Teknika Utara, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sekarang menjadi sekretariat milik Gadjah Mada Chamber Orchestra (GMCO), salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang seni. Di sinilah seluruh perlengkapan GMCO disimpan, dari biola yang ringkih, terompet yang berkilauan, hingga drum yang berukuran masif.

Namun, ruangan baru ini datang dengan tantangan tersendiri. Merujuk pada pengakuan Ketua GMCO, Pratita Amarangga, setiap kali alat-alat besar itu akan digunakan—atau dikembalikan—para anggota harus membopongnya naik-turun melewati tangga curam, sebab gedung tua ini memang berdiri tanpa lift. "Sekre kami sekarang cuma seperti ruangan kuliah di gedung tua. Ditambah lagi, di gedung itu nggak ada lift, aksesnya hanya melalui tangga. Kemarin saat pindahan, tanganku sampai sakit karena harus bawa alat-alat sampai ke lantai tiga," buka Amara.

Pasca maklumat efisiensi anggaran pendidikan digulirkan, ruang-ruang kegiatan mahasiswa ikut bergeser. Tak hanya GMCO, UKM dari sekber kerohanian seperti Misa Kampus (Miskam) dan Unit Kerohanian Kristen (UKK) juga terkena imbas dari kebijakan relokasi tersebut. Usut punya usut, berdasarkan pengakuan dari beberapa pengurus UKM, relokasi sekretariat dilakukan untuk memangkas biaya pemeliharaan ruang yang selama ini ditanggung universitas. Pun, beberapa sekretariat lama dikabarkan telah dialihfungsikan menjadi rumah tinggal yang dapat disewakan, sebagai upaya universitas menambah pemasukan setelah efisiensi. Namun hingga kini, pihak kampus belum memberikan penjelasan resmi terkait hal tersebut.

Ruang Gerak Kian Menyempit, Mahasiswa Menjerit

Kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pihak kampus ternyata tidak hanya menyasar Sekretariat UKM. Dampaknya meluas hingga memotong akses mahasiswa terhadap ruang-ruang umum di seluruh universitas. Buntut dari kebijakan ini adalah pembatasan ketat jam pemakaian banyak fasilitas. Ruangan yang sebelumnya ramai dan terbuka kini harus tunduk pada jadwal operasional baru demi memangkas ongkos pemeliharaan gedung dan petugas penjaga.

Salah satu ruang yang paling terdampak adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Pancasila UGM. Selama ini, GOR Pancasila dikenal sebagai "paru-paru" aktivitas mahasiswa, menjadi titik temu bagi siapa pun—mulai dari pencinta olahraga hingga komunitas seni yang berlatih hingga larut. Namun, sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, fasilitas vital itu kini hanya dapat digunakan hingga pukul 22.00 WIB. Pembatasan ini mencekik ritme kegiatan mahasiswa, meng-

ingat sebelumnya fasilitas tersebut bebas digunakan hingga larut malam tanpa batasan waktu yang ketat.

Pembatasan jam operasional ini menjadi pukulan telak bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang rutin mengandalkan GOR Pancasila sebagai tempat berlatih. Salah satu UKM yang turut merasakan dampaknya adalah Marching Band (MB) UGM. Bagi mereka, waktu latihan yang berharga kini terasa seperti lomba lari melawan jam. "Waktu latihan kami terasa seperti dikejar-kejar oleh petugas, yang selalu mematikan lampu pas jam sepuluh malam," tutur Najla Kamila Nurhadiana, Bendahara MB UGM. Ia menambahkan, tidak jarang lampu GOR sudah lebih dulu padam, sebelum alat-alat musik besar mereka sempat dimasukkan dengan aman ke dalam gudang.

Tak tahan dengan hal ini, MB mencoba untuk bernegosiasi secara langsung dengan pengelola GOR Pancasila, memohon kelonggaran waktu agar proses pemberesan alat dapat dilakukan dengan aman. Alhasil, MB akhirnya mendapat tambahan waktu satu jam setelah jam latihan resmi berakhir, khusus untuk membereskan seluruh perlengkapan mereka. "Cukup membantu (penambahan waktu satu jam)," tutur Najla.

Meski demikian, adaptasi tak terhindarkan harus tetap dilakukan. Dulu, momen setelah latihan sering dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi internal di dalam GOR. Kini, kebiasaan itu harus ditinggalkan. "Sekarang, evaluasinya dilakukan di luar, di depan gerbang, karena di dalam (GOR) sudah dikunci," tambah Najla. Dengan kata lain, kebijakan efisiensi ini telah menggeser ruang interaksi dan refleksi mereka.

Kisah perjuangan MB ternyata bukanlah kisah satu-satunya. Di balik pintu GOR Pancasila yang kini tertutup lebih awal, banyak Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lain turut merasakan dampak serupa dari kebijakan efisiensi kampus. Waktu latihan yang terpangkas, kegiatan yang terpaksa dihentikan lebih dini, hingga perlakuan petugas yang kerap menciptakan suasana tidak leluasa bagi aktivitas mahasiswa. Salah satu UKM yang juga terkena imbas ini adalah Judo UGM.

Secara resmi, GOR kini dibuka hanya dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB. Putra (bukan nama asli), salah satu pengurus Judo UGM, menjelaskan bahwa pembatasan jam operasional GOR Pancasila sangat memengaruhi jadwal latihan rutin mereka. Namun, persoalan ini tidak hanya berhenti pada jam operasional yang sudah ditetapkan saja, beberapa pengurus UKM mengungkap, bahkan sebelum jam 22.00 WIB para petugas sudah mulai meminta mahasiswa untuk segera meninggalkan ruangan.

> *"Biasanya mereka mulai mematikan lampu supaya kami keluar. Kadang ada juga yang ekstrem, pintu dikunci padahal masih ada orang di dalam," singkap Putra.*

Ilustrator: Affan

Kreativitas Tak Seharusnya Jadi Korban Efisiensi

Kebijakan efisiensi yang membatasi ruang fisik ternyata hanyalah satu sisi dari koin masalah. Dampak lain yang tak kalah krusial menghantam langsung jantung operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yaitu pemotongan pagu anggaran. Kebijakan ini mengakibatkan banyaknya peralatan UKM yang rusak tak kunjung diperbaiki dan program rutin yang selama ini menjadi identitas UKM terpaksa dihentikan. Tak hanya itu, Cikal Pasee Uria Timur, selaku Ketua Mahasiswa Pecinta Alam Gadjah Mada (Mapagama), juga menyebutkan bahwa sendi-sendi kreativitas mahasiswa perlahan ikut tergerus buntut dari efisiensi anggaran.

Imbas dari pemotongan pagu anggaran turut dirasakan oleh Marching Band (MB) UGM. Melalui keterangan Najla, MB UGM kini merasakan tekanan ganda dari kebijakan efisiensi. Setelah kesulitan beradaptasi dengan jam latihan yang terbatas, mereka harus menghadapi pemotongan pagu anggaran hingga 20 persen. Penurunan drastis ini memaksa pengurus harian MB UGM memutar otak demi menghemat dana yang sudah menipis dengan menghapus kebutuhan yang dianggap esensial bagi kelangsungan organisasi. Dampak kebijakan ini merembet ke berbagai aspek operasional. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan alat musik kini dialihkan untuk menutup kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak.

> *"Ada alat yang seharusnya diservis beberapa bulan sekali, tapi sampai sekarang belum bisa karena biayanya mahal. Jadi, pemainnya harus ekstra hati-hati saat sedang main alat tersebut," keluh Najla.*

Najla menambahkan, pengurus MB UGM pun sebenarnya telah menyusun anggaran khusus untuk pembuatan seragam lomba yang baru di tahun 2025. Namun, kenyataan pahit harus dirasakan, dana seragam tersebut terpaksa dialihkan untuk menutup berbagai kebutuhan operasional lain yang dianggap lebih mendesak. "Rencananya kemarin ingin buat 100 seragam untuk lomba, tetapi akhirnya cuma bisa 20," akui Najla. Lebih lanjut, sisa kekurangan seragam, Najla mengakalinya dengan menggunakan seragam tahun lalu dan sedikit dimodifikasi menggunakan cat.

Hal serupa juga dialami oleh UKM bidang kesenian lainnya, yakni GMCO. Amara mengaku bahwa GMCO mengalami penurunan pagu anggaran dari 100 juta menjadi 75 juta. Hal ini membuat beberapa

program rutin yang telah disusun sebelumnya terpaksa dihapus. "Biasanya GMCO punya tiga proker besar, yakni Mini Concert, Grand Concert, dan Konser Musik Chamber. Nah, yang terpaksa dihapus adalah Grand Concert karena dana nggak cukup," ungkapnya.

Ia menambahkan, meski dana hanya turun sebesar 25 persen, jumlah tersebut tetap memberi pukulan telak bagi GMCO. "Untuk skala mini concert saja, kami perlu menggelontorkan dana hingga 25 juta, belum lagi untuk keperluan yang lain. Jadi, jelas penurunan pagu anggaran ini memberatkan kami," tambahnya. Pun, Amara mengeluh bahwa akibat efisiensi ini, skema peminjaman mobil pick-up dari KSL yang biasanya mereka gunakan untuk membawa alat-alat ke tempat latihan kini dipersulit.

Dampak efisiensi anggaran ternyata tidak mengenal bidang. Selain UKM kesenian, UKM kegiatan lapangan pun harus merasakan hal serupa. Salah satunya adalah Mapagama. Cikal, terang-terangan mengakui bahwa kebijakan efisiensi turut memotong anggaran mereka hingga 25 persen. Angka seperempat dari total pagu itu sontak memaksa Mapagama mengambil keputusan berat: program besar seperti ekspedisi dan perawatan alat krusial harus dikorbankan. "Ada perahu yang bocor sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi belum bisa diperbaiki karena biayanya sampai jutaan. Ya, akhirnya dibiarkan saja dulu," terangnya.

Tak hanya perbaikan alat rusak yang ditunda, kegiatan lain seperti pelatihan lanjutan dan keikutsertaan dalam lomba pun harus dibatasi. Sebab, Mapagama memfokuskan dananya untuk Pendidikan Dasar (Diksar). "Diksar itu penting, soalnya program regenerasi. Jadi, kalau dana terbatas, program lain dipikirkan nanti dulu," jelas Cikal. Ia pun menambahkan, meski pemotongan terlihat "hanya" sekitar 25 persen, dampaknya sangat dirasakan bagi roda segenap program Mapagama.

Lebih lanjut, Cikal juga menceritakan sebuah kejadian yang menjadi gambaran pahit dari situasi tersebut, yakni ketika ada acara tahunan bagi seluruh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) se-Indonesia. "Kemarin ada acara Temu Wicara Kenal Medan (TWKM) di Sulawesi, dan dana yang tersedia tidak cukup untuk mengirim perwakilan secara penuh," singkap Cikal. Alhasil, Mapagama UGM hanya dapat mendanai sedikit biaya transportasi anggota yang ikut, dan sisanya menggunakan uang pribadi.

Menjaga Napas Kegiatan Mahasiswa di Tengah Efisiensi

Efisiensi sejatinya adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk menata anggaran agar alokasinya menjadi lebih tepat guna. Tujuannya mulia: menciptakan pengelolaan dana yang sehat. Namun, ketika dijalankan tanpa mempertimbangkan realitas kebutuhan di lapangan, kebijakan tersebut justru menjelma menjadi sekat yang membatasi ruang tumbuh mahasiswa. Alih-alih menghemat, efisiensi yang kaku justru mengikis kreativitas dan semangat berprestasi di dalam UKM. Padahal, UKM merupakan wadah esensial bagi pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, suara harapan dan tuntutan muncul dari mahasiswa. Najla, berharap universitas dapat mengubah posisinya: hadir bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan efisiensi, tetapi juga sebagai mitra yang memahami kesulitan dan kebutuhan mendasar mahasiswa. Ia pun mengajukan solusi konkret. Menurutnya, jika pendanaan internal UKM terpaksa dipotong, universitas seharusnya turut membuka dan memfasilitasi akses bagi UKM untuk mencari dukungan finansial eksternal, seperti sponsor dan kemitraan perusahaan.

> *"Kalau memang segi pendanaan nggak bisa kayak dulu, seharusnya UGM bisa membantu mengarahkan kami untuk mendapatkan sponsor. Nama UGM sendiri sudah besar, mestinya bisa jadi jembatan bagi kami," tutur dan harap Najla.*

Sementara itu, Cikal menyebut bahwa pemotongan pagu anggaran sebelumnya digulirkan tanpa adanya komunikasi dengan perwakilan UKM. "Awal tahun kemarin, kami tiba-tiba dapat kabar kalau pagu anggaran UKM dipotong begitu saja tanpa ada dialog lebih dulu," kesal Cikal. Ia menilai, universitas seharusnya tidak memperlakukan mahasiswa sekadar sebagai variabel administratif dalam sistem. Sebaliknya, mahasiswa harus dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem kampus yang memiliki suara dan peran dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pemotongan anggaran yang tiba-tiba pada awal tahun menjadi contoh nyata kegagalan komunikasi ini.

> *"Seharusnya, Ditmawa bisa mengajak kami berdiskusi, supaya kami juga paham situasinya dan bisa mencari solusi bareng," tambahnya.*

Pada akhirnya, di tengah hiruk pikuk kebijakan dan pemotongan anggaran, perlu disadari bahwa UKM bukan sekadar wadah kegiatan di luar jam kuliah. Lebih dari itu, UKM adalah denyut kehidupan kampus, yang berfungsi menjaga dan memelihara kreativitas serta semangat berkreasi para mahasiswa. Maka dari itu, setiap bentuk dukungan—baik ruang, waktu, maupun dana—yang diberikan kepada UKM, sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai bagi reputasi universitas.

UKM telah terbukti menjadi lumbung prestasi, tempat lahirnya inovasi, sekaligus wadah implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jika semangat ini terus ditekan oleh kebijakan yang kaku, yang akan merugi bukan hanya mahasiswa. Universitas berisiko kehilangan aset paling berharga: mahasiswa yang kreatif, berprestasi, dan berdedikasi. Mendukung UKM adalah menjamin keberlanjutan kualitas dan citra sebuah institusi pendidikan tinggi.

[Agito, Farez, Yinfa]

Piala Emas dan Dompet Logam

Ilustrator: Judith

"The best creativity emerges from constraint. However, at a certain point, a brutal limitation will kill all creativity," an adaptation from philosophical thought on art and design.

Saya menjejakkan kaki hingga ke lantai tiga Gedung Pusat Antar Mahasiswa di sebuah Universitas. Di atas sini, saya melihat sebuah ruangan tanpa berpendingin udara yang jauh dari keriuhan lobi rektorat. Namun ketika dikunjungi, udara lembab pun menyerbu sekujur tubuh. Hidung saya mencium bau khas yang melekat pada benda-benda seni yang merana nasibnya. Biola, Cello, dan Terompet milik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kesenian—yang telah mengharumkan nama almamater di kancah nasional—kini harus berdesak-desakan, bersisian dengan kardus-kardus arsip terbengkalai.

Sebuah bisik halus berdengung di telinga saya. Ternyata, ruangan ini adalah tempat tinggal baru untuk UKM kesenian–*yang katanya* rumah baru yang lebih layak. Bayangkan saja, mahasiswa yang akan berlatih, mereka harus membopong alat-alat musik raksasa itu naik-turun tangga yang curam. Jangan berpikir gedung itu memiliki lift—ide itu terlalu modern dan dermawan bagi kampus yang harus menyisihkan uangnya dengan ikhlas untuk kenyamanan mahasiswa di sekretariat UKM.

Kisah tersebut belum menandakan sebuah drama akan dimulai. Drama akan dimulai jika lakon klasik yang berulang setiap tahun telah dipentaskan di perguruan tinggi berstatus PTN Badan Hukum (PTN-BH), kampus besar ini. Lakonnya berkisah tentang Sang Kampus Juragan Pencetak Kekayaan yang berlimpah *Dana Abadi* dan *Surplus Miliaran* yang dipampangkan di setiap lembaran dokumen pertanggungjawaban akhir tahun, namun memilih bersikap seolah-olah dompetnya sedang dijarah perampok.

Babak I

Tahun 2025 adalah tahun paling seru untuk lakon ini. Bagaimana tidak, sebuah *hantu* datang tanpa diundang dengan nama yang formal. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Diikuti oleh bayangan gelap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang mekanisme pendanaan PTN-BH. Mereka adalah duet maut yang mencekik mahasiswa, Si Efisiensi dan Si Badan Hukum, seakan pasangan komedi yang serasi. Satunya menuntut kencangkan ikat pinggang, yang lainnya menuntut kemandirian finansial.

Namun, apa yang membuat mahasiswa sampai kalang kabut melihat mereka berdua? Dan, apa konsekuensinya? Mahasiswa yang aktif berdinamika di UKM-wadah yang paling getol mencetak prestasi dan kreativitas, menjadi korban pertama yang disantap kedua *hantu* tersebut di atas meja makan bertuliskan efisiensi. "Anggaran kemarin saja sudah pas-pasan. Eh, sekarang malah dipangkas, jadi makin sulit bergerak," ucap jujur salah satu perwakilan UKM Orkestra, yang disarikan dari hasil wawancara rubrik Sorot di Surat Kabar ke-28.

Kalimat itu seakan menjadi *punchline* yang jujur dan menggelitik dari lakon ini. Perubahan ini bukanlah

kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari adopsi model Kampus Wirausaha (*The Entrepreneurial University*)–sebuah konsep yang diusung oleh sosiolog Burton Clark. Kampus didorong mencari sumber dana mandiri (seperti Dana Abadi dan sewa aset), menempatkan logika pasar di atas logika akademik. Alih-alih menjadi *center of knowledge*, kampus menjadi entitas yang wajib meraup profit dan mengamankan aset.

Di tengah tuntutan untuk selalu Inovatif, Adaptif, dan Kompetitif–tiga mantra sakral yang selalu diucapkan para pemangku kebijakan–mahasiswa justru dipaksa berinovasi dalam mengemis dana dan beradaptasi dengan kondisi minus. Mereka harus menari tango dengan anggaran yang dipotong puluhan persen dan sambil tetap tersenyum untuk sebuah kemenangan yang dinantikan.

Babak II

Di babak ini, mari kita lihat data. Mari kita lihat naskah yang akan dipentaskan oleh para birokrat.

Ada yang namanya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. Dokumen sakral ini seharusnya menjadi peta harta karun. Dan benar saja, di dalamnya kita dapat temukan kekayaan tak terhingga. Kampus *yang katanya* besar ini berhasil mencetak surplus fantastis, dengan total dana lebih, atau surplus gabungan, diperkirakan mencapai Rp803,2 miliar. Angka yang membuat mata terbelalak, bukan?

Namun, ironi adalah penyedap utama dalam lakon ini.

Di saat kas kampus besar ini meluber hingga ke lantai, ia justru melakukan dua tindakan kontradiktif:

1. Menerapkan efisiensi ketat pada pos Belanja Barang dan Jasa (pos anggaran UKM berada).
2. Menyuntikkan tambahan Dana Abadi (*Endowment Fund*) sebesar Rp89 miliar dari surplus operasional tersebut, menjadikan total Dana Abadi kampus mencapai angka yang–maaf–tidak terjangkau oleh akal sehat mahasiswa.

Ini adalah bentuk sempurna dari Masalah Agen-Prinsipal (*Principal-Agent Problem*). Principal (Kampus/MWA) menuntut Agen (UKM) mendapatkan piala dan reputasi (kepentingan Prinsipal), tetapi Prinsipal gagal menyediakan insentif dan modal yang memadai. Kepentingan tidak sejajar; Principal mendapatkan citra, Agen mendapatkan beban.

> *"Sebenarnya, efisiensi anggaran ini nggak akan terlalu berdampak banyak ketika Dana Abadi UGM bisa dimaksimalkan. Aku nggak tahu penggunaan Dana Abadi ini bentuknya seperti apa, sampai saat ini," ungkapan penuh penasaran dari salah satu mahasiswa kampus besar tersebut, yang disarikan dari hasil wawancara rubrik Sorot Surat Kabar ke-28.*

Di sinilah letak anomali manajemen publik berada. Mahasiswa, yang seharusnya menjadi tujuan (*ends*) dari seluruh mekanisme pendidikan, berubah status menjadi variabel pengeluaran yang harus dihemat (*costs*). Kita, dengan segala kreativitas yang ada, hanyalah item-item yang bisa dipotong demi mengamankan pundi-pundi investasi jangka panjang. Sosiolog Henry Giroux menyebutnya sebagai Komodifikasi Pendidikan, dalam hal ini nilai mahasiswa diukur dari output yang ia hasilkan untuk *brand* Universitas, bukan dari perkembangan karakter kritisnya.

Babak III

Bagaimana kegiatan mahasiswa tersebut dapat bertahan? Melalui improvisasi yang tragis-komis:

1. UKM Atletik: Mereka diminta berprestasi, mendapatkan medali. Namun, anggaran dipotong drastis. Akibatnya, mereka hanya mampu membayar satu pelatih per sesi latihan, padahal kebutuhan teknis menuntut dua. Ketika alat rusak, Ketua UKM Atletik harus mengakali dengan mengorek dana pribadi anggota melalui mekanisme kas—sebuah tindakan yang seolah-olah mencerminkan mahasiswa lebih bertanggung jawab terhadap fasilitas kampus daripada kampus itu sendiri.
2. Marching Band (MB): Tim yang harus tampil megah ini, setelah pagu anggaran mereka dipangkas 20 persen, terpaksa mengalihkan dana seragam lomba. Rencana pembuatan 100 seragam baru harus dipangkas menjadi 20, dan sisanya? Dicat atau dimodifikasi dari seragam tahun lalu. Inilah seni pertunjukan baru: *performance art* yang menyajikan kesulitan finansial di atas panggung.
3. UKM Pecinta Alam (Mapagama): Ketuanya, terang-terangan mengakui bahwa perahu mereka bocor sejak berbulan-bulan lalu. Biaya perbaikan jutaan. Sementara, dana diprioritaskan untuk Pendidikan Dasar (Diksar)—program regenerasi wajib. Logikanya: lebih baik perahu bocor, asalkan kaderisasi tetap berjalan. Inilah bentuk pertarungan melawan *survival* yang paling jujur.

Semua ini merupakan dampak dari Birokrasi Rasional-Legal ala Max Weber yang diterapkan secara kaku. Birokrasi hanya melihat UKM sebagai "Pos Belanja Barang dan Jasa" yang bisa dipotong 10 persen di atas kertas, tanpa melihat realitas di lapangan. Keputusan yang "rasional" dalam kacamata akuntansi, namun "terbatas" dalam kacamata sosial, sesuai dengan konsep Rasionalitas Terbatas (*Bounded Rationality*) dari Herbert Simon. Kampus membuat keputusan efisiensi karena keterbatasan informasi di level akar rumput.

Kondisi ini pun melahirkan kreativitas yang dibatasi oleh garis merah anggaran. Imajinasi yang liar harus tunduk pada kertas kalkulasi. Mimpi-mimpi megah kini hanya berakhir di ruang sekretariat yang pengap.

Mahasiswa sebagai Homo Economicus yang Dihukum

Jika kita tarik benang merahnya, efisiensi anggaran ini adalah gejala lanjut dari Neoliberalisme Pendidikan Tinggi. Kampus meniru model korporasi. Namun, ia gagal meniru akuntabilitas dan transparansi korporasi sejati. Mahasiswa didorong mencari *sponsorship* dan dana usaha mandiri, seolah-olah pencarian dana adalah bagian dari kurikulum mereka. "Pun sekarang banyak

perusahaan terdampak efisiensi anggaran yah, mekanisme *sponsorship* jadi susah masuk," ucap seorang mahasiswa kampus besar tersebut, yang disarikan dari hasil wawancara rubrik Sorot Surat Kabar ke-28.

Maka, piala kemenangan yang dibawa pulang mahasiswa hanyalah sebuah ironi sinis.

Itu adalah piala yang diperoleh dengan mengorbankan waktu tidur, menggunakan uang kas pribadi, dan menahan ide-ide terbaik agar tidak melebihi batas anggaran. Mereka membawa piala emas itu ke rektorat, foto, dan nama kampus kembali harum. Akan tetapi, di balik senyum lebar, ada dompet logam yang kosong dan hati yang lelah.

Wahai Juragan Kaya Raya dengan Dana Abadi Miliaran, pahlawan sejati yang membawa nama besarmu adalah mereka yang saat ini kesulitan membayar perbaikan alat musik, sementara mereka dituntut membawa piala di tengah pemangkasan puluhan persen Pos Belanja Barang dan Jasa.

Ini panggilan terakhir: berdialoglah. Jadilah mitra, bukan sekadar otoritas pemotong anggaran. Jangan biarkan efisiensi menjelma menjadi sekat yang meredupkan denyut nadi kehidupan mahasiswa. Karena jika mahasiswa yang kreatif dan berprestasi terus ditekan, yang akan merugi bukan hanya mereka, melainkan seluruh marwah institusi ini.

[Fadillah Akbar]

PIKSEL

"Merekam memori khusus. warga kampung laut meminta keadilan."

"Membuka kembali penghidupan yang dibrangus tikus bersenjata. "

"Dituntun air menuju pulau yang terpenjara."

PIKSEL

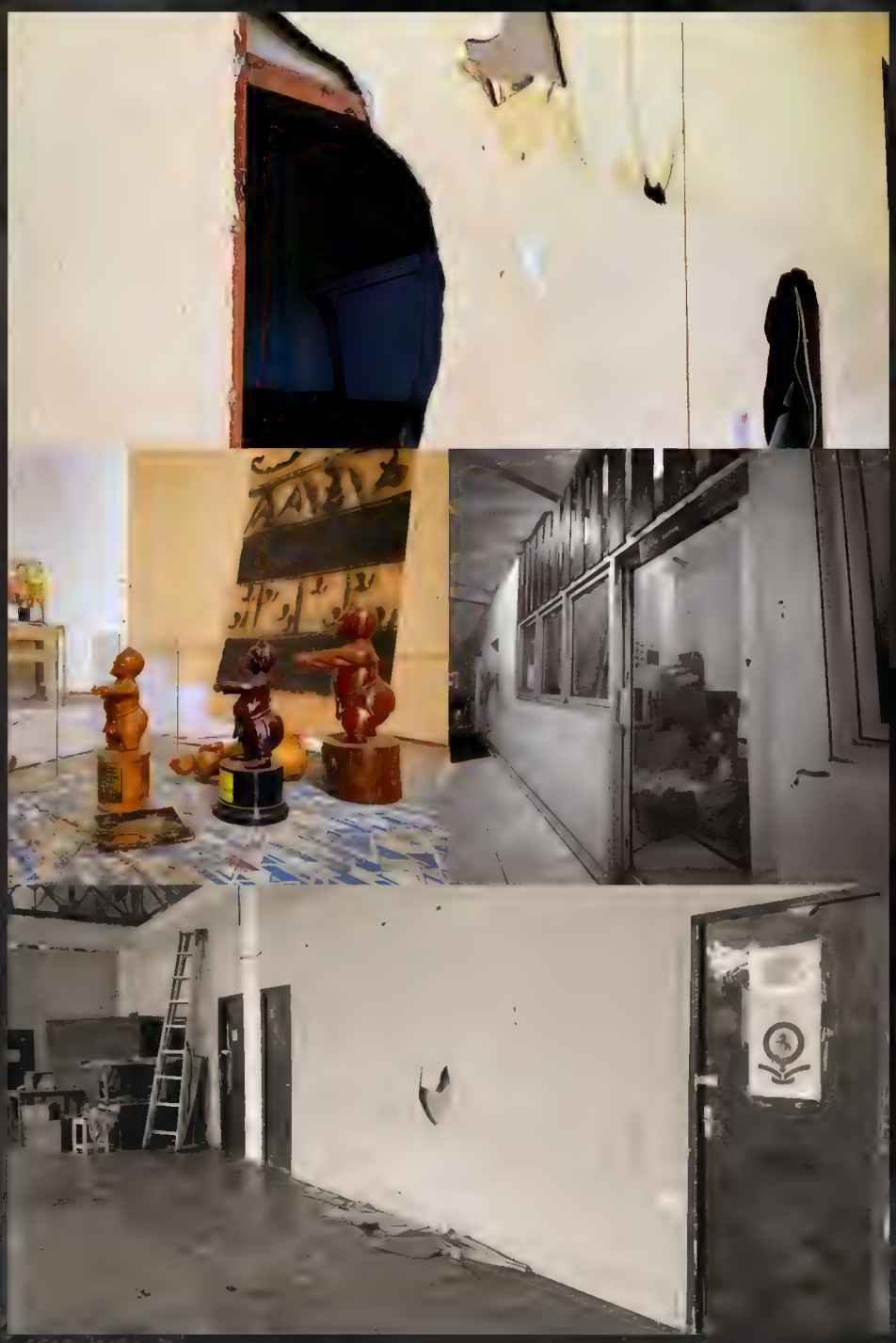

"Bangkai fasilitas yang gagal memfasilitasi aktivitas. Sekretariat ini adalah momentum kekosongan material, tempat cita-cita terhenti oleh rapuhnya realita."

PTN-BH Mandiri, Kampus Menjual Diri

Ilustrator: Syefa

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang direspons oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 di tanggal 25 Januari yang berisi pemangkasan anggaran 16 pos belanja kementerian hingga Rp256,1 triliun.[1] Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak luput terkena imbas dari pemangkasan ini. Akibatnya, Kemendiktisaintek direncanakan untuk memangkas anggaran menjadi Rp43,3 triliun, disertai pemotongan pada program sosial pendidikan seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang turun sekitar 9 persen (Rp1,31 triliun) dan beasiswa dosen non-PNS yang berkurang hingga 25 persen (Rp675 miliar), serta pemangkasan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) yang bahkan mencapai angka 50 persen.[2] Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa hal ini tidak boleh menjadi dasar alasan bagi perguruan tinggi untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).[3]

Dihadapi dengan efisiensi anggaran yang berpotensi memotong dana BOPTN, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) perlu untuk beradaptasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2015 mengenai Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum untuk mendapatkan bantuan dana anggaran dari luar pemerintah.[4] Hal ini mendorong terjalinnya kerja sama antara PTN-BH dengan pihak swasta maupun pihak unit usaha internal, salah satunya tergambar melalui kerja sama pembukaan toko ritel GMart di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.[5] Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan tanda bahwa putusan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi menjadikan perguruan tinggi sebagai sarana komersialisasi dan privatisasi.

Fenomena komersialisasi dan privatisasi sarana kampus ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi neoliberalisme yang mulai mengakar sejak akhir abad ke-20. Menurut Harvey, neoliberalisme pada dasarnya adalah teori dari praktik ekonomi-politik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia paling baik dicapai dengan membebaskan individu dalam kewirausahaan melalui suatu kerangka kelembagaan yang ditandai oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas.[6] Singkatnya, pemerintah sengaja mengurangi campur tangannya dalam kegiatan ekonomi dan membiarkan individu bebas mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam logika neoliberalisme, per-

an negara direduksi menjadi sebatas penjaga mekanisme pasar agar tetap berfungsi dan melindungi hak kepemilikan pribadi, sebab setiap bentuk intervensi negara dianggap berpotensi mengancam kebebasan individu.

Sejarah Singkat Lahirnya Neoliberalisme

Perkembangan neoliberalisme tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari dinamika ekonomi global pada awal abad ke-20. Gagasan ini lahir sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi kolektif dan intervensi negara yang menguat pasca-Perang Dunia I, serta sebagai reaksi atas krisis ekonomi besar yang ditandai oleh *Great Depression* tahun 1929.[7] Kebijakan ekonomi yang mengarah pada kontrol penuh negara atas aktivitas pasar menuai kritik tajam dari kalangan ekonom liberal klasik, salah satunya Friedrich A. Hayek. Menurutnya, perencanaan ekonomi berskala besar berpotensi menimbulkan kediktatoran karena memerlukan instrumen pemaksaan yang kuat untuk menjalankannya. Kritik Hayek muncul dari konteks historis Eropa pasca-Perang Dunia II, ketika model perencanaan kolektif seperti komunisme Soviet dan sosialisme nasional Jerman menunjukkan bagaimana kontrol ekonomi dapat berubah menjadi kontrol politik terhadap masyarakat. Bagi Hayek, semakin luas intervensi negara dalam perekonomian, semakin besar pula resiko hilangnya kebebasan individu.[8] Tidak berhenti di situ, beberapa ekonom liberal klasik kemudian mengadakan *Colloque Walter Lippmann* dengan tujuan menghidupkan kembali liberalisme dalam bentuk yang baru. Dari forum inilah istilah "neoliberalisme" mulai digunakan secara eksplisit untuk menandai kelahiran liberalisme baru yang lebih responsif terhadap konteks sosial modern.[9]

Pasca-Perang Dunia II, banyak negara berupaya merekonstruksi sistem ekonomi dan politik mereka untuk mencegah terulangnya krisis besar seperti *Great Depression* dan konflik ideologis yang berujung perang. Dalam konteks ini, Robert A. Dahl dan Charles E. Lindblom mengusulkan perlunya sintesis antara kebebasan pasar dan intervensi negara untuk melahirkan model sistem yang lebih demokratis; sistem yang menempatkan mekanisme pasar dalam kerangka nilai-nilai kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Model inilah yang kemudian menjadi dasar bagi rekonstruksi kebijakan ekonomi dan politik di banyak negara Barat pascaperang.[10]

Pemulihan pascaperang menuntut keterlibatan aktif pemerintah dalam mengatur ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara-negara Barat lebih memilih menerapkan kebijakan ekonomi Keynesian yang menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi agar krisis serupa tidak terulang kembali.[11] Akan tetapi, tahun 1970 menjadi tanda berakhirnya masa kebijakan Keynesian yang ditunjukkan oleh lonjakan inflasi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Kegagalan dari kebijakan ini menjadi peluang bagi ide-ide neoliberal untuk dipergunakan kembali. Tokoh-tokoh pendukung kebijakan neoliberal seperti Milton Friedman dan kelompok dari Sekolah Tinggi Ekonomi Chicago (*Chicago School of Economics*) mulai mempopulerkan neoliberalisme sebagai kebijakan moneter ketat dan pasar bebas untuk solusi atas kegagalan kebijakan ekonomi Keynesian.[12]

Pada dekade 80-an, di bawah kepemimpinan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, neoliberalisme muncul dan mulai diterapkan secara resmi sebagai paradigma ekonomi global baru. Kedua tokoh tersebut menolak keterlibatan negara yang terlalu besar dalam ekonomi, dibarengi dengan menekankan pentingnya efisiensi pasar, deregulasi, dan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam hal ini, neoliberalisme tidak lagi sekadar teori ekonomi, melainkan juga sebagai ideologi politik yang membentuk pola hubungan antara sektor negara dengan sektor swasta.[13]

Dominasi Neoliberalisme Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, neoliberalisme mulai menguat pada masa krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998, tepat menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Krisis tersebut menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah, inflasi melonjak tajam, dan kebangkrutan sektor industri yang pada akhirnya mengguncang stabilitas politik dan membuka ruang bagi intervensi lembaga keuangan internasional.[14] Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia mengajukan bantuan keuangan kepada *International Monetary Fund* (IMF) melalui *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998. IMF menetapkan kebijakan *Structural Adjustment Programs* (SAPs) yang mencerminkan prinsip-prinsip neoliberal, seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), deregulasi sektor keuangan, serta penghapusan subsidi dengan dalih pemulihan ekonomi nasional. [15] Program ini menuntut negara peminjam untuk memotong anggaran dan mengurangi peran di sektor sosial, termasuk pendidikan.[16] Dengan demikian, Indonesia secara resmi mengklasifikasikan pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan dalam pasar global.[17]

Neoliberalisasi pendidikan di Indonesia dilembagakan melalui berbagai kebijakan yang membuka ruang bagi pasar dalam pengelolaan pendidikan. Di antaranya, melalui Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan modal, termasuk pendidikan tinggi.[18] Dengan demikian, pendidikan tinggi secara resmi dimasukkan ke dalam sektor yang terbuka untuk penanaman modal. Secara hukum, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi murni dilihat sebagai hak warga negara, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan; terbuka untuk investasi.[19]

Dalam kebijakan lain, pemerintah mengubah status PTN sebagai Badan Hukum dengan diterbitkannya PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang menandai pergeseran sistem pendidikan tinggi dari kendali penuh negara menuju otonomi dalam pengelolaan akademik dan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 61 Tahun 1999, pemerintah kemudian mengeluarkan serangkaian peraturan baru, yaitu PP No. 152 Tahun 2000, PP No. 153 Tahun 2000, PP No. 154 Tahun 2000 Tahun 2000, dan PP No. 155 Tahun 2000. Keempat peraturan ini

menetapkan empat perguruan tinggi terkemuka, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).[20] Dengan status tersebut, keempat universitas tersebut memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur diri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, keuangan, dan tata kelola kelembagaan.

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memperkuat arah kebijakan tersebut. Dalam Pasal 53 UU Sisdiknas, diatur mengenai pentingnya pembentukan badan hukum pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan amanat pasal ini, pemerintah kemudian menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada tanggal 17 Desember 2008.[21] Inti dari UU BHP adalah kewenangan pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada suatu badan hukum. Keputusan ini dikhawatirkan mendorong komersialisasi karena adanya perubahan fokus dan cara kerja institusi pendidikan. UU BHP dianggap melepaskan tanggung jawab negara untuk membiayai dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Akibatnya, undang-undang ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan pada 31 Maret 2010, MK memutuskan untuk membatalkan UU BHP karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.[22]

Tak lama setelah itu, pemerintah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya memuat beberapa substansi serupa dengan UU BHP, terutama terkait status hukum dan tata kelola perguruan tinggi. Sebagai pelengkap, pemerintah juga mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Peraturan ini menegaskan bahwa status PT BHMN tidak otomatis berakhir setelah pembatalan UU BHP. Sebaliknya, bentuk kelembagaannya "berganti baju" menjadi PTN-BH. Dengan demikian, konsep otonomi dan kemandirian yang telah dirintis sejak 1999 tetap berlanjut dalam kerangka hukum yang baru dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

Serangkaian kebijakan yang telah dijabarkan di atas menimbulkan berbagai praktek komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi. Berubahnya status sejumlah perguruan tinggi menjadi BHMN menjadikan pihak universitas terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif di luar subsidi negara. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai regulasi kampus yang mendorong komersialisasi di lingkungan kampus seperti, meningkatnya biaya kuliah secara signifikan, biaya pendaftaran untuk jalur penerimaan mandiri, dan program kelas internasional.[24] Fenomena lain yang muncul adalah pendirian unit-unit usaha yang dikelola langsung oleh universitas, seperti PT Gama Multi Usaha Mandiri, perusahaan holding dan investasi milik UGM yang didirikan pada 24 Juni 2000 sebagai bagian dari upaya universitas dalam mewujudkan kemandirian finansial.[25]

Perguruan tinggi tidak memiliki banyak pilihan selain memperluas sumber pendanaan alternatif non-UKT. Pergeseran sumber pendanaan tersebut mendorong masuknya logika pasar ke dalam sistem perguruan tinggi. Jones dan Ball memandang neoliberalisasi pendidikan merupakan proses historis yang kompleks dan terus berkembang, yang mengubah cara kita memahami, menyelenggarakan, dan mengalami pendidikan. Ia bukan sekadar kebijakan ekonomi pasar bebas, melainkan sebuah dispositif yang terdiri dari jaringan wacana, institusi, praktik, dan subjektivitas yang secara perlahan membentuk ulang pendidikan menjadi arena kompetisi, komodifikasi, dan manajemen berbasis kinerja. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak publik atau ruang pembentukan manusia seutuhnya, melainkan sebagai investasi pribadi yang harus menghasilkan "nilai" dalam bentuk angka, sertifikasi, atau daya saing pasar.[26]

[Salwa, Rana]

---

1 Fajri, D. A. (2025, 9 Februari). "Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas Rp 22,5 T, Pemotongan Program Riset 20 Persen." Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/anggaran-kemendiktisaintek-dipangkas-rp-22-5-t-pemotongan-program-riset-20-persen-1204722 Diakses pada 3 November 2025

2 Napitupulu, E. L. (2025, 13 Februari). "Efisiensi Anggaran Pendidikan Tinggi Bisa Berdampak pada Kenaikan Biaya Kuliah di PTN dan PTS." Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-pendidikan-tinggi-bisa-berdampak-pada-kenkan-biaya-kuliah-di-ptn-dan-pts?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall/ Diakses pada 29 Oktober 2025

3 Sutrisna, T., & Rusiana, D. A. (2025, 14 Februari). "Ada Efisiensi Anggaran, Perguruan Tinggi Dilarang Naikan UKT." Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/14/12195531/ada-efisiensi-anggaran-perguruan-tinggi-dilarang-naikan-ukt?page=all/ Diakses pada 3 November 2025.

4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2015). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2015/26TAHUN2015PP.pdf Diakses pada 29 Oktober 2025

5 Universitas Gadjah Mada. (2025, 14 Oktober). "GMart, Outlet Ritel Modern Sudah Ada di GIK UGM." ugm.ac.id. https://ugm.ac.id/id/berita/gmart-outlet-ritel-modern-sudah-ada-di-gik-ugm/ Diakses pada 5 November 2025

6 Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, hal. 2.

7 Ibid hal. 11-12.

8 Hayek, F. (1994). The Road to Serfdom. The University of Chicago Press, hal. 69.

9 Mirowski, P., & Plehwe, D. (Eds.). (2009). The Road from Mont Pèlerin: The Making of The Neoliberal Thought Collective. Harvard University Press, hal. 60-62.

10 Dahl, R. A., & Lindblom, C. E. (1953). Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes. Harper & Brothers, hal. 125-129.

11 Op. cit. 9-11.

12 Op. cit. 12-15.

13 Op. cit. 19-25.

14 Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, hal. 25.

15 Darmaningtyas, Subhkan, E., & Panimbang, I. F. (2014). Melawan Liberalisme Pendidikan. Madani, hal. 2-3, 119.

16 Reinsberg, B., Stubbs, T., & Bujnoch, L. (2023). "Structural Adjustment, Alienation, and Mass Protest." Social Science Research, Vol. 109(3), hal. 2. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2022.102777

17 Darmaningtyas, Subhkan, E., & Panimbang, I. F. (2014). Melawan Liberalisme Pendidikan. Madani, hal. 33.

18 Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2007). "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. https://peraturan.go.id/files/uu25-2007.pdf Diakses pada 5 November 2025; Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2020). "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. https://peraturan.go.id/files/uu11-2020bt.pdf Diakses pada 5 November 2025; Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2021). "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128. https://peraturan.go.id/files/ps49-2021.pdf Diakses pada 5 November 2025. Meskipun UU No. 11 Tahun 2020 dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023, badan usaha yang didirikan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku dalam UU No. 6 Tahun 2023 sampai dengan berakhir jangka waktu berdirinya badan usaha.

19 Darmaningtyas, Subhkan, E., & Panimbang, I. F. (2014). Melawan Liberalisme Pendidikan. Madani, hal. 24.

20 Ibid hal. 44.

21 Ibid. hal. 2, 6-7.

22 Ibid hal. vii.

23 Ibid hal. 8-9.

24 Ibid hal. 60-77.

25 Universitas Gadjah Mada. (n.d.). "Profil PT Gama Multi Usaha Mandiri." ugm.ac.id. https://gama-multi.ugm.ac.id/profilpada 27 Oktober 2025.

26 Jones, B.A.M., & Ball, S.J. (2023). "Introduction: Neoliberalism is Dead—Long live Neoliberalism". Dalam Bronwen M. A. Jones dan Stephen J. Ball (Eds.), Neoliberalism and Education. Routledge, hal. 3-5.

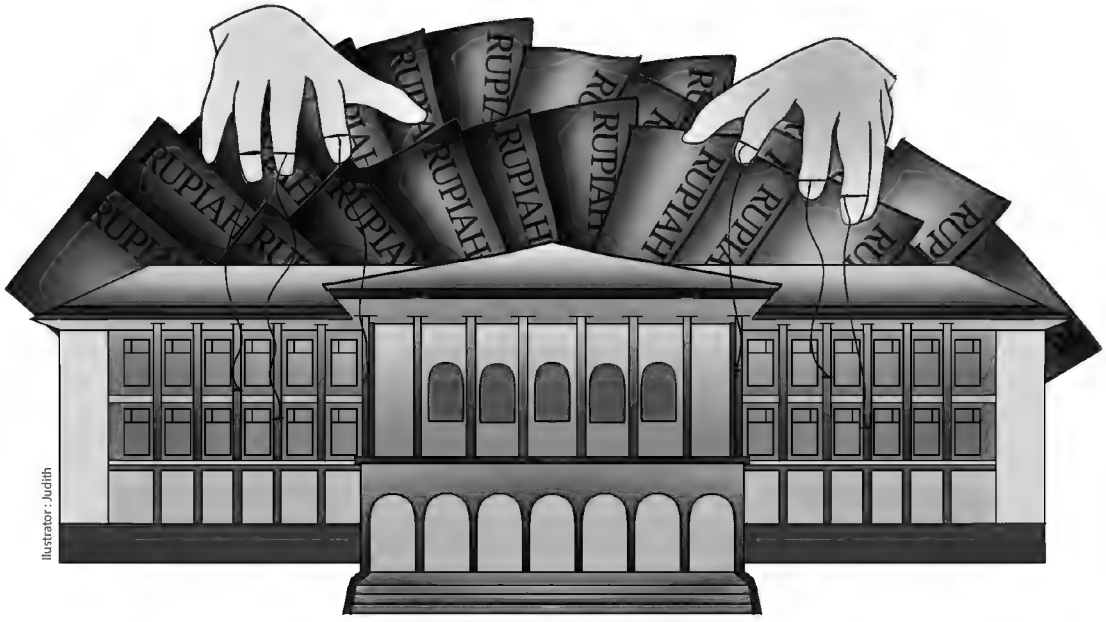

Kampus Kian Terbatas dalam Cengkeraman Komersialisasi yang Menindas

Ganti pemerintahan, ganti pula kebijakan. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan 2025. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilansir dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, motivasi utamanya adalah untuk mengurangi pemborosan dengan menekan biaya dan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif.[1] Semua kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah terdampak efisiensi, tidak luput pula di sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang dimaksud meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi.[2]

Di level perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), mahasiswa merasakan dampak dari efisiensi tersebut. Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi misalnya, mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan efisiensi penggunaan listrik.[3] Selain itu, terdapat pengurangan pagu anggaran bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan komunitas di UGM.[4] Hal ini justru membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berinovasi serta dalam proses pengembangan diri. Upaya perguruan tinggi untuk mencapai efisiensi anggaran mendorong penerapan kebijakan yang lebih ketat.

Efisiensi dan Komersialisasi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menjadi salah satu titik tolak neoliberalisme pendidikan di Indonesia. Sistem ini memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola keuangan, organisasi, akademik, hingga kemahasiswaan secara mandiri dan tetap dalam pengawasan, tunduk pada peraturan terkait. Artinya, meskipun memiliki otonomi, kampus dengan status PTN-BH tetap harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepada kementerian pendidikan, sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Otonomi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Akibat dari otonomi tersebut, PTN-BH mulai menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semua mahasiswa dan mematok uang pangkal bagi mahasiswa dengan jalur mandiri.[5] Uang pangkal dalam lingkup UGM merujuk pada Iuran Pembangunan Institusi (IPI) yang diberlakukan untuk program sarjana dan sarjana terapan tahun akademik 2025/2026. Mahasiswa baru dikenai IPI sebesar Rp30.000.000,00 untuk bidang ilmu sains, teknologi, dan kesehatan sementara untuk bidang ilmu sosial dan humaniora dikenakan sebesar Rp20.000.000,00. Namun, iuran ini hanya dikenakan bagi mahasiswa yang mendapatkan golongan UKT Pendidikan Unggul tanpa subsidi atau dengan kata lain, hanya dikenakan kepada mahasiswa dengan kemampuan "ekonomi baik".[6] Ini merupakan strategi untuk meningkatkan pendapatan perguruan tinggi akibat anggaran yang terbatas dari pemerintah.[7]

Adanya efisiensi anggaran berpotensi memperparah komersialisasi pendidikan. Tekanan untuk berhemat ini

membuka pintu komersialisasi pendidikan yang mengacu pada perlakuan pendidikan sebagai pasar yang ketat akan persaingan. Kewenangan untuk mengoordinasi keuangan secara mandiri yang diberikan pada PTN-BH ditambah dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp24,54 triliun[8] pada Kemendiktisaintek membuat PTN-BH memburu sumber-sumber pembiayaan lain. Relasi antara perguruan tinggi dengan industri semakin rekat. Perguruan tinggi akhirnya menjadi tempat jual beli dan ladang bisnis.[9]

Apabila universitas beralih fungsi menjadi perusahaan penyedia tenaga kerja, dampaknya adalah lembaga pendidikan menganut paradigma yang sifatnya mencari keuntungan semata.[10] Perpaduan antara kapitalisme dengan pendidikan menciptakan dasar bagi perguruan tinggi untuk menekankan nilai-nilai materialistik. Akibatnya, sivitas akademik kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan digantikan oleh orientasi materialistik dalam kehidupan.[11]

Komersialisasi pendidikan dapat memunculkan masalah lain, misalnya pinjaman mahasiswa (*student loan*) seperti yang kini terjadi di Amerika Serikat. Dengan adanya pinjaman mahasiswa, Pemerintah Amerika Serikat berharap pekerja yang mengenyam pendidikan tinggi menghasilkan pajak yang lebih tinggi, lebih produktif secara sosial, dan kurang bergantung pada program sosial. Akan tetapi, pinjaman mahasiswa menciptakan kekhawatiran akan masa depan sebab besarnya tunggakan yang dikenakan. Hal ini diperburuk dengan sempitnya lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman mahasiswa membengkak akibat meningkatnya biaya kuliah di Amerika.[12] Mahasiswa menjadi sangat terbebani dengan penerapan skema ini, terutama dengan besaran bunga pinjaman yang tinggi.

Adanya praktik komersialisasi pendidikan yang mengacu pada perlakuan pendidikan sebagai pasar yang ketat akan persaingan. Kewenangan untuk mengoordinasi keuangan secara mandiri yang diberikan pada PTN-BH ditambah dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp24,54 triliun pada Kemendiktisaintek membuat PTN-BH memburu sumber-sumber pembiayaan lain. Relasi antara perguruan tinggi dengan industri semakin rekat. Perguruan tinggi akhirnya menjadi tempat jual beli dan ladang bisnis.

Apabila universitas beralih fungsi menjadi perusahaan penyedia tenaga kerja, dampaknya adalah lembaga pendidikan menganut paradigma yang sifatnya mencari keuntungan semata. Perpaduan antara kapitalisme dengan pendidikan menciptakan dasar bagi perguruan tinggi untuk menekankan nilai-nilai materialistik. Akibatnya, sivitas akademik kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan digantikan oleh orientasi materialistik dalam kehidupan.

Komersialisasi pendidikan dapat memunculkan masalah lain, misalnya pinjaman mahasiswa (*student loan*) seperti yang kini terjadi di Amerika Serikat. Dengan adanya pinjaman mahasiswa, Pemerintah Amerika Serikat berharap pekerja yang mengenyam pendidikan tinggi menghasilkan pajak yang lebih tinggi, lebih produktif secara sosial, dan kurang bergantung pada program sosial. Akan tetapi, pinjaman mahasiswa menciptakan kekhawatiran akan masa depan sebab besarnya tunggakan yang dikenakan. Hal ini diperburuk dengan sempitnya lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman mahasiswa membengkak akibat meningkatnya biaya kuliah di Amerika. Mahasiswa menjadi sangat terbebani dengan penerapan skema ini, terutama dengan besaran bunga pinjaman yang tinggi.

Ilustrator: Judith

Melihat Komersialisasi Kampus dari Kacamata Pedagogi Kritis Giroux

Adanya praktik komersial yang disebabkan oleh persaingan antar perguruan tinggi untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah merefleksikan terjadinya pergeseran orientasi pendanaan pendidikan. Bukan tidak mungkin, praktik komersial secara perlahan berpotensi mengikis fondasi utama orientasi pendidikan. Tak jarang, perguruan tinggi melupakan atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mengakomodasi pengembangan intelektual karakter mahasiswa.[13]

Perguruan tinggi yang berorientasi pada profit mendorong persaingan antar perguruan tinggi untuk memproduksi lebih banyak lulusan siap kerja. Sebagian masyarakat juga masih melihat kuliah sebagai investasi di masa depan yang berfokus pada ekonomi.[14] Tekanan ini juga diperkuat oleh stereotipe masyarakat tentang lulusan sarjana dari jurusan bergengsi pasti mudah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi.[15] Stereotipe ini menciptakan pergeseran motivasi pendidikan, yaitu sebagian masyarakat berkuliah atau mengkuliahkan anak atau saudaranya di jurusan yang bergengsi dan memiliki prospek karir yang besar.[16] Perguruan tinggi kini menerapkan sistem bisnis yang memandang mahasiswa sebagai konsumen dan proses pendidikan sebagai komoditas yang memiliki nilai jual. Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, praktik komersialisasi di sektor pendidikan semakin meluas.[17] Hal ini dapat dilihat melalui berbagai macam kebijakan kampus seperti kenaikan UKT, mahalnya jalur seleksi mandiri, dan terbatasnya penyewaan fasilitas kampus bagi mahasiswa.[18] Akibatnya, orientasi pendidikan tercampur dengan berbagai macam praktik komersial. Ketika terjadi pandemi Covid-19 praktik komersialisasi mulai menunjukkan secara jelas masalah-masalahnya, seperti angka bunuh diri yang meningkat akibat tunggakan hutang pinjaman pendidikan.[19]

Di tengah gempuran neoliberalisasi, kampus menunjukan sifat kapitalistik dengan menambahkan praktik komersial di lingkungan kampus,[20] seperti dalam kasus pembatasan akses fasilitas bagi UKM. Dalam konteks penggunaan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), meskipun saat *Hearing* Rektorat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025 pihak kampus menyatakan bahwa penggunaan fasilitas untuk UKM tidak dikenai biaya, akan tetapi realitanya UKM tetap dikenakan biaya ketika meminjam ruang untuk kegiatan biasa ataupun acara besar. Dampaknya, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan UKM kesulitan mencari ruang yang layak untuk beraktivitas karena banyak fasilitas kampus yang terbatas dan berbayar. Sedangkan, anggota UKM didorong untuk terus produktif dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi target evaluasi dari kampus.[21] Alih-alih menjadi fasilitator kegiatan mahasiswa, kampus justru mengunci ruang-ruang kolektif dalam praktik komersialnya.

Fenomena ini dapat dilihat dari kacamata pedagogi kritis Giroux yang mengkritik praktik komersial di perguruan tinggi pasca munculnya neoliberalisasi pendidikan. Pedagogi secara umum dipahami sebagai teori pendidikan, pengajaran, dan pandangan manusia sekaligus interaksi antar manusia yang dinamis.[22] Pedagogi kritis dari Henry Giroux memperluas makna pedagogi sebagai paradigma kehidupan yang bersikap kritis. Menurutnya, orientasi pendidikan tidak pernah netral, selalu melibatkan relasi kuasa, nilai-nilai politik, dan kepentingan ideologi tertentu.[23] Dalam pedagogi kritis, mahasiswa didorong memperjuangkan kepentingannya untuk berani berpikir kritis, memahami struktur keadilan, dan bertindak sebagai agen perubahan sosial. Giroux mengubah kembali orientasi pendidikan dengan memberikan ruang kultural politik dan demokratis untuk membentuk pemikiran kritis, kepekaan moral, dan tindakan yang membebaskan dari struktur sosial yang feodal dan kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan komersial pihak tertentu.[24]

Meskipun perguruan tinggi sekarang didominasi oleh praktik komersialisasi, tetapi menurut Giroux masih ada celah bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik guna melawan dominasi ini. Menurut Giroux, dosen, sebagai intelektual publik, mestinya

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk berperan aktif mengubah realitas sosial. Sedangkan, mahasiswa harus dipandang sebagai agen kritis yang membawa perubahan sosial. Bukan hanya berpikir kritis dalam menerima ilmu yang diberikan oleh dosen, melainkan berpartisipasi pada tindakan kolektif dan aktif menyuarakan hak bersama.[25]

Pada era neoliberalisasi, putusan diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah setelah pandemi memicu perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi. Perguruan tinggi berlomba-lomba berfokus pada profit dengan meningkatkan citra agar dilirik oleh pemodal. Di samping itu, perguruan tinggi turut menekan mahasiswa sebagai sumber pendanaan akibat kurangnya pemasukan keuangan dari pemerintah. Penghematan ini justru terasa sebagai pemerasan sistemik yang menindas sebagian sivitas akademik.[26]

Giroux menegaskan pendidikan sepatutnya menjadi proses pembentukan kesadaran kritis dan pembebasan dari kepentingan ekonomi oleh struktur kekuasaan yang membebani mahasiswa, tenaga kerja pendidik, dan kelompok terdampak lainnya. Melalui pedagogi kritis, Giroux menawarkan alternatif untuk mengembalikan orientasi pendidikan pada peningkatan tujuan-tujuan yang bersifat publik, serta tidak dicampuri dengan praktik komersialisasi. Pendidikan seharusnya berfokus untuk melahirkan pemikiran kritis mahasiswa, kesadaran moral, sikap demokratis, dan rasa tanggung jawab pada individu dan sosial. Dosen sebagai pendidik transformatif dan warga aktif seharusnya bukan hanya membagikan ilmu dan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya, tetapi menerapkan konsep pendidikan sebagai media kritis atas kondisi sosial yang terjadi dan membuka peluang kemungkinan meningkatnya ruang publik yang demokratis.[27] Mahasiswa harus memiliki kesadaran bahwa mereka berperan sebagai agen kritis yang mampu mengulik otoritas, menilai kekuasaan, menerapkan ilmu pada kehidupan nyata, dan mempunyai tanggung jawab sosial. Giroux memandang mahasiswa sebagai agen kritis yang siap menjadi garda terdepan perlawanan pada praktik komersial di lingkup perguruan tinggi dalam proses mengembalikan orientasi pendidikan sebagai tempat belajar yang kritis dan kolektif.[28]

Melihat kondisi di UGM saat ini, penting untuk menerapkan pemikiran Giroux tentang pedagogi kritis ke lingkungan pendidikan terutama di perguruan tinggi. Bukan tidak mungkin, praktik komersialisasi secara perlahan berpotensi mengikis fondasi utama orientasi pendidikan. Tak jarang, perguruan tinggi melupakan atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mengakomodasi pengembangan intelektual karakter mahasiswa.[29] Di tengah kampus yang sedang menjalankan praktik komersialisasi, pedagogi kritis bisa diterapkan bukan hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik nyata untuk mengembalikan orientasi pendidikan yang seharusnya. Pendidikan selayaknya menjadi ruang belajar, ruang kebebasan berpikir kritis, ruang kreativitas tanpa batas, dan ruang aman untuk menyuarakan suara bersama.[30]

[Elsa, Laely]

1 Syatir, M. L. (2025). Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN sebagai Roadmap Anggaran Tahun 2025. DJPb. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2935-efisiensi-belanja-dalam-pelaksanaan-apbn-sebagai-roadmap-anggaran-tahun-2025.html

2 Zulfikar, F. (2025). Anggaran Pendidikan Dipotong, Ada Kementerian/Lembaga yang Tak Kena Efisiensi? detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7777168/anggaran-pendidikan-dipotong-ada-kementerian-lembaga-yang-tak-kena-efisiensi

3 Departemen Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. (2025). Edaran Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Efisiensi Listrik. Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. https://deb.sv.ugm.ac.id/edaran-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-efisiensi-listrik/

4 Wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (Forkom UKM). Selengkapnya baca Sorot 1.

5 Puspita, M. D. (2024, Agustus). Sejarah PTNBH yang Disebut sebagai Penyebab UKT Semakin Mahal. tempo.co. https://www.tempo.co/politik/sejarah-ptnbh-yang-disebut-sebagai-penyebab-ukt-semakin-mahal-27053

6 Universitas Gadjah Mada. (2024, Juli). UKT dan IPI Jalur UM UGM (PBU dan CBT) TA 2025/2026 – um.ugm.ac.id. UM UGM. https://um.ugm.ac.id/ukt-dan-ipi-jalur-um-ugm-pbu-dan-cbt-ta-2025-2026/

7 Putri, D. L., & Dzulfatroh, A. N. (2024). Dilema UKT dan Uang Pangkal Kampus, Semakin Beratkan Mahasiswa, tapi Dana Pemerintah Terbatas. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/12/080000365/dilema-ukt-dan-uang-pangkal-kampus-semakin-beratkan-mahasiswa-tapi-dana?page=all

8 Yulianti, C. (2025, Februari). JPPI Ungkap 5 Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Siswa Terancam Putus Sekolah Baca artikel detikedu, "JPPI Ungkap 5 Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Siswa Terancam Putus Sekolah. detik.Edu. https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7774928/jppi-ungkap-5-dampak-efisiensi-anggaran-pendidikan-siswa-terancam-putus-sekolah

9 Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. Journal on Education, 5(4), 11946. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2153

10 Purwaningrum, A., Sholehuddin, M. S., & Hufrof, M. (2023). Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(6), 70. https://share.google/IPq9jsWZgLiU8Jy1u

11 Yuliati, N., Wahhab, A. H., & Darmawan, A. A. (2024). Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial. Kariman, 12(1), 71. https://www.researchgate.net/publication/389565803_Dampak_Komersialisasi_Pendidikan_terhadap_Kesenjangan_Sosial

12 Ferragamo, M. (2024). What Should the U.S. Do About Rising Student Loan Debt? Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/us-student-loan-debt-trends-economic-impact

13 Fleming, P. (2021). Dark Academia How Universities Die. Pluto Press. Hlm. 2 & 10.

14 Herrine, L. (2018). Neoliberalism and Higher Education Finance: The For-Profit Case Study. LPE Project. https://lpeproject.org/blog/for-profit-case-study/

15 Sullivan, A., Parsons, S., Green, F., Wiggins, R. D., & Ploubidis, G. (2018, Agustus 2018 11). Elite universities, fields of study and top salaries: Which degree will make you rich? British Educational Research Association (BERA) Journals. https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/berj.3453

16 Edmonds, J. (2012). Factors influencing choice of college major: what really makes a difference? https://rdw.rowan.edu/etd/147

17 Kardoyo, Pitaloka, L. K., & Hapsoro, B. B. (2021). Universities Academic Service Quality to Student Satisfaction. http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/47790

18 Prasetyo, K. C. (2024). Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 3(1), 4-6. https://talenta.usu.ac.id/jlpsp/article/view/15810

19 Fleming, P. (2021). Dark Academia: How Universities Die. Pluto Press. Hlm. 14.

20 Ibid

21 Dharma, D., & Muflihun, M. (2025). Aksi Okupasi UGM Soroti Masalah Penyempitan Ruang Kegiatan Mahasiswa. Balairung Press. https://www.balairungpress.com/2025/05/aksi-okupasi-ugm-soroti-masalah-penyempitan-ruang-kegiatan-mahasiswa/

22 Wattimena, R. A. A. (2018) PEDAGOGI KRITIS: PEMIKIRAN HENRY GIROUX TENTANG PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA UNTUK INDONESIA. Jurnal Filsafat, 28(2), doi: 10.22146/jf.34714

23 Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York, NY: The Continuum International Publishing Group. Hlm. 159.

24 Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York, NY: The Continuum International Publishing Group. Hlm. 3-7.

25 Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York, NY: The Continuum International Publishing Group. Hlm. 7.

26 Prasetyo, K. C. (2024). Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 3(1), 4-6. https://talenta.usu.ac.id/jlpsp/article/view/15810

27 Utami, I. S., & Alfian, A. (2017). KONSEP CRITICAL PEDAGOGY HENRY A. GIROUX. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(2), 145–154. https://doi.org/10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p145-154

28 Ibid

29 Fleming, P. (2021). Dark Academia: How Universities Die. Pluto Press. Hlm. 17.

30 Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York, NY: The Continuum International Publishing Group. Hlm. 157.

Fotografer: Osmond

Melihat Relevansi Filsafat

Pada Jumat (3/10), Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar mengadakan acara diskusi Kawah Candradimuka dengan tabik "Filsafat gak berguna, ah masa sih?". Diskusi ini diselenggarakan di Selasar, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menghadirkan Luthfi Baihaqi Riziq sebagai narasumber dan Fauzi Akbar sebagai moderator. Diskusi ini dilatarbelakangi dari esai rembug Luthfi di tanggal 14 Desember 2024 yang berjudul "Kematian Fakultas? Mempertimbangkan Inter- dan Disiplinaritas Derasnya". Berangkat dari tulisannya, muncul sebuah pertanyaan dari moderator akan peran kajian filsafat dalam arus kajian-kajian lintas disiplin ilmu masa kini dan apakah kajian-kajian filsafat masih bisa berguna dalam menjawab problem-problem masa kini.

Mulanya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Luthfi membuka dengan menampilkan gambar *science overlay map* untuk menunjukkan keterkaitan antar disiplin ilmu berdasarkan data sitasi ilmiah.

> ***"Setiap tarikan dalam science overlay map itu adalah cross-science connection yang menjelaskan bagaimana suatu artikel dapat menyitasi artikel dari bidang keilmuan lain," ujarnya.***

Ilustrasi diatas menunjukkan tren riset antar disiplin ilmu di dunia akademik saat ini. Melalui paparan di atas, Luthfi memakai istilah *cross-discipline* untuk mengilustrasikan perkembangan riset-riset lintas disiplin ilmu. Namun dalam kenyataan praktik *cross discipline*, riset-riset filsafat dan ilmu humaniora, justru sering kali diremehkan karena dianggap sulit berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain, terutama ilmu-ilmu eksakta. Pandangan semacam ini, masih sering dijumpai dan berakar pada kenyataan bahwa bidang *social studies* memiliki sedikit tarikan (*cross-science connection*), dibandingkan ilmu-ilmu eksakta. Sehingga banyak orang belum dapat membayangkan bentuk kerja sama yang melibatkan filsafat dan ilmu humaniora lainnya.

Untuk memahami lebih dalam tentang bentuk dan tantangan kolaborasi lintas disiplin ilmu, serta bagaimana pelibatan kajian-kajian filsafat dan ilmu humaniora di dalamnya. Maka, diperlukan pembedaan tiga konsep utama dalam riset-riset lintas disiplin ilmu, yaitu multidisiplin, t*ransdisiplin,* dan interdisiplin.

Luthfi menerangkan bahwa "Multidisiplin merujuk pada situasi ketika dua atau lebih disiplin ilmu terlibat dalam satu riset untuk membawa perspektif masing-masing terhadap suatu persoalan yang ingin dikaji atau dipecahkan". Contohnya, seorang fisikawan dan seorang insinyur yang berasal dari latar keilmuan yang berbeda, dilatih dalam konteks yang berbeda, dan dibentuk untuk melakukan hal yang berbeda, baik dalam riset maupun dalam pendekatan metodologinya. Kemudian, ketika mereka bertemu dalam satu proyek penelitian, sang fisikawan dan seorang insinyur membawa perspektifnya sendiri tanpa harus melewati atau menghapus batas antara fisika dan teknik.

Fotografer: Osmond

Di sisi lain, *transdisiplin* memiliki definisi yang berbeda, "*Transdisiplin* merupakan bentuk riset yang berupaya melampaui sekat-sekat akademik. Jadi, para akademisi berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak di luar ranah akademik" ujar Luthfi. Konsep ini berlaku ketika kita hendak menjalin kolaborasi dengan komunitas atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan akademik.

Istilah terakhir, bagi Luthfi terdapat makna yang tumpang tindih. Maka dari itu, untuk memudahkan memahami konsep interdisipliner, ia meminjam taksonomi dari Julie Thompson Klein. Taksonomi ini terdiri tiga tahapan perjalanan, seperti: Pertama, tingkat paling dangkal (*Pseudo-ID*), di mana berbagai disiplin ilmu hanya sekadar "saling meminjam" alat atau istilah secara dangkal tanpa adanya dialog nyata; Kedua, ketika interaksi semakin dalam, ia berkembang menjadi *Contextualizing-ID*, di mana satu disiplin ilmu digunakan sebagai "bingkai" atau konteks untuk memperkaya wawasan disiplin lainnya, meskipun batas-batasnya masih jelas terlihat; Ketiga, puncaknya adalah *Full Integration* (Integrasi Penuh), yakni sebuah peleburan total di mana batas-batas antar disiplin menjadi kabur sepenuhnya, melahirkan sebuah sintesis, teori, atau bahkan bidang keilmuan baru yang utuh dan tidak mungkin ada jika disiplin-disiplin tersebut tetap terpisah.

Setelah memaparkan ketiga istilah tersebut, kemudian Fauzi selaku moderator mempertanyakan, "Bagaimana kita bisa tetap relevan terhadap itu semua? Dan bagaimana kita bisa untuk *berinteraksi* di dalamnya?," Dalam menjawab pertanyaan moderator, Luthfi optimis akan filsafat selalu relevan dalam setiap perkembangan zamannya.

"Tentu Filsafat itu bisa dipakai dalam interdisiplinaritas dalam riset-riset interdisiplin, dan multidisiplin," terangnya.

Melanjutkan jawaban dari pertanyaan pemantik di atas, sekurang-kurangnya ada tiga contoh konkret dalam melihat relevansi kajian filsafat di dunia luar akademik, diantaranya ada Filsafat Publik, Filsafat *Pop*, dan Filsafat Lapangan.

Secara sederhana, *Public Philosophy* merupakan suatu gerakan filsafat yang membawa teori-teori atau kajian-kajian yang semulanya berada di dalam kampus untuk kemudian digunakan di luar kampus. Contohnya, "Frans Magnis Suseno, datang ke penggadilannya Ferdi Sambo untuk memberikan opini atau masukan sebagai ahli (etika) terkait kasus yang dihadapinya," ujar Luthfi.

Kemudian, *Pop Philosophy* yang membawa ranah kajian akademis ke dalam medium yang jauh lebih sederhana untuk orang awam. Contoh konkret nya seperti buku Filosofi Teras, Dunia Sophie dan lain sebagainya.

Terakhir *Philosophy on Fieldwork*, secara definisi merupakan pendekatan yang menawarkan siklus kerja bagi para teoritisi filsafat untuk membagi waktu antara riset mandiri di akademik dan riset langsung di lapangan untuk memecahkan masalah yang nyata. Misalnya, seorang ahli filsafat yang meneliti masalah sosial atau kesehatan masyarakat dengan mengumpulkan data dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, kemudian menggunakan hasil tersebut untuk mencari solusi praktis sesuai dengan pendekatan filsafat yang digunakannya.

Setelah pemaparan materi dari Luthfi, Fauzi kemudian melemparkan sebuah pertanyaan, "Sebenarnya, apa *sih problem* yang dihadapi oleh filsafat, ketika hanya berpusat pada (bidang) praktisnya saja, dan bagaimana cara mengatasi *problem* tersebut?". Menjawab pertanyaan tersebut, Luthfi memaparkan masalah yang dihadapi berupa kesulitan akses terhadap data lapangan, dan minimnya kepercayaan pada hasil kajian. Sehingga muncul sifat defensif berupa penolakan kolaborasi dari disiplin ilmu lain. Luthfi menawarkan solusi, bahwa harus ada pola komunikasi yang baik, yaitu pola komunikasi yang dapat menjembatani perbedaan cara pandang antar disiplin ilmu. Sehingga melalui pola komunikasi tersebut, tercipta sebuah kolaborasi aktif antara filsafat dengan disiplin ilmu lainnya.

Sebagai penutup diskusi, Luthfi mengajak mahasiswa filsafat untuk berani bertindak lebih dahulu dalam praktik-praktik lapangan daripada sibuk merumuskan teori-teori lapangan. Menurutnya, kita tidak perlu *pusing* untuk memikirkan relevansi filsafat, "Lakukan *dulu aja*, baru nanti muncul praktik filsafatnya, setelahnya baru bisa kita formulasikan" ujarnya.

[Fauzi]

Pameran Sutartinah Kembali, Kini Memperjuangkan Nama Abadi

Fotografer: Fadil

"Pameran ini merupakan ruang untuk mempertemukan arsip, pengetahuan, dan kreativitas para penulis serta seniman," buka Sora Gia, selaku master of ceremony.

Pameran Sutartinah hadir kembali setelah berhenti sementara sejak 2022. Kali ini, pameran diadakan pada Sabtu (14/9), di Rumah DAS (Dyan Art Studio), sekaligus merayakan ulang tahun Sutartinah ke-135 tahun. "Pameran ini pernah diadakan pada tahun 2022, namun ditiadakan karena persoalan efisiensi dana," ungkap Yulia Rosdiana, selaku Ketua Tim Jalin Relasi Cakra Dewantara. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu "Sutartinah" yang dipandu oleh Nyi Yuli Miroto, pada pukul 15.35 WIB.

Namun, terdapat sedikit perbedaan pada pameran kali ini dengan digaungkannya isu pengangkatan Sutartinah sebagai pahlawan nasional. Melalui Badan Pusat Wanita Taman Siswa, sebenarnya telah mengajukan agenda pengangkatan Raden Ajeng Sutartinah sebagai pahlawan nasional Indonesia yang disambut baik oleh Rumah DAS. Hal ini dimaksudkan agar sosok Sutartinah lebih dikenal masyarakat bukan sebagai istri Ki Hadjar Dewantara. Akan tetapi, juga sebagai perempuan yang turut mendirikan Taman Siswa dan aktif dalam pergerakan perempuan Indonesia.

Sosok Lembut Dibalik Bapak Pendidikan

> *"Apalah artinya aku tanpa kehadiran Nyi Hadjar Dewantara," kutipan pesan Ki Hadjar Dewantara yang dibacakan oleh Nyi Yuli Miroto, perwakilan dari Badan Pusat Wanita Taman Siswa.*

Nyi Yuli menegaskan, bahwa nama besar Ki Hadjar tidak lepas dari sosok perempuan yang selama ini hadir di hidupnya. Gia juga menambahkan bahwa sejak 2024, tim Badan Pusat Wanita Taman Siswa telah menggali sisi lain Sutartinah sebagai perempuan Jawa yang memperluas pengetahuan feminisme berbasis kearifan lokal. "Kami *nyuwun* restu, semoga Nyi Hadjar dapat kita angkat jadi pahlawan nasional, karena beliau layak seperti halnya Nyi Ahmad Dahlan," pinta Nyi Yuli.

Ketidakterkenalan nama Sutartinah ternyata dialami banyak pihak. Achmad Fiqhi W.D., Direktur Rumah DAS, mengaku baru tahu peran Sutartinah setelah membaca biografi yang ditulis Bambang Sokawati, anak kelima dari Ki Hadjar dan Sutartinah. "Saya pernah sekolah di Taman Siswa, tetapi tidak tahu Taman Siswa berdiri berkat Sutartinah," ungkapnya. Hal ini serupa dialami oleh Syafiatudina atau Dina, salah satu penulis dalam pameran, ia juga tidak mengetahui lebih terang nama Sutartinah.

Lebih lanjut, Fiqhi menyinggung kembali perjalanan riset yang bermula dari tawaran Dian Anggraini, salah satu dewan pakar bidang kebudayaan. "Muncullah ide nama Sutartinah, ternyata tidak cukup terkenal karena selalu hadir di bawah kebesaran nama Ki Hadjar Dewantara," ujarnya. Dari riset tersebut, lahir 20 karya yang tidak hanya menghadirkan wajah Sutartinah secara dokumentatif, tetapi juga menelusuri apa yang membentuk dan dibentuk oleh Sutartinah.

Nyi Yuli menceritakan bagaimana Sutartinah pernah berperan dalam pembebasan tiga serangkai Douwes Dekker, Ki Hadjar, dan Cipto Mangunkusumo yang ditangkap di Jerman. Sutartinah berinisiatif mendekati sahabatnya, seorang pelukis kesayangan Ratu Belanda untuk membujuk ratu mengeluarkan surat pembebasan kepada pemerintah Jerman. "Ternyata melalui dunia seni pun arah politik bisa dipengaruhi," tegasnya.

Pada pukul 16.15 WIB, Dina menyampaikan refleksinya sebagai perwakilan penulis. Ia menulis sebuah surat fiksi kepada Sutartinah, menggambarkan feminisme yang tumbuh dari pengasuhan dan kehidupan sehari-hari. "Dari kisah hidupnya saya mengetahui feminisme bukan sebagai suatu ideologi politik saja, melainkan sebagai lampu hidup yang dibentuk melalui pengasuhan," tandasnya. Lampu hidup, menurut Dina, adalah pengetahuan feminis yang tidak hanya berbasis pikiran, tetapi juga hati sebuah konsep yang disebut sebagai "rasa" atau *"roso"* dalam pemikiran Jawa.

Acara semakin memuncak ketika Nyi Ganawati, cucu Ki Hadjar, maju untuk memberi sambutan sekaligus membuka pameran secara resmi. Meski tak banyak bicara, beliau menceritakan pengalamannya menyaksikan langsung Sutartinah dalam keseharian. "Kalau saya menceritakan kehidupan sehari-hari Nyi Hadjar, beliau itu sangat *sat-set* menggantikan semua kegiatan Ki Hadjar," jelasnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan simbolisasi karya lukis Kartika Affandi kepada keluarga Ki Hadjar Dewantara untuk Museum Dewantara Kirti Griya. Fiqhi menyebut momen itu mistis dan spiritual karena mempertautkan dua generasi perupa Affandi, yang pernah memberikan lukisan kepada Ki Hadjar, dan kini Kartika Affandi, sang anak, menyerahkan lukisan Sutartinah. "Momen penyerahan lukisan itu menjadi momen yang spiritual bagi saya," singkapnya. Setelah sesi foto bersama, acara dilanjutkan dengan pentas dolanan anak dari Laboratorium Sariswara yang memandu hadirin menuju ruang pameran melalui permainan sepuran.

Menjelang pukul 17.00 WIB, rangkaian acara ditutup dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah hingga malam hari. Fiqhi menyampaikan harapannya, "Harapan yang lebih sederhana adalah nama Sutartinah itu punya status yang mampu berdiri sendiri sebagai Sutartinah." Nyi Ganawati pun membeberkan harapannya agar tidak melupakan pemikiran-pemikiran dari Sutartinah yang masih sedikit dipahami generasi muda.

[Deni, Isam]

Kekerasan Budaya Pasca 1965

Citra Jasmin Pertiwi

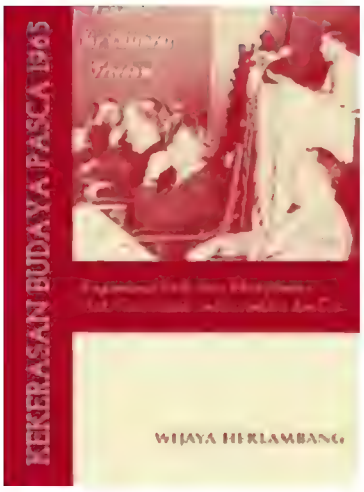

"Saat moralitas dibangun di atas kuburan massal dan diamankan melalui teror serta kebohongan, kehampaan moral tak syak lagi terjadi."

Ideologi anti-komunisme yang ditanamkan oleh rezim Orde Baru nyatanya masih tumbuh subur dalam lapisan masyarakat masa kini. Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya Wijaya Herlambang menawarkan sebuah analisis yang tajam, mendalam, dan krusial mengenai salah satu periode paling gelap dalam sejarah Indonesia: tragedi pembantaian massal yang menyasar simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965–1966. Berbeda dengan banyak karya sejarah yang berfokus pada kekerasan fisik atau politik semata, Herlambang membawa kita pada dimensi kekerasan yang lebih sunyi, tetapi berdampak fundamental: kekerasan budaya.

Karya ini pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk membongkar dan menganalisis bagaimana rezim Orde Baru, yang lahir dari darah tragedi 1965, berhasil melegitimasi kekejaman tersebut melalui manipulasi dan penguasaan agen-agen kebudayaan. Herlambang berargumen bahwa ideologi anti-komunisme yang hingga kini masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia bukanlah semata-mata produk indoktrinasi politik dan militer, melainkan sebuah konstruksi budaya yang ditancapkan secara halus namun masif. Jauh setelah Orde Baru tumbang, ideologi anti-komunis warisan rezim itu masih bertahan kokoh dalam lapisan masyarakat. Seolah-olah, tidak ada kedamaian untuk para korban bahkan setelah mereka dibunuh lebih dari 40 tahun yang lalu

Konsep kunci yang diangkat oleh Herlambang adalah kekerasan budaya *(cultural violence)*. Menurutnya, kekerasan ini bekerja dengan cara menciptakan pembenaran moral, ideologis, dan simbolis terhadap kekerasan struktural (ketidakadilan sistem) dan kekerasan langsung (pembunuhan massal). Dalam konteks 1965, kekerasan budaya bekerja dengan cara mentransformasi nilai-nilai moral dan budaya agar masyarakat melihat praktik pembantaian terhadap kaum komunis sebagai sesuatu yang ilmiah dan lazim, bahkan sudah sepatutnya dilakukan. Rezim Orde Baru sukses memelintir sejarah kiri di Indonesia untuk mencitrakannya sebagai ideologi iblis yang menjadi ancaman terbesar bagi negara.

Herlambang menyoroti bahwa dimensi kebudayaan yang dimanipulasi oleh pemerintah Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya selama lebih dari 30 tahun jauh lebih berpengaruh terhadap bertahannya ideologi anti-komunis dibandingkan kampanye politik biasa. Kekerasan yang terjadi di lapangan dapat dilihat sebagai bagian dari praktik kekerasan itu sendiri yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya legitimasi yang dilakukan melalui budaya.

Salah satu temuan paling provokatif dalam buku ini adalah peran sentral ideologi Humanisme Universal dalam proses legitimasi kekerasan. Secara paradoks, sebuah gagasan yang seharusnya menjunjung tinggi martabat manusia—hak asasi manusia, kebebasan, dan kemanusiaan—justru digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan anti-kemanusiaan.

Herlambang mengupas bagaimana kelompok-kelompok kebudayaan yang mengusung ideologi ini, terutama para sastrawan yang tergabung dalam Majalah Horison (yang dikenal sebagai majalah kebudayaan anti-komunis), berupaya menancapkan doktrin anti-komunis. Humanisme Universal dipilih karena memiliki tujuan ganda: (1) sebagai alat untuk memposisikan komunisme—yang sering diidentikkan dengan materialisme dan anti-Tuhan—sebagai entitas yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan yang universal; dan (2) sebagai upaya untuk mengarahkan dan membentuk aktivitas kebudayaan Indonesia yang berkiblat pada dunia Barat, khususnya Amerika Serikat, di tengah memanasnya Perang Dingin.

Manipulasi dalam Sastra

Analisis Herlambang terhadap produk kebudayaan, khususnya cerita-cerita pendek yang dimuat di *Majalah Horison,* menjadi titik fokus yang kuat. Ia menunjukkan adanya pola manipulatif dalam karya-karya sastra ini. Walaupun secara permukaan cerita-cerita itu mengangkat tema yang mendukung penegakan hak asasi manusia dan kemanusiaan, pada kenyataannya mereka berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi gagasan humanisme itu sendiri.

Penulis-penulis ini, yang merupakan agen-agen kebudayaan Orde Baru, menciptakan narasi yang tidak berfokus pada tragedi atau penderitaan korban (simpatisan PKI), melainkan lebih menekankan pada gejolak psikologis yang dialami oleh pelaku pembunuhan. Pembaca diarahkan untuk lebih menaruh simpati kepada para pelaku kekerasan—seperti aparat militer, pemuda, atau warga sipil yang terlibat—yang saat itu digambarkan mengalami perasaan ragu, takut, atau tertekan dalam melakukan perbuatannya.

Dalam karya-karya tersebut, peristiwa pembantaian yang dialami oleh kaum komunis tidak menjadi inti persoalan cerita. Inti persoalan bergeser menjadi konflik psikologis yang dialami oleh pelaku selama menyaksikan atau melakukan hal tersebut. Tujuannya jelas: pembaca dipengaruhi untuk lebih menghargai jasa para pelaku pembantaian yang berhasil menumpas simpatisan komunis, sehingga tragedi pembunuhan massal tahun 1965–1966 dapat dimaknai sebagai sebuah hal yang lumrah, dapat dimaklumi, dan bahkan sebagai tugas heroik untuk menyelamatkan negara dari bahaya komunisme. Dengan demikian, kekejaman di lapangan terbungkus dalam selimut empati terhadap "keharusan" yang dialami oleh para pelakunya.

Puncak Propaganda Visual

Produk kebudayaan lain yang menjadi instrumen paling ekstrem dan efektif untuk melegitimasi kekerasan massal adalah film, terutama *Film Pengkhianatan G30S/PKI.* Buku ini mengupas secara detail bagaimana film yang diwajibkan untuk tayang setiap tahun selama bertahun-tahun itu menjadi penancap doktrin anti-komunis paling kuat.

Herlambang mengulas peran Nugroho Notosusanto (sebagai penulis naskah, sejarawan Orde Baru, dan agen kebudayaan) dan Arifin C Noer (sebagai sutradara). Melalui narasi versi Nugroho, film ini memaksa pemirsa untuk memercayai bahwa PKI menjadi dalang satu-satunya dalam percobaan *coup* pada tanggal 30 September 1965. Lebih dari itu, film ini bekerja melalui dramatisasi dan manipulasi visual.

Simpatisan komunis digambarkan dan didramatisasi menjadi sosok pembunuh yang sadis, kejam, brutal, dan tidak manusiawi dalam upaya mereka menumpas musuh-musuhnya. Adegan-adegan kekejaman PKI (yang sebagian besar adalah fiksi propaganda Orde Baru) dipertontonkan secara berulang, sehingga penonton diajak untuk menerima secara emosional bahwa pembunuhan massal yang kemudian dilakukan oleh militer dan kelompok anti-komunis lainnya kepada kaum komunis pada tahun 1965–1966 merupakan sebuah hal yang wajar dan sudah sepatutnya dilakukan sebagai balasan setimpal terhadap kekejian yang mereka lakukan.

Herlambang juga menyoroti bagaimana Nugroho tidak memperlihatkan urutan peristiwa percobaan *coup* tersebut secara detail, atau bahkan memalsukannya, sehingga berhasil memanipulasi persepsi masyarakat yang menonton film tersebut tentang siapa yang salah, siapa yang benar, dan mengapa kekerasan harus terjadi. Film ini menjadi contoh nyata bagaimana kebudayaan digunakan sebagai senjata ideologis untuk mematikan nalar kritis dan menumbuhkan kebencian turun-temurun.

Kekerasan Budaya Pasca 1965 bukan sekadar buku sejarah. Ini adalah sebuah cermin yang menantang ingatan kolektif masyarakat Indonesia, sebuah instrumen untuk menggugat kebenaran tunggal yang selama puluhan tahun ditanamkan oleh rezim diktator militer. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan mendasar: apabila dalam pertaruhan kehidupan kita dihadapkan dua pilihan, memilih pembenaran kepalsuan yang menyenangkan atau membongkar kebenaran walaupun itu menyakitkan, mana yang akan kita pilih?

Melalui pembahasan yang sistematis tentang penggunaan sastra, film, dan ideologi Humanisme Universal sebagai alat propaganda, Wijaya Herlambang berhasil menunjukkan bahwa tragedi 1965 adalah tragedi berlapis—tidak hanya pembunuhan fisik, tetapi juga pembunuhan karakter, pembunuhan kebenaran, dan pembunuhan budaya. Ideologi anti-komunisme yang masih tumbuh subur dalam lapisan masyarakat masa kini adalah bukti nyata akan keberhasilan strategi "kekerasan budaya" Orde Baru.

Ilustrasi: Raehan

Fotografer: Fadil

Pekik Senja Winarso, Menolak Lupa Sejarah Kelam

"Dari saya masih kecil, dimulai semasa SD sudah disuruh membenci mereka." tabik Winarso, Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) '65.

Menjelang hidup yang kian menyenja, di antara lirihnya suara korban pembantaian tahun 1965-1966 yang kian menua, membuncah pula pekik lantang dari individu-individu yang menolak tunduk pada lupa. Tragedi kelam saat rakyat menindas sesamanya itu masih menyisakan tuntutan yang tak usai. Salah satu suara tak gentar itu milik Winarso, yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tak lagi mendamba permintaan maaf dari pemerintah. Baginya, kata maaf hanyalah basa-basi tanpa makna. Yang ia tuntut sejatinya adalah tanggung jawab konkret negara atas luka yang belum terpulihkan.

Meski tak termasuk korban pembantaian langsung tragedi 1965-1966, Winarso memposisikan dirinya sebagai korban dari manipulasi sejarah yang terstruktur oleh negara. "Saya dan kalian anak muda itu korban, biarpun bukan korban langsung, tetapi korban dari manipulasi sejarah keburukan bangsa ini," ungkapnya dengan penuh keprihatinan. Sejak berusia delapan tahun, ia telah menjadi korban psikis akibat menyaksikan langsung kebengisan tragedi pembantaian 65-66 di kampung halamannya, Solo. Di depan mata Winarso kecil, tetangganya yang sangat akrab dengannya terpaksa menjadi korban pengeroyokan brutal oleh massa yang menuduhnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di masa tuanya, Winarso kini memanggul mimpi besar: memberikan kehidupan yang layak bagi para korban 1965-1966 melalui wadah Sekber 65. Namun, perjuangan Winarso untuk mengadvokasi nasib para korban bukanlah cita-cita yang yang ia genggam sejak dini. Jauh di masa kecilnya, impiannya justru merentang ke ranah yang berbeda sama sekali. karena pada saat itu ia justru bermimpi untuk menjadi seniman. "Dulu waktu masih kecil, saya ingin jadi seniman besar," kenang Winarso.

Hasrat Winarso menjadi seniman bersemi dari kekagumannya pada sosok Rendra dan Putu Wijaya setelah membaca majalah *Horison*. Dari berbagai medium seni, teater yang dipilihnya sebagai jalan karena dianggap mampu membuka ruang komunikasi langsung dengan khalayak. Berawal dari panggung teater remaja di bangku sekolah hingga pendalaman teori mendalam saat dewasa, Winarso pun sukses mendirikan Komunitas Teater Surakarta bersama rekan-rekan seperjuangan. Namun, perjalanan berseni Winarso tak semulus skenario. Menyaksikan realitas sosial yang menindas pada masanya, ia mulai disergap pertanyaan eksistensial, "Untuk apa aku berseni?" refleksi hidupnya yang mengalihkan fokus hidupnya.

Kesadaran mendalam akan penindasan yang mencekik masyarakat saat itu sontak menggeser prioritas Winarso, membuat panggung teater menjadi terasa tidak lagi mendesak. "Saya berpikir, apakah saya harus berteater di atas panggung atau di gedung-gedung tertentu, biar nanti menjadi seniman besar? Atau saya mau berteater untuk apa? Maka

saya memilih berteater untuk rakyat," terang Winarso. Krisis batin ini akhirnya mendorongnya mengaminkan pandangan seni untuk rakyat (*art for people*), yang ia wujudkan dalam aksi demonstrasi pertamanya berupa *happening art* berbentuk teater sarkasme. Melibatkan diri langsung di jalanan memberikan kepuasan tersendiri baginya. "Ternyata berteater di jalan, secara pribadi lebih memuaskan saya," ujar Winarso.

Perjalanan teater jalanan pada saat aksi demonstrasi membuka pintu bagi Winarso menuju dunia aktivisme di Solo. Terinspirasi oleh Revolusi Tiongkok, ia mendirikan Serikat Rakyat Surakarta yang beranggotakan kaum miskin kota, dengan tujuan utama melawan rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Keberhasilan Winarso dalam mengorganisir basis massa ini membuat namanya tersohor di kancah pergerakan, hingga ia ditarik ke Jakarta pada 1995. Di Ibu Kota, Winarso bergabung dengan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD), sebuah organisasi yang setahun kemudian, pada 1996, dideklarasikan sebagai Partai Rakyat Demokratik, motor penting perlawanan terhadap hegemoni Partai Golongan Karya (Golkar).

Ketika terjadi kerusuhan 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai peristiwa "Kudatuli," pemerintah Orde Baru serta-merta menuding PRD sebagai dalang, membuat banyak anggotanya, termasuk Winarso, menjadi buronan. Dalam masa pelarian inilah, yang berlangsung sekitar setahun, Winarso justru menemukan jejaring perlindungan yang tak terduga: para korban tragedi 1965-1966. Mereka membantunya bersembunyi dan berpindah-pindah, dan melalui interaksi intensif selama pelarian tersebut, Winarso akhirnya menyerap kebenaran pahit tentang tragedi 1965-1966–sebuah fakta sejarah yang selama ini ditutup-tutupi dan dimanipulasi oleh rezim Soeharto.

Di tengah pelarian dari kejaran rezim, Winarso menemukan kebenaran yang membebaskan. "Saya banyak belajar. Ternyata apa yang dituduh kepada mereka bahwa mereka adalah pembunuh, pemberontak, ateis, itu salah semua," tegasnya. Kesadaran bahwa orang-orang yang dicap pengkhianat justru adalah pribadi yang tulus menumbuhkan empati mendalam dalam dirinya.

Dalam momen krusial itulah, Winarso mengukuhkan sebuah janji. "Saya bilang dalam hati saya, kalau saya selamat, saya akan berperan dalam membantu Bapak-Ibu korban ini," tekad inilah yang menjadi embrio mimpi besar Winarso tercipta.

WINARSO DAN SEKBER'65.

"Kalau saya bertemu dengan anak (korban tragedi) '65. Itu saya tidak boleh (berteman) sama orang tua. Jangan! jangan dekat-dekat dengan PKI, jangan dekat-dekat dengan ini, saya disuruh membenci itu," ungkap Winarso.

Kebencian yang ditanamkan sejak kecil terhadap mereka yang dilabeli PKI adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup Winarso. Namun, titik balik terjadi saat ia bertemu langsung dengan orang-orang terafiliasi dengan tragedi 1965-1966. Seluruh narasi buruk yang diserapnya sejak kanak-kanak ternyata berbalik 180 derajat dengan realitas yang ia saksikan. Alih-alih menemukan musuh, Winarso justru mengaku banyak mendapatkan kebaikan dan pertolongan tulus dari mereka.

"Ternyata tidak, ternyata itu salah, saya dalami bertahun-tahun ternyata tidak (benar cerita-cerita itu)," tegas Winarso.

Inti kebaikan yang mengubah pandangan Winarso terpahat jelas saat ia menjadi buronan pada tahun 1996-1998. Pada masa genting itu, Winarso mengakui bahwa ia menerima bantuan advokasi dan perlindungan yang masif dari keluarga korban tragedi 1965-1966. Pengalaman nyata akan kemanusiaan dari mereka yang termarjinalkan inilah yang menjadi latar belakang utama dirinya kelak mendirikan Sekber '65. Melalui wadah ini, Winarso bertekad membalas setiap budi yang pernah ia terima, mengabdikan diri untuk memulihkan martabat dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh korban tragedi 1965.

Benih pembentukan Sekber '65 yang dicetuskan Winarso berawal dari serangkaian diskusi intensif dengan tokoh-tokoh kunci dari berbagai latar belakang. Ia berdialog dengan Sulami, mantan sekretaris Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia); Soesilo Toer, adik kandung sastrawan legendaris Pramoedya Ananta Toer; Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) terkemuka, serta Hasan Raid, seorang tokoh perjuangan kemerdekaan. Dari jalinan pemikiran dan tekad bersama ini, Winarso kemudian menginisiasi pendirian Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965-1966 di Jakarta, yang menjadi langkah nyata pertamanya untuk menunaikan janji kepada para korban. Kemelut muncul dalam upaya penyatuan korban, sebab perkembangan YPKP 1965-1966 tak disambut baik oleh semua penyintas tragedi. Melalui inisiatif Ali Surachman, selaku Menteri Irigasi Kabinet Dwikora II, sebagian korban yang didominasi oleh kader PNI (Partai Nasional Indonesia) pro-Soekarno–kelompok yang juga menjadi korban pada masa 1965–berhimpun mendirikan organisasi tandingan bernama PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru). Winarso tak menampik, perpecahan antara YPKP dan PAKORBA ini pada akhirnya memicu ketersediaan dan munculnya banyak organisasi korban tragedi 1965 lainnya.

"Nah, dengan pecahnya organisasi itu semakin banyak organisasi korban '65 yang pecah," ungkap Winarso.

Melihat semakin terfragmentasinya organisasi korban tragedi 1965-1966, Winarso menyadari urgensi penyatuan. Pada tahun 1995, bersama Usman Hamid, seorang aktivis HAM, Winarso menginisiasi diskusi besar yang mengundang seluruh korban tragedi untuk merumuskan langkah perjuangan ber-

sama. Diskusi inilah yang kemudian melahirkan Sekretariat Bersama (Sekber) Korban '65 di Jakarta, sebuah wadah untuk mengkonsolidasikan organisasi dan merumuskan strategi advokasi. Namun, keretakan kembali terjadi dalam tubuh Sekber. Perpecahan yang tak terhindarkan ini mendorong Winarso untuk mengambil keputusan drastis, yakni kembali ke kampung halamannya di Solo pada tahun 2003.

Di Solo, dengan bara rasa iba yang tak padam, Winarso kembali bergiat mendirikan Sekber Korban '65 dalam skala lebih kecil pada tahun 2005, setelah kegagalan di Jakarta. Titik balik terjadi pada kongres tahun 2012, yang menghasilkan keputusan signifikan untuk menghilangkan kata "Korban" dari nama organisasi, sehingga menjadi Sekber '65. Langkah strategis ini bertujuan mewadahi tidak hanya para penyintas, tetapi juga masyarakat luas yang bersimpati, agar dapat terlibat langsung dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak korban tragedi 1965-1966. Kini, Sekber '65 yang diprakarsai Winarso di Solo telah menyebar di tujuh wilayah, mencakup Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar.

CITA-CITA WINARSO DALAM SEKBER'65.

" Penyelesaian? Kita tuntut pada negara," tegas Winarso.

Pembentukan Sekber '65 sendiri berangkat dari tiga pilar tujuan utama, yang melampaui sekadar advokasi. Bagi Winarso, cita-cita besarnya adalah memaksa negara untuk menuntaskan tanggung jawab sejarah, bukan hanya melalui pengakuan, tetapi juga melalui penyelesaian komprehensif dan pemenuhan hak-hak seluruh korban tragedi 1965-1966 secara adil dan bermartabat.

"Kalaulah sekarang ini, (perjuangan kami) lewat semacam hak-hak korban, dalam hal sosialnya, terutama soal kesehatan... minta supaya korban '65 ini diberikan (akses) kesehatan gratis ke rumah sakit," damba Winarso.

Tungku utama yang menyalakan semangat Winarso dalam mendirikan Sekber '65 adalah kekecewaannya terhadap kurangnya kepedulian negara terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia melihat hal ini sebagai masalah sistemik. Selain itu, Winarso meyakini adanya manipulasi sejarah yang dilakukan secara sengaja oleh negara, sebuah tindakan yang pada akhirnya menjadikan generasi muda saat ini sebagai korban-korban yang kehilangan kebenaran dan rentan terhadap narasi tunggal yang menyesatkan. Motivasi ganda inilah yang mendorongnya berjuang demi keadilan dan pemulihan ingatan kolektif.

"Nah ini, kasihan generasi muda kita yang selama ini selalu dicekoki dengan sejarah-sejarah yang kurang baik, dan tidak mencoba untuk diungkap secara benar," keluhnya.

Salah satu cita-cita mulia Sekber '65 yang dibawa Winarso adalah melaksanakan edukasi secara meluas kepada masyarakat mengenai fakta pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966. Melalui gerakan pencerahan ini, Winarso berharap tragedi kelam itu dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat luas. Tujuannya jelas: agar kejahatan kemanusiaan serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan, menegaskan pentingnya kebenaran sejarah sebagai benteng penjaga nurani bangsa.

WINARSO TENTANG PERJUANGAN HAM SAAT INI

"Jadi menurut saya, kalau ini tidak dimulai, kalau kita tidak berjalan, kalau kita tidak bangkit dan bergerak, kapan kita melawannya?" terang Winarso.

Di tengah perjuangan HAM yang tak pernah usai, Winarso mengaku gembira menyaksikan kemajuan kesadaran generasi muda, terutama para mahasiswa, yang kini menaruh perhatian besar pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menyadari potensi ini, melalui Sekber '65, Winarso membentuk forum khusus bagi mereka yang ingin terlibat aktif. Forum tersebut menjadi wadah bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan advokasi serta memberikan pelayanan langsung kepada para korban tragedi 1965-1966, memastikan perjuangan keadilan terus bersambung ke tangan generasi penerus.

"Jadi Sekber '65 ini punya kelompok bagi generasi muda namanya FGM: Forum Generasi Muda, kelompok rutin diskusi rutin soal ini, soal Hak Asasi Manusia." jelas Winarso.

Untuk menguatkan semangat juang, Winarso secara khusus menitipkan pesan kepada generasi muda agar terus lantang menyuarakan perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Pesan tersebut tidak hanya terbatas pada advokasi pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tetapi juga mencakup kasus-kasus kelam lainnya yang menimpa bangsa, seperti tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Winarso berharap kaum muda dapat menjadi garda terdepan yang konsisten mendesak penuntasan seluruh luka sejarah, memastikan keadilan ditegakkan bagi semua korban tanpa terkecuali.

"Untuk generasi muda, saya berharap muncullah, bangkitlah, bangkit lalu bergerak melawan ketidakadilan, itu pesan saya kepada generasi muda. Jangan terlalu asyik di kampus, jangan terlalu asyik di dalam dirinya sendiri, tetapi cobalah untuk melihat keluar," tutup Winarso dengan pesannya.

[Bhanu, Nafis]

Anakin Skywalker, Estetika, dan Api Kejatuhan

oleh Raden Ajeng Julian Christy Kusumo Purbonegoro, Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM

Ulang tahun ke-20 Star Wars: *Episode III - Revenge of the Sith* memicu gelombang nostalgia besar bagi para penggemarnya di berbagai media sosial, terutama Tiktok. Di antara potongan-potongan *For Your Page* (FYP) yang berseliweran, penulis justru lebih tertarik pada satu aktor yang pernah jadi bahan olok-olok *fanpage Star Wars*: Hayden Christensen. Dulunya, akting Christensen sebagai Anakin Skywalker dianggap kaku dan kurang menjiwai. Namun bagi penulis, justru akting yang kaku itu merepresentasikan kemunduran moral Anakin yang dramatis secara samar. Sayangnya, representasi pengembangan karakter yang dramatis ini tak banyak disadari oleh penonton pada umumnya.

Penulis tak bermaksud membela sang aktor pemeran Anakin yang *underrated* ini. Sebaliknya, tulisan ini menelusuri bagaimana ia memerankan sosok Anakin secara estetik. Teknik visualisasi, permainan simbol, dinamika ekspresi, hingga penataan sudut kamera menjalin kisah kejatuhan yang dalam dan perlahan bak kejatuhan iblis *Lucifer*.

Let us cook, bro!

Anakin dalam Bingkai Kamera, Cahaya, dan Warna

Transformasi Anakin dalam *Revenge of the Sith* dapat terlihat dari teknik visualisasi yang membentuk atmosfer emosional di sekelilingnya. Perubahan *color tone*, pencahayaan, hingga penataan sudut kamera menyusun balada kejatuhannya secara mendalam.

Pada permulaan film, dunia di sekitar Anakin masih diliputi oleh warna-warna hangat seperti emas, cokelat, dan biru langit yang memberi kesan stabil dan manusiawi. Namun seiring waktu, *color tone* ini bergeser. Dominasi warna merah, hitam, dan jingga mulai muncul, terlebih saat ia berada di Planet Mustafar. Planet ini diselimuti lava yang meletup-letup bagai neraka mendidih yang penuh amarah. Di Mustafar, tidak ada jalan keluar selain penderitaan. Planet ini adalah metafora untuk emosi Anakin yang selama ini terpendam.

Anakin sering digambarkan melalui pencahayaan yang kontras. Separuh wajahnya kerap disinari cahaya terang, sementara sisanya tertutup bayangan gelap. Cahaya alami sering muncul dari jendela atau matahari, sedangkan bayangan berasal dari arah sebaliknya. Anakin selalu berdiri di ambang; tidak benar-benar menyatu dengan terang maupun gelap. Hal ini merefleksikan dilema moral yang tengah ia alami.

Selain itu, komposisi dalam *frame* juga berperan. Anakin sering berada dalam posisi terpisah dari karakter lain. Sosok Anakin perlahan-lahan terlepas dari komunitas Jedi, dari orang-orang yang mencintainya, bahkan dari dirinya sendiri.

Salah satu penataan sudut kamera yang paling jitu

dalam film ini adalah saat Anakin memimpin pasukan klon menuju Jedi Temple dalam misi *Order 66*. Kamera menangkapnya dari sudut bawah *(low angle)* saat ia menaiki tangga. Tangga ini menyimbolkan kekuasaan. Sudut kamera yang memperlihatkan Anakin dari bawah menciptakan kesan dominasi dan kekuatan yang dingin. Anakin tampak sebagai pemimpin berkharisma yang agung namun tanpa belas kasih.

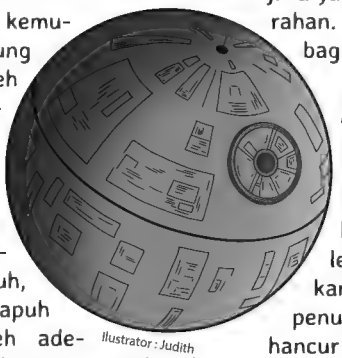

Ilustrator : Judith

Sesuatu yang kontras kemudian muncul pada penghujung film. Setelah dikalahkan oleh Obi-Wan, Anakin ditampilkan dalam posisi terbaring. Tubuhnya terbakar dan nyaris tak berbentuk. Kamera mengambil sudut atas *(high angle)* sehingga membuatnya tampak kecil, rapuh, dan tidak berdaya. Kesan rapuh ini semakin ditegaskan oleh adegan ketika tubuhnya dibawa ke ruang medis, direkonstruksi bukan lagi menjadi manusia, melainkan menjadi objek yang akan diubah menjadi mesin.

Momen saat topeng Darth Vader dipasang pun mengandung maksud tersirat. Kamera berpindah ke sudut pandang Anakin, seolah mengajak penonton memposisikan diri sebagai makhluk lemah yang hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Sudut pandang ini mengundang empati sekaligus rasa kehilangan. Sang *Chosen One* sudah tiada bersama harapannya.

Penampilan sebagai Cermin Batin

Penampilan bisa menjadi refleksi nilai moral dalam *Revenge of the Sith*. Setiap perubahan visual yang melekat pada Anakin—dari warna sekelilingnya, luka di tubuh, hingga perubahan sorot matanya—selalu berhubungan dengan pergolakan batin yang ia alami. Dunia visual di sekitarnya ikut berganti wajah seolah beresonansi dengan setiap langkah impulsif yang ia ambil.

Jubah Anakin sejak awal film berbeda dengan anggota Jedi lainnya. Saat Obi-Wan dan Jedi lain memakai warna-warna terang yang melambangkan keterbukaan dan cahaya, Anakin justru mengenakan jubah coklat gelap. Warna gelap ini sudah memberi tanda bahwa ia berada di persimpangan jalan sejak awal. Jubah tersebut juga melambangkan konflik batin dan beban emosi yang sudah ia bawa bahkan sebelum kejatuhannya.

Transformasi Anakin mencapai puncaknya ketika ia terluka di Mustafar. Tubuh yang dahulu utuh dan indah, kini berubah menjadi bangkai yang hangus terbakar. Luka bakar di sekujur raganya bukan sekadar derita fisik, melainkan lambang dari kehancuran sisi manusia dalam dirinya. Sosok yang pernah dipandang tampan, kuat, dan penuh harapan menjelma menjadi tubuh remuk yang hanya bisa bertahan berkat teknologi. Inilah tragedi malaikat yang jatuh dalam wujud visual. Seperti *Lucifer* dalam mitologi biblikal, Anakin pun kehilangan keindahannya yang kemudian digantikan oleh armor hitam, napas mekanis, dan identitas yang asing bahkan bagi dirinya sendiri.

Perubahan juga tampak pada mata Anakin. "Mata adalah jendela jiwa" menjadi metafora paling tepat untuk menyingkap kontras dirinya sebelum dan sesudah terjerat kegelapan. Sorot matanya yang dulu jernih perlahan digantikan warna kuning menyala dan tatapan yang menusuk. Ciri khas *Sith* ini menandakan jiwa yang sepenuhnya dikuasai kebencian dan kemarahan. Dari sorot matanya kita tahu, jalan pulang bagi Anakin hampir mustahil terbuka kembali.

Bukan hanya Anakin, Padmé, belahan jiwa Anakin, juga mengalami transformasi visual. Pada awal film, penampilannya megah. Kostumnya elegan dan penuh detail khas bangsawan Naboo. Namun, seiring dengan keretakan hubungan mereka, busana Padmé menjadi lebih sederhana dan sendu. Gaun yang ia kenakan saat kematiannya terlihat lembut, polos, dan penuh duka. Gaunnya adalah cerminan hatinya yang hancur tak karuan. Ia remuk seperti Anakin, tetapi dengan alasan yang berbeda. Anakin terperosok oleh obsesinya menyelamatkan Padmé, sedangkan Padmé hancur oleh penolakannya terhadap penyelamatan itu demi nilai-nilai yang ia pegang teguh.

Pedang Cahaya: Cermin Jiwa yang Retak

Ada makna tersembunyi dari latar tempat dan benda dalam *Revenge of the Sith*. Latar-latar itu seperti membisikkan tanda-tanda kehancuran yang akan dialami oleh Anakin. Boleh dikatakan bahwa mereka adalah perpanjangan dari konflik batin dan perubahan identitas sang tokoh ironis ini.

Mustafar, planet vulkanik dengan sungai lava yang membara, menjadi simbol utama dari amarah mendalam Anakin. Tempat ini tidak hanya panas secara fisik, tetapi juga emosional. Di sinilah amarah Anakin memuncak, cinta dan pengkhianatan bertabrakan, dan akhirnya tubuh serta identitasnya terbakar. Seperti *Lucifer* dalam mitologi yang jatuh dari surga ke neraka, Anakin jatuh dari status *Chosen One* ke dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri.

Pertarungan antara Anakin dan Obi-Wan di Mustafar berlangsung di tengah semburan api dan tebing curam. Pertarungan ini menggambarkan betapa tipis batas antara kebajikan dan kehancuran. Ketika Anakin akhirnya tumbang, tubuhnya meluncur ke pinggir sungai lava, terbakar, dan ditinggalkan sendirian oleh mantan gurunya itu. Tubuh itu tergantung di ambang mengerikan antara hidup dan mati, antara masa lalu dan masa depan.

Kontras dengan latar Mustafar itu, terdapat ruang medis di kapal Palpatine yang dingin dan sunyi. Di sinilah Anakin *dilahirkan kembali* sebagai Darth Vader. Meja operasi tempat tubuhnya dirakit menyerupai altar. Pengaturan latar tempat ini menciptakan suasana ritual yang menyeramkan. Tidak ada keluarga, tidak ada doa, hanya ada mesin dan energi *Sith* yang membentuk wujud barunya. Proses ini seperti kelahiran kembali yang mengerikan sebab seorang monster akan tercipta.

Lightsaber menjadi simbol paling gamblang dari krisis identitas Anakin. Selama menjadi Jedi, ia menggunakan *lightsaber* biru yang menyimbolkan harapan dan kepercayaan. Namun dalam suatu adegan krusial, ketika Anakin akan membunuh Count Dooku, ia memegang *lightsaber* miliknya dan musuhnya. Dua *lightsaber* berwarna biru dan merah yang ia pegang menggambarkan keraguan terhadap keputusan yang akan diambil. Ia sempat ragu. Namun atas desakan Palpatine, ia sukses menebas kepala Dooku. Dengan demikian, ia secara simbolis juga menebas batas antara dirinya sebagai Jedi dan masa depannya sebagai *Sith Lord.*

Peralihan dari *lightsaber* biru ke merah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan penuh pergolakan batin, keretakan identitas, dan tercemarnya jiwa murni Anakin. Dua *lightsaber* itu mewakili dua jalan yang ia pegang sekaligus. Pada akhirnya, ia justru memilih jalan yang membuatnya kehilangan segalanya

Anakin dan Gestur yang Tak Terucap

Jika dialog dan alur memberi kita garis besar kisah, ekspresi dan gerak tubuh Anakin menunjukkan pesan yang tak terucap. Tubuh Anakin dalam *Revenge of the Sith* menyampaikan lebih banyak makna daripada ucapannya. Geraknya yang kaku, tegang, dan sesekali membeku menjadi panggung tempat konflik batinnya dipentaskan secara diam-diam.

Tatapan kosong Anakin sering muncul pada momen-momen kritis seperti saat ia berdiri di ruang sidang Jedi atau saat ia merenung di balkon apartemen. Mata yang tidak fokus dan rahang yang mengeras adalah ekspresi keputusasaan. Ia utuh secara fisik, tetapi jiwanya perlahan terurai. Napasnya panjang dan berat seolah tertahan mewakili tekanan dan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia menjadi lelaki yang tenggelam dalam konflik batinnya sendiri tanpa tahu jalan keluar.

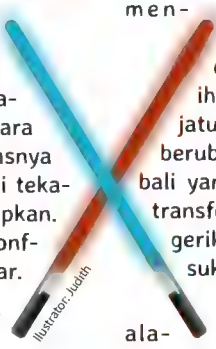

Perubahan suara Anakin juga mencolok. Pada beberapa bagian, nada suaranya terdengar datar, mekanis, dan hampir tanpa emosi layaknya robot. Kekakuan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan akting sang aktor, padahal kekakuan itu justru menjadi bagian dari desain karakter. Anakin tidak sedang menyampaikan emosi, tetapi sedang menekan semuanya hingga pada akhirnya yang tersisa hanya rasa kelu. Dengan demikian, cara berekspresi Hayden Christensen sebenarnya justru memperkuat narasi emosional karakter Anakin.

Ada juga momen saat Anakin menangis dalam diam. Tidak ada kata-kata, tidak ada ledakan emosi. Hanya satu air mata yang jatuh ketika ia berdiri sendirian di ruang gelap sambil menatap Coruscant dari dalam apartemen. Tangisan ini adalah campuran dari rasa penyesalan dan kesadaran bahwa ia tidak bisa kembali. Adegan ini cukup menyentuh hati karena menyiratkan bahwa ia tahu dirinya sedang jatuh, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya.

Dalam pertempuran di Mustafar, bahasa tubuh Anakin ditampilkan dengan cara yang paling jelas. Gerakannya cepat, agresif, liar, dan semakin brutal. Tidak ada lagi ketenangan khas Jedi seperti saat bertarung dengan Count Dooku dalam koreografinya. Hal yang tersisa adalah dorongan emosi negatif tanpa kendali, yaitu rasa takut dan kemarahan. Setiap tebasan *lightsaber* terasa seperti pembuktian diri, meskipun pada akhirnya sia-sia.

Konflik ini mencapai klimaks saat Anakin mencekik Padmé. Gerakannya cepat dan tiba-tiba. Ia tidak berpikir, hanya berbalut emosi. Setelah ia menjadi Darth Vader seutuhnya, ia masih sempat bertanya apakah Padmé baik-baik saja. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup *konyol* sebab menunjukkan ketidakpastian yang ada dalam dirinya. Tujuan awalnya untuk beralih ke sisi gelap adalah demi menyelamatkan Padmé, tetapi tindak tanduknya yang serba obsesif itu justru membuat ia kehilangan Padmé selamanya.

Peran Sinematografi dalam Narasi Kejatuhan

Revenge of the Sith adalah kisah tentang konflik galaksi yang membuka tabir tragedi tentang kegagalan seseorang untuk mengalahkan dirinya sendiri. Anakin Skywalker adalah seseorang yang terjebak di antara ketakutan akan kehilangan dan ambisi untuk mengendalikan takdir.

Melalui nada warna yang menggelap, bayangan yang menelan wajahnya, sudut kamera yang memperkecil tubuhnya, hingga suaranya yang mendatar, film ini merancang kejatuhan Anakin dengan detail yang tidak selalu disadari. Namun, pengamatan yang lebih menyeluruh dapat menyingkap drama kejatuhan itu. Tubuh yang terbakar, mata yang berubah warna, hingga ruang kelahiran kembali yang sunyi dan dingin menjadi simbol bahwa transformasi Anakin menyakitkan sekaligus mengerikan. Hal ini menjadikan para penggemar sukses dibuat prihatin dengan kejatuhannya.

Kisah Anakin adalah pengingat bahwa alasan kegagalan seseorang sering kali berdasarkan akumulasi dari luka-luka kecil yang terus terpupuk dan tak pernah sembuh. Karena hal itulah kita sebagai penggemar bisa merasa dekat dengannya secara emosional. Dalam diri Anakin, kita mengenali sisi manusia yang takut kehilangan, yang ingin dikasihi, yang marah karena tidak dipercaya, dan yang masih menyisakan sebutir harapan kecil di saat-saat terakhir.

Selain memanjakan mata, teknik sinematografi dalam film ini menjadi cara film berbicara kepada kita tanpa suara. Lewat cahaya, warna, gerak, dan ruang, *Revenge of the Sith* memperlihatkan bahwa keruntuhan moral pun bisa dikisahkan melalui grafik estetis, latar dramatis, properti simbolis, dan akting puitis.

Tersurat untuk para kru, George Lucas, dan Hayden Christensen selaku pemeran Anakin Skywalker, *gracias!*

Fotografer: Iqbal

Kebaya, Rumah Aman Memeluk Kemanusiaan Tanpa Sekat

"Sejak awal saya selalu berusaha memberikan tempat untuk siapa pun, bukan hanya untuk transpuan. Dari situ saya belajar peduli dan berusaha merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan," ujar Vinolia Wakijo atau kerap disapa Mami Vinolia.

Di tengah hiruk-pikuk Kota Yogyakarta, berdiri sebuah komunitas yang mengajarkan bahwa kemanusiaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Itulah Kebaya, singkatan dari Komunitas Besar Waria Yogyakarta. Didirikan oleh Vinolia pada 18 Desember 2006, komunitas ini hadir sebagai "ruang aman" bagi transpuan dan orang dengan HIV (ODHA) untuk saling menguatkan.

Jauh Sebelum Semua Ini Ada

Ruli Malay atau kerap disapa Mami Ruli, selaku Program Manager Komunitas Kebaya, menuturkan bahwa inisiasi pengorganisasian ini berawal dari kepedulian Vinolia. Sejak tahun 1990-an, Ia aktif menjadi relawan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). "Saat itu, Mami Vinolia mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan melihat langsung bagaimana teman-teman transpuan dan orang dengan HIV sangat rentan terhadap stigma," ungkap Ruli.

Vinolia lahir sebagai satu-satunya transpuan dari enam bersaudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mengakui bahwa masa mudanya tidaklah mudah. "Saya tidak beruntung di pendidikan dan hanya lulus SMP saja, kemudian kabur dari rumah," singkapnya. Vinolia pun melanjutkan hidupnya hingga sempat merantau sampai ke Riau. Ketika kembali ke Yogyakarta, beliau harus bertahan hidup di kawasan Malioboro sebagai pekerja seks.

Namun, titik balik terjadi saat kasus HIV mulai merebak di Indonesia. Hal ini mendorong Vinolia untuk mencari informasi lebih jauh tentang penyakit tersebut. Ia kemudian menemukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PKBI. Di sanalah, beliau terlibat dalam proyek krusial bernama Lentera, yang berfokus pada penanganan HIV/AIDS. "Kegiatannya adalah turun lapangan dengan sasarannya yaitu pekerja seks, transpuan, homoseksual, pengguna jarum suntik, kemudian anak jalanan," tutur Vinolia.

Pengalamannya sendiri menjadi tonggak penting dalam keputusannya untuk berjuang di isu HIV/AIDS. "Saya memutuskan menjadi relawan di Lentera sampai 2005 karena di tahun tersebut prevalensi HIV di teman-teman transpuan cukup tinggi," ucapnya. Vinolia pun menuturkan bahwa tingginya kasus ini dipicu oleh terbatasnya pilihan mata pencaharian lain, yang membuat banyak transpuan terpaksa bekerja sebagai pekerja seks. Ironisnya, sebagian besar dari mereka belum memahami pentingnya penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Alhasil, kondisi ini membawa pada berita duka, terdapat tujuh transpuan yang meninggal karena HIV pada September 2005.

Setelah periode yang intens sebagai relawan, Vinolia pun mengambil keputusan sulit untuk mengundurkan diri dari PKBI, dan berbekal pengalamannya ia mengambil fokus penuh pada pendampingan serta pengobatan komunitas transpuan yang terpapar HIV. "Dari 7 yang meninggal itu masih 12 yang masih dalam pengobatan, pada saat itu saya yang harus mengurusnya," paparnya. Lebih dari sekadar penanganan medis, Vinolia pun berperan dalam memberikan semangat dan motivasi bahwa HIV bukanlah akhir dari segalanya.

Aksi-aksi dermawan Vinolia dalam pendampingan korban HIV/AIDS, ternyata tak luput dari perhatian media, hingga mencuri perhatian UNAIDS (program gabungan PBB untuk HIV). Menyaksikan perjuangan Vinolia, seorang dokter perwakilan UNAIDS mendorong beliau untuk mendirikan lembaga formal, dengan menyatakan: *"Mami itu sudah melakukan apa yang belum dilakukan orang-orang LSM."* Didorong oleh pengakuan dan kepeduliannya yang mendalam terhadap teman-teman transpuan dan ODHA, Vinolia bersama lima transpuan terpercaya dari PKBI kemudian mengikuti pelatihan capacity building yang didukung UNAIDS di Jakarta. Dalam pelatihan tersebut, mereka memutuskan nama organisasi: Komunitas Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta). Berkat dukungan dana dari UNAIDS dan koneksi Vinolia, Komunitas Kebaya secara resmi berdiri pada 18 Desember 2006, lengkap dengan kantor sekretariat di Gowongan, Yogyakarta, yang juga berfungsi sebagai *shelter* atau rumah aman.

Setelah Kelahiranya

Komunitas Kebaya pun tumbuh dengan ditopang oleh program yang bervariasi dan sesuai dengan visi misi mereka. Program inti dari komunitas ini adalah program pendampingan kesehatan bagi orang-orang yang ditampung di *shelter* baik secara medis maupun psikologis. *Shelter* yang dimiliki pun bersifat inklusif, tidak hanya untuk transpuan tapi juga untuk siapa pun yang terpapar HIV, hingga seseorang yang ditolak oleh keluarganya kembali. "Kami rawat di kantor agar mempermudah memberikan layanan terbaik," jelas Vinolia.

Komunitas Kebaya juga memiliki program edukasi terkait HIV/AIDS dengan harapan pencegahan HIV serta pengurangan risikonya. Kini, program ini mencapai puncaknya dengan modul terbaru, *Smart-Transchool,* yang berupaya memberikan pendidikan inklusi bagi transpuan, ODHA, dan kelompok disabilitas. Komunitas Kebaya juga memiliki program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi transpuan yang kehilangan pekerjaan, diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pameran UMKM, serta kegiatan seni dan budaya menjual karya, sebagaimana dituturkan Ruli. Selain itu, Kebaya juga memiliki program di bidang advokasi yang secara aktif melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial guna memperjuangkan hak-hak transpuan dan ODHA.

Perjalanan Komunitas Kebaya selalu diwarnai dengan dukungan pihak eksternal yang sangat penting bagi operasional dan programnya. Sejak awal, UNAIDS memberikan dukungan dana sebesar Rp110 juta selama satu tahun (2006-2007). Meskipun dukungan itu terhenti, pendanaan yang sulit tidak membuat komunitas ini bubar. "Biasanya orang kalau punya organisasi, kalau sudah *nggak* punya duit bisa jadi bubar, nah ini *nggak*," bangga Vinolia. Berselang setahun dari pemberhentian pendanaan, keuangan Komunitas Kebaya terselamatkan berkat dukungan dari HIVOS, lembaga donor asal Belanda. Dalam pendanaan ini, Komunitas Kebaya hampir menerima Rp200 juta untuk program pemberdayaan selama sembilan bulan.

Seiring waktu, Komunitas Kebaya memperluas jaringannya. Pada tahun 2012, Komunitas Kebaya melakukan kerja sama dengan *Global Fund* R4 untuk program pencegahan HIV. Lalu, pada tahun 2024 hingga kini, Komunitas Kebaya melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sentra Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyediaan makanan dan tempat tinggal. Publikasi yang gencar dari berbagai media membuat Komunitas Kebaya menarik perhatian lembaga internasional, termasuk *ViiV Healthcare* dari Inggris (2018-2020) yang fokus pada program pemberdayaan ekonomi transpuan. Bahkan, di masa pandemi Covid-19, Bröt für die Welt (BfdW) dari Jerman, turut berpartisipasi dalam program ketahanan pangan dan advokasi sosial. Semua dukungan ini, sebagaimana diungkapkan Vinolia, "Dukungan ini didasarkan pada kemanusiaan, membuktikan bahwa perjuangan komunitas transpuan dan ODHA diakui tanpa memandang isu gender."

Dampak Komunitas Kebaya bagi ODHA dan transpuan sangatlah signifikan, terbukti dengan mereka, "Kami sudah merawat 396 Orang dengan HIV dari seluruh Indonesia," bongkar Vinolia. Komunitas Kebaya telah menjadi kehidupan, menyelamatkan banyak jiwa dari keterbatasan mengenai pencegahan HIV, Komunitas Kebaya juga giat mengedukasi transpuan untuk menerima identitas gender mereka, didasari filosofi bahwa menjadi transpuan bukanlah pilihan, melainkan sesuatu yang terjadi. Melalui pemahaman ini, Vinolia menekankan bahwa perjuangan mereka memiliki kisah yang mendalam dan patut dihargai.

Meskipun memberikan dampak positif, keberadaan *shelter* Komunitas Kebaya pada awalnya disambut penolakan masyarakat sekitar, yang didasari pras-

angka buruk dan kekhawatiran membawa penyakit. "Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap Komunitas Kebaya," ungkap Vinolia dengan nada sedih. Namun, komunitas ini tidak berkecil hati, mereka berinisiatif membuka diri melalui kegiatan sosialisasi, seperti *open house* saat Lebaran dan pelaksanaan bakti sosial. Upaya gigih ini pada akhirnya, berhasil menggeser stigma negatif, mengubah penolakan masyarakat menjadi penerimaan, dan menjadikan Komunitas Kebaya bagian integral dari lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan program sosial, komunitas Kebaya menghapus stigma bahwa transpuan adalah penyimpangan, serta menegaskan bahwa semua gender memiliki martabat dan hak yang setara. Perjalanan Komunitas Kebaya merupakan suatu kisah inspiratif mengenai identitas diri dan kemanusiaan. Merintis suatu organisasi minoritas yang sering kali menerima penolakan dan dianggap tabu oleh masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi Komunitas Kebaya membuktikan bahwa mereka bisa berjuang dan bertahan sampai pada hari ini.

Komunitas Kebaya menjadi simbol harapan bagi minoritas yang tertindas, mengulurkan tangan untuk mereka yang diasingkan, dan memerlukan rumah yang hangat, serta aman untuk terus menjalani hidup. Dibutuhkan keberanian, kedisiplinan, empati, dan daya juang yang luar biasa bukan hanya untuk mempertahankan identitas diri, tetapi juga untuk merasa bangga akan hal itu. Komunitas Kebaya menyadarkan kita semua untuk selalu berpihak kepada kemanusiaan terlepas dari apapun latar belakangnya.

[Feli, Inggrid]

Sorot Isu Pijar

BPMF Pijar mengajak pembaca, terkhusus mahasiswa Filsafat dan Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk menyampaikan kegelisahan atau kisah-kisah menarik yang sekiranya perlu diangkat oleh Pijar melalui:

bpmf.pijar@gmail.com
dengan subjek SOROT ISU_NAMA

KONTRIBUSI

Rubrik yang Bisa Dikirimkan:

OPINI (5000-7500 Karakter)
RESENSI FILM/BUKU (3000-5000 Karakter)
ESAI FOTO (Min. 5 Foto, 2000-3000 Karakter)

Naskah dikirimkan ke:
bpmf.pijar@gmail.com
Dengan Subjek
KONTRIBUSI_NAMA_NAMA RUBRIK

"Nil Mengalir di Matamu"

Waktu yang tenggelam
ketika musa menembus sahara,
adalah harapan-harapan terus mengalir
walau langkahnya yang tandus.

Gemerlap,
bisikan angin gurun,
malam yang menelan, dan jejak-jejak—dicatatnya dalam air mata yang ia hujani ke diri sendiri.

Musa menuju tanah yang dijanjikan.

Doa-doa melampau sihir, mengiringi langkah yang ditelan pasir.

Ku ulangi sekali lagi,
musa menuju utopis.
Dengan segala kebangkangan,
tanah menjelma angan-angan.

Tanah yang dijanjikan adalah hamparan luas di hatimu.
Apa yang kau tanam adalah ladang yang kau cipta.

Nil, teruslah ia mengalir membasuh sejarah.
Biarlah tongkatnya terus memecah nihil di taman bunga.
Lalu sampailah senja pada pangkuan cahaya.

Karya: Biru

"Amin yang Menggugat"

Semoga anakmu,
Tak pernah bersinggungan dengan luka
Yang tumbuh sunyi di sela-sela jiwa
Lalu direnggut paksa haknya
Oleh keadilan yang lebih memilih diam.
Semoga mereka tak perlu belajar menjadi utuh dari
Pecahan yang bahkan tidak diakui patah
Ucapkan amin, secepat senyap
Sekeras batinmu yang tak pernah benar-benar berani menggugat
Ucapkan amin dengan seluruh gentar
Yang kau sembunyikan di balik selimut kuasa,
Dengan bayang-bayang ketakutan
Yang diam-diam menua dalam suaramu
Ucapkan amin demi nama-nama yang kau kilapkan jabatannya dengan liur penuh takzim
Namun bila aminmu hanya sehembus angin
Dan langit memilih tak menjawab
Maka biarlah bumi yang menulis jawabannya
Anggap saja semesta masih memberimu waktu untuk merasa
Malu
Semoga kau jatuh perlahan
Karena bumi akhirnya bosan menopangmu
Perlahan, seperti luka yang tidak kau akui
Kini menapak kembali dalam rupa yang menyerupai darahmu sendiri
Ku ucapkan amin dengan panadol dan seteguk nescafe

Karya: Narwadan

"Diambang Cinta"

Maaf, aku jatuh suka
Entah akan menjadi suka atau duka
Kepingan dua daun kering terasa hampa
Semoga dengan ini aku dapat bertapa

Mengukir cerita dalam lembaran kosong
Bepergian, melewati jalan bergelombang
Mimpi membawaku ke lorong
Tempat asa dan ragu saling berpegang

Lahir dari luka yang terjaga
Ke mana arah langkah ini berlabuh
Memakan seluruh jiwa dan raga
Namun hati berdiri teguh

Singgasana di ragu
Dibuat merona aku olehnya
Menunggu waktu yang pilu
Semoga terlintas di benaknya

Karya: Marcha Lorraine

$\nvdash A \vee \neg A$
INTUISIONISTIK ID

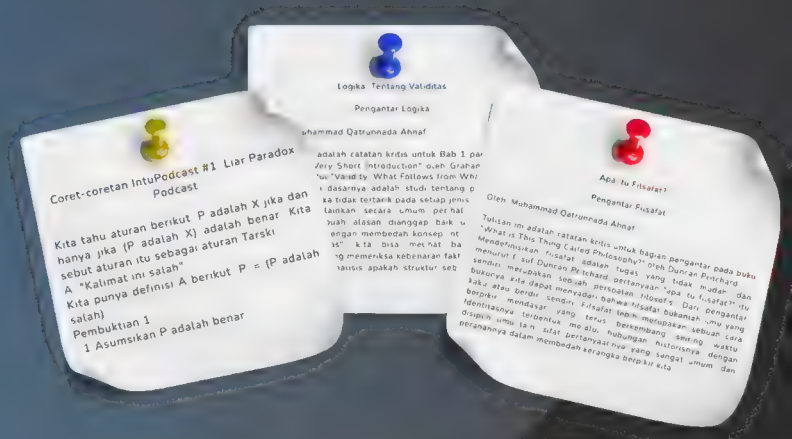

INTUISIONISTIK ID: WADAH LOGIKA DAN FILSAFAT ANALITIK

Indonesia membutuhkan iklim filsafat yang ketat dan berkualitas untuk menjalankan amanat pencerdasan kehidupan bangsa. Akses terhadap pendidikan filsafat yang bernilai akademis, sayangnya, sering kali terbatas dan tidak merata. Intuisionistik ID hadir sebagai inisiatif komunitas untuk mengatasi disparitas ini, kami membawa disiplin ilmu yang ketat ke ruang publik.

Intuisionistik ID adalah wadah belajar mandiri yang berfokus menyebarkan filsafat bernilai akademis, khususnya filsafat analitik dan logika. Kami meyakini bahwa filsafat, terutama filsafat analitik, adalah bekal esensial untuk kemampuan berpikir dan berabstraksi. Logika, pada gilirannya, memastikan nalar yang lurus untuk mencapai putusan yang masuk akal secara ketat. Misi utama Intuisionistik ID adalah menjadikan pendidikan filsafat yang tepat, adil, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kami menjembatani jurang antara topik akademik filsafat analitik dan logika formal dengan rasa penasaran khalayak umum. Ini dilakukan melalui konten online dan sesi diskusi yang menarik.

Kegiatan rutin kami mencakup kelas online terstruktur dan diskusi mingguan yang mendalam. Fokus utama sesi ini adalah filsafat, logika, dan topik-topik interdisipliner terkait. Semua materi disajikan dengan kerangka berpikir yang ketat, menjaga kualitas akademis tetap menjadi prioritas utama.

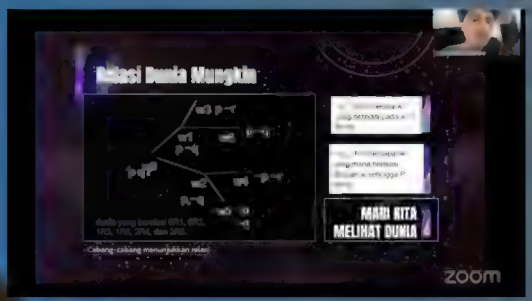

Kami juga menyediakan catatan yang mudah dipahami bagi para pemula dan secara teratur merilis artikel serta esai analitik mingguan. Konten ini dapat diakses melalui halaman dukungan khusus kami di Trakteer. Selain itu, kanal YouTube kami berfungsi sebagai wadah untuk podcast dan rekaman kelas, serta ke depannya akan memproduksi esai video pendek. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kami menggunakan platform modern dan format penyampaian yang santai, bahkan termasuk meme kontekstual. Strategi ini membuktikan bahwa filsafat analitik dan logika yang dianggap 'berat' tetap bisa diakses tanpa mengurangi kualitas substansialnya. Kami juga aktif berkolaborasi dengan organisasi lain untuk memperkuat ekosistem diskusi filsafat di Indonesia.

Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, kami menggunakan platform modern dan format penyampaian yang santai, bahkan termasuk meme kontekstual. Strategi ini membuktikan bahwa filsafat analitik dan logika yang dianggap 'berat' tetap bisa diakses tanpa mengurangi kualitas substansialnya. Kami juga aktif berkolaborasi dengan organisasi lain untuk memperkuat ekosistem diskusi filsafat di Indonesia.

Dukungan kalian sangat penting untuk memastikan keberlanjutan misi ini, terutama dalam upaya memperluas jangkauan dan memproduksi format konten baru seperti podcast dan esai video. Kami mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini.

Ikuti perjalanan kami melalui media sosial untuk menikmati konten kami dan berpartisipasi dalam diskusi langsung. Dukung misi kami dan dapatkan akses eksklusif ke esai mingguan melalui halaman Trakteer kami!

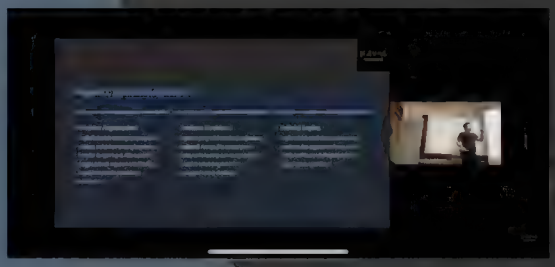

TESTIMONI SOBAT INTUISIONIS:

Aldo Fernando:

Saya banyak belajar soal pengantar logika dan filsafat analitik melalui kelas online dan tulisan2 Intusionistik ID di Trakteer. Penyampaian dan penulisan Bro Ahnaf dkk relatif mudah diikuti dan dipahami dan memberikan sejumlah insight penting buat awam seperti saya. Maju terus Intusionistik ID! Hehe

Akbar Rafsanjani:

Intuisionistik ID adalah "rumah" bagi saya yang belajar filsafat secara otodidak. Menyediakan diskusi WhatsApp, bahan bacaan di Trakteer, dan baca buku bersama tiap pekan. Meski berbeda zona waktu 12 jam dengan AS, rekaman diskusi tetap tersedia. Komunitas ini membangun critical thinking dengan pendekatan filsafat analitik yang mengutamakan pembuktian dan kebenaran.

R. Syafaat Rachman S.Pd. :

Intuisionistik ID pokoknya keren banget..
Dengan beberapa kelas yg pernah/sedang saya ikuti beserta artikel-artikelnya, saya jadi mudah mengerti tentang dunia filsafat..
Semoga makin keren untuk kedepannya....

SCAN HERE.

TEER.ID/INTUISIONISTIK | X.COM/INTUISIONISTIK | INSTAGRAM.COM/INTUISIONISTIK

KANVAS

"Menjalar Sukar" - Syefa

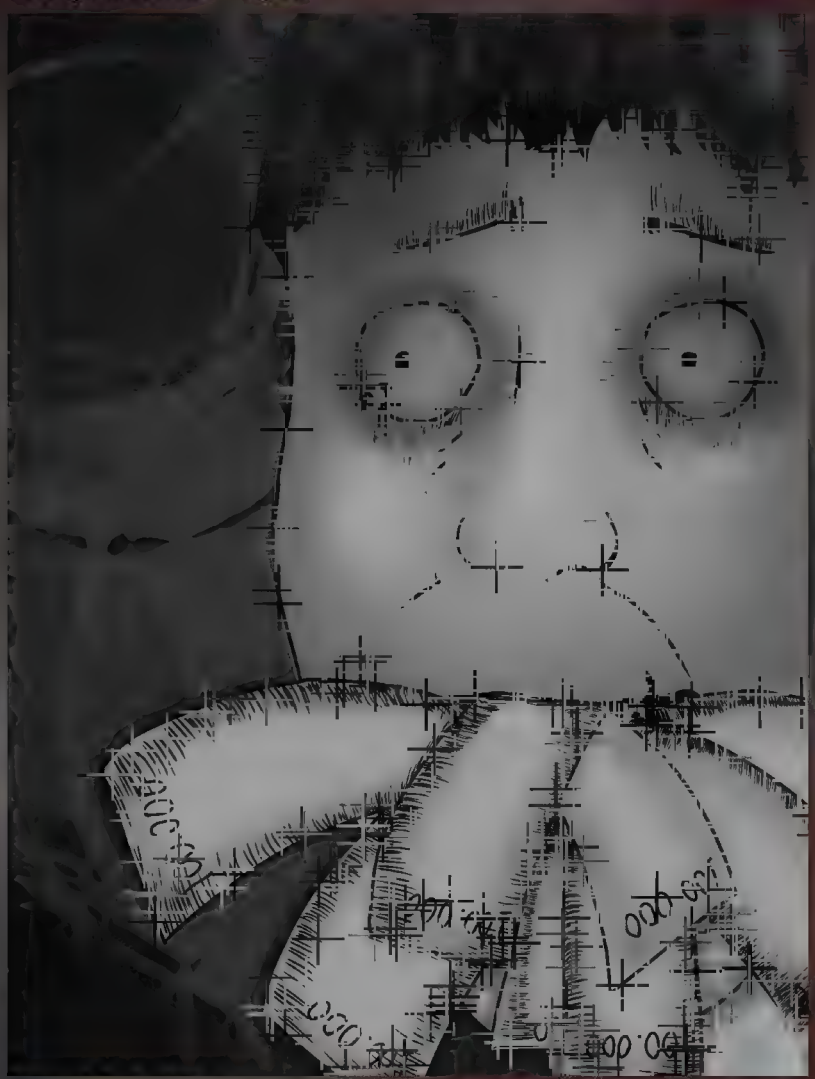

"Luruh" - Judith

Simbah, Katib, dan Kitab

oleh Dhimas Yudha Prasetya

Ilustrator : Fradipta

Dulu aku masih ingat betul apa yang dia katakan. Sambil menyalakan kretek *klobot* itu—baunya harum, aku rasa ada kemenyan di dalamnya—, helaan nafasnya berat, sedikit batuk juga. "Aku tidak mau bicara banyak, tetapi ketika kau sudah sampai di *pondok*, jadilah santri yang baik. Mengaji, doakan simbahmu ini. Biar kalau mati, matinya tenang". Bohong kalau dia tidak bicara banyak. Tiga belas puntung *klobot* jadi bukti kalau bicaranya *ngalor-ngidul*; seperti *sepur*, bedanya dia bisa lelah dan berhenti kapan saja tanpa perlu bergantung pada stasiun.

Sayangnya, hanya itu yang aku ingat. Selebihnya sudah aku lupakan. Mungkin karena waktu itu aku tidak menganggapnya penting dan akan berbeda jika aku tahu itu adalah obrolan terakhir kami. Mungkin aku akan sodorkan buku dan pena padanya. Aku yakin, tulisannya itu akan bisa jadi kitab suci baru.

Tapi ya sudah *lah*, aku sudah cukup ikhlas dengan kepergian simbah. Toh, beliau juga sudah tua; masa-masa rentan untuk *digembol* Izrail.

Entah kenapa tetiba saja aku ingat kata-kata itu. Kalau dibilang rindu bercakap dengan simbah, tidak juga. Tapi memang, beberapa hari ini tidak mudah. Kalau boleh digambarkan seperti *lincak* yang digunakan Diogenes untuk berjemur dibawah sinar matahari—konyol, Diogenes saja lumpen, mana mungkin dia punya *lincak* yang bisa ia tiduri. Bukan apa-apa, tapi jujur, beberapa hari kebelakang susah untuk digambarkan dengan apapun. Mungkin aku persingkat saja: ANJING!!!

Dua bulan ini aku sudah rutin menenggak alkohol—dulu, memegang botolnya saja sudah berdosa rasanya. Alasanya? Aku juga tidak tahu. Rasanya nikmat saja ketika rongga-rongga kerongkongan itu dilewati hangatnya alkohol. Apalagi jika sudah mencapai klimaksnya, aku tidak yakin bisa merapalkan *Al-Fatihah* dengan benar.

Aku rasa sudah cukup kata pengantarnya. Sudah lima semester aku menjalani hidup sebagai seorang mahasiswa. Waktu yang cukup untuk merubah kepolosan yang aku bawa dari pesantren. Bagaimana tidak? Dunia yang sama sekali berbeda warnanya, yang sebelumnya aku cap sebagai dunianya orang kafir, tiba-tiba tercerap ke panca indraku. Jijik sekali rasanya jika aku harus mengatakannya. Tapi akan aku katakan. Sekarang aku telah menerima dunia itu.

***

Semalam, aku sedikit melepas suntuk dengan berjalan mengelilingi taman kampus—setidaknya aku tidak minum malam ini, baguslah. Cukup lama aku berkeliling hingga aku melihat kursi kosong dan memutuskan untuk duduk disitu. Rasanya masih hangat, aku kira ada sepasang kekasih yang sebelumnya duduk disini; gelandangan yang tidur tengkurap; kucing liar; orang yang sedang suntuk juga mungkin.

Sembari menyalakan rokok, aku mencoba mengingat kembali apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Dua hari kemarin aku baru saja membuat bonyok seorang mahasiswa fakultas tetangga. Bukan tanpa alasan aku memberinya sedikit pelajaran. Perangainya yang berlagak seperti preman jalanan—pun preman intelektual juga—, membuatku sedikit kesal. Ditambah dia secara terang-terangan mengatakan bahwa presiden yang sekarang adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki negara ini—aku hanya berharap Tuhan mengampuni dosa-dosanya karena telah berkata demikian. Jujur saja, itu sangat menyenangkan.

Akan tetapi aku juga sedikit merasa bersalah. Membuat orang lain bonyok untuk melepas stres cukup aneh memang. Mau bagaimana lagi? Toh sudah terjadi. Aku tidak yakin, tapi kalian mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuatku cukup terlihat frustasi sehingga membuat bonyok seseorang?

Benar juga, sedari tadi aku hanya mengeluh tanpa memberitahu apa masalahku. Dan jawabanya, *yaa*, aku tidak tahu apa masalahku. Tapi omong-omong, sebelum aku membuat bonyok seseorang dua hari yang lalu, sehari sebelumnya aku menyatakan perasaanku pada seorang mahasiswi di fakultasku. Bodoh agaknya. Tapi daripada aku mati penasaran, aku rasa mengungkapkanya adalah pilihan paling gampang untuk dilakukan. Ya, pada akhirnya aku sangat lega dengan keputusanku. *Konyol* saja rasanya jika aku mengingat momen itu. Belum pernah aku melakukan hal yang demikian. Dulu, menatap wajah seorang wanita saja seakan sebuah zina yang aku rasa tidak akan bisa diampuni dosanya. Lagi-lagi, aku melakukan hal yang ku anggap tabu beberapa tahun yang lalu.

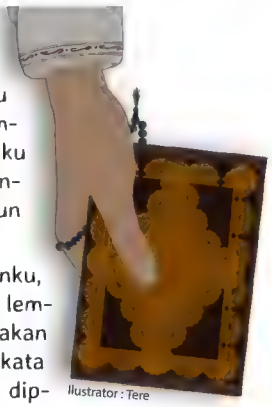

Ilustrator : Tere

Ditengah perenunganku, angin datang dan dengan lembutnya berhembus. Seakan ia mendekapku dan berkata "Tenang saja, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam". Semakin lama hembusan angin itu terasa semakin kencang, semakin nyata, semakin membuat bibirku kering. Seperti bukan angin biasa; si dewa angin mungkin datang.

Aku menghela napas, mengusap abu rokok yang jatuh di celana. Bau kemenyan tercium dan seketika membuka lemari kenangan usang di kepalaku. Rasanya tidak asing, seperti dari k*lobot* simbah waktu itu. Aku memejamkan mata, dan ketika kubuka kembali, di ujung bangku yang lain, duduklah dia.

Simbah.

Bukan sosok hantu yang menyeramkan, tapi bayangan yang tenang, sama persis seperti dalam ingatanku yang paling jernih. Jari-jarinya yang sedikit keriput sedang menggulung klobot, dan api di ujungnya berpijar merah layaknya obor di tengah gelapnya malam. Senyumnya sama persis, khas sekali—aku ingat betul gigi ompongnya.

"*Kowe iki arep nggawe kitab suci versi kowe dhewe, ta Nang?*" katanya, suaranya serak tapi jelas, seperti deru rel kereta tua yang sudah lama tidak dilintasi.

Aku terdiam. Mulutku terkunci. Angin yang tadi berbisik, kini diam, ikut menyimak.

Dia menyedot *klobotnya* dalam-dalam, asapnya menari-nari membentuk huruf-huruf Arab yang tak kubaca, lalu berubah menjadi rumus-rumus kimia, lalu menjadi coretan-coretan tak berarti. "Aku dulu juga bingung," ujarnya, suara parau itu menetes pelan. "Tapi kitab suci itu kompas, Nang. Bukan kandang. Kau baca kompas itu biar tahu arah kiblat, tapi berjalannya ya tetep pakai kaki dan sepatumu sendiri. Meski jalannya becek, atau kau memilih naik ojek"

Aku ingin protes, ingin berkata bahwa aku justru sedang tersesat. Bahwa aku minum, berkelahi, dan gagal merapalkan hafalan-hafalanku di pesantren dulu. Tapi kata-kata itu menguap sebelum sempat terbentuk.

"Kau kira *Al-Fatihah* yang kau lupa itu yang penting?" Simbah menyeringai, matanya berkedip-kedip lalu menyorot tajam. "Yang di hati, itu yang penting, bikin tenang. Kau membuat bonyok seseorang, kau minum arak, kau sumpah serapahi dunia 'anjing'—itu semua adalah ayat-ayat dari kitab haram yang kau tulis sendiri. Kitab kegelisahan. Kitab pencarian. Kitab kejujuran."

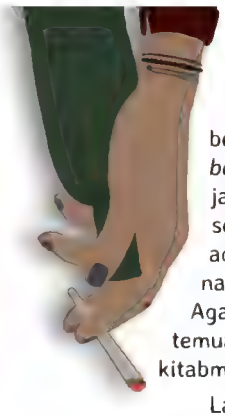

Bayangannya mulai memudar, bersamaan dengan habisnya *klobot* di tangannya. "Jangan takut jadi kafir versimu sendiri untuk sementara. Kadang, jadi kafir itu adalah cara manusia untuk benar-benar mengenal Tuhannya. Agar imannya bukan warisan, tapi temuan. Cari Tuhanmu, bikin sendiri kitabmu."

Lalu, dia lenyap. Hanya bau kemenyan yang tersisa, bercampur dengan bau rokok kretek murahan di tanganku.

Aku terduduk lama. Kata-katanya bergema. *Kitab kegelisahan. Kitab pencarian. Kitab kejujuran.*

Aku membuang puntung rokokku dan menginjaknya. Aku melihat sekeliling. Kampus yang tadi adalah "dunia orang kafir" kini terlihat berbeda. Ia bukan lagi sesuatu yang harus kutolak atau kuterima bulat-bulat. Ia adalah kertas kosong yang luas. Setiap dosa, setiap kebingungan, setiap malam yang kuhabiskan dengan botol, setiap pukulan yang kuayunkan, setiap pengakuan cinta yang kusampaikan—semua itu adalah tinta.

Aku berdiri. Kakiku agak gemetar, tapi bukan karena alkohol atau rasa bersalah. Ini adalah getaran yang lain. Getaran seorang penulis yang baru saja menemukan judul untuk kitab barunya yang masih kacau-balau.

Aku berjalan meninggalkan bangku itu. Mungkin besok aku akan minum lagi. Mungkin aku akan berkelahi lagi. Mungkin aku akan melakukan hal-hal yang lebih brengsek lagi. Atau mungkin tidak. Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, aku sekarang adalah seorang penjelajah yang sedang menulis peta sendiri, dengan pedoman sebuah peta tua yang hampir terlupakan, menuju sebuah stasiun yang bahkan tidak ada namanya di peta manapun.

Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Kembali ke kost dan meminum obat depresanku—aku baru sadar, aku belum meminumnya sedari tadi.

Mencerdaskan Bangsa atau Tipuan Angka? Bagaimana MBG Mencuri Rp223 Triliun Hak Anak atas Pendidikan Berkualitas

oleh Bintang Muhammad Surya Al-Farisy
Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM

Sejak kemerdekaan Indonesia, pendidikan telah diakui oleh para pendiri bangsa sebagai salah satu prioritas utama negara untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing global. Komitmen terhadap pendidikan ini telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum tertinggi negara yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Misalnya:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 menegaskan tujuan negara *"...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang... **mencerdaskan kehidupan bangsa...**";*
2. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"; dan
3. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memerintahkan, *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan **sekurang-kurangnya dua puluh persen** dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."*

Instrumen hukum tersebut menjadi bentuk *constitutional mandatory spending* yang bersifat mengikat dan tidak boleh dinegosiasikan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 13/PUU-VI/2008 secara eksplisit menegaskan tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda pemenuhan 20 persen ini, menegakkan wibawa UUD sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum.

Perlu kita amini juga bahwa amanat tersebut bukan sekadar pemenuhan angka saja, melainkan komitmen konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, kenyataan yang terjadi selama bertahun-tahun, pemerintah cenderung mematuhi amanat 20 persen sebatas pada tahap penganggaran di atas kertas, sembari membiarkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan dan serapan yang menjauhkan pendidikan dari prioritas substantif. Corak legalistik ini menutup mata pada esensi konstitusi, bahwa anggaran adalah instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar angka yang disulap agar tampak konstitusional di lembar RUU APBN.

A. Sejarah Pengabaian Amanat Konstitusi

Sejak 2009, amanat alokasi anggaran pendidikan (*mandatory spending*) minimal 20 persen dari APBN merupakan kewajiban pemerintah untuk yang diatur dalam UUD 1945. Bahkan, amanat konstitusi telah jelas sejak amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Namun, pemerintah Indonesia secara konsisten mengabaikan kewajiban konstitusional ini. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali memutuskan bahwa APBN yang tidak memenuhi alokasi 20 persen untuk pendidikan bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dalam putusan-putusan perkara Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, dan Nomor 13/PUU-VI/2008. Lebih konkret, dalam Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa pengabaian berulang-ulang terhadap amanat konstitusi menunjukkan *"kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar UUD 1945"*. Bahkan, Mahkamah menyatakan: *"...selama anggaran pendidikan belum mencapai persentase 20 persen (dua puluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, maka APBN demikian akan selalu bertentangan dengan UUD 1945..."*

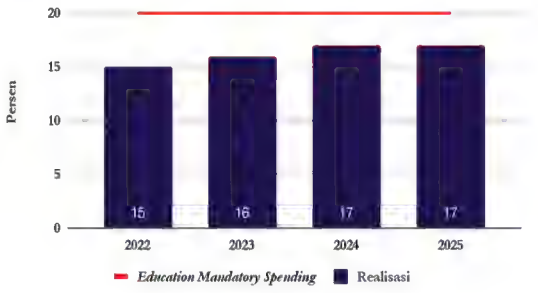

Gambar 1. Realisasi Anggaran Pendidikan dari APBN
Disarikan oleh penulis melalui Tempo, 2025 [3] Detik,2025 [4]

Lalu bagaimana dengan realisasi anggaran pendidikan kontemporer? Dalam 4 tahun terakhir saja, terlihat bahwa realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20 persen belanja dari APBN. Pada tahun 2022, realisasi hanya 15 persen. Tahun 2023 meningkat tipis menjadi 16 persen, dan tahun 2024 hanya 16,99 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa realisasi anggaran pendidikan untuk tahun 2025 diproyeksikan hanya 17,5 persen. Bahkan, merujuk pada berita Tempo (2025)[2], selama lebih dari 15 tahun, tidak ada satu pun pemerintahan—dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo—yang ber-

hasil memenuhi amanat konstitusi secara penuh.

Dari permasalahan ini, pemerintah seharusnya dapat "mengevaluasi mengapa selalu ada sebagian anggaran yang tidak terserap?" Hal ini penting, sebab, anggaran yang tidak terserap (atau terealisasikan) menimbulkan kerugian atas efek yang dihasilkan (*opportunity cost*). Jika ratusan triliun rupiah awalnya dialokasikan untuk pendidikan tetapi tidak terserap, ke mana sebenarnya potensi pengembangan SDM itu pergi? Apakah hilang begitu saja dalam birokrasi, atau tertanam dalam sistem yang tidak mampu mengubah alokasi menjadi dampak pembelajaran nyata? Permasalahan realisasi anggaran ini bukan sekadar masalah administratif—ia adalah masalah keadilan sosial, karena anak-anak di daerah tertinggal tetap belajar di ruang kelas yang bocor, guru tetap tidak sejahtera, dan kesenjangan pendidikan terus melebar.

Oleh karena itu, kita patut menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama—dengan memperbaiki sistem fiskalnya. Khususnya dalam pemenuhan *mandatory spending* tersebut, sehingga pemenuhan amanat konstitusi tidak hanya dipatuhi secara administratif saja.

B. Efisiensi atau Regresi?

Pada awal tahun 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 (Inpres 1/2025) tentang efisiensi belanja, yang justru memicu pemotongan di sektor pendidikan, termasuk pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kemendiktisaintek mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun atau 39,06 persen dari anggaran awalnya. Sementara itu, anggaran Kemendikdasmen dipangkas sekitar Rp8 triliun sebagai bagian dari efisiensi hingga 23,95 persen.

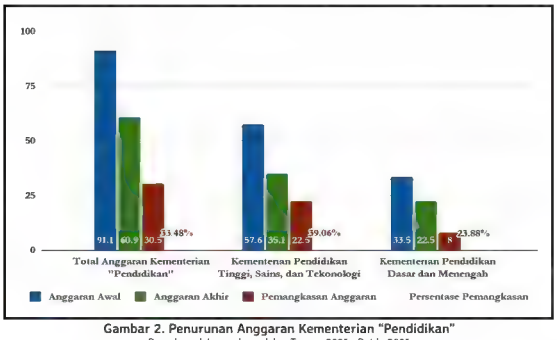

Gambar 2. Penurunan Anggaran Kementerian "Pendidikan"
Disarikan oleh penulis melalui: Tempo, 2025 ; Detik, 2025

Yang dikhawatirkan, pemangkasan pada sektor pendidikan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, memperburuk fasilitas, mempersempit akses sumber belajar, dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, akibat dari pemangkasan anggaran Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Meski pemerintah telah menyatakan efisiensi tetap menjaga alokasi 20 persen fungsi pendidikan secara agregat, tetapi argumen ini tak menjawab isu pemerataan, kualitas belanja, dan pergeseran fungsi yang mengurangi manfaat pendidikan secara langsung di ruang kelas (Media Keuangan Kemenkeu, 2025).[5] Formula "aman di angka" tetapi rapuh di substansi tidak sejalan dengan pesan MK bahwa **pemenuhan 20 persen harus nyata** dan selaras dengan rezim hukum pendidikan, bukan hitung-hitungan kreatif lintas fungsi.

Lebih konkret, dampak pemangkasan anggaran Kemendikti Saintek tidak hanya sekadar mengurangi angka di lembar anggaran. Pemangkasan ini menciptakan gelombang krisis yang menembus lima aspek fundamental dalam pendidikan tinggi: (1) akses pendidikan bagi mahasiswa, (2) operasional dan infrastruktur kampus, (3) penelitian dan inovasi, (4) pengembangan kemahasiswaan, serta (5) kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Perlu diketahui pula bahwa setiap dimensi ini saling terhubung dalam ekosistem pendidikan yang kompleks—ketika satu dimensi terguncang, seluruh sistem akan mengalami kerusakan berantai.

Dimensi 1: Akses Pendidikan

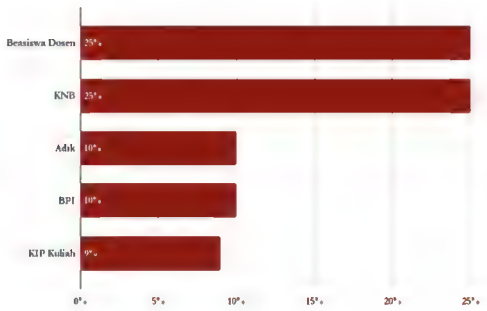

Gambar 3. Pemangkasan Anggaran Program Beasiswa Dikti
Disarikan oleh penulis melalui: PustakaJC, 2025[6]

Pertama, pada dimensi akses pendidikan, dampak pemangkasan anggaran paling terasa bagi mereka yang paling membutuhkan. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)—seharusnya menjadi jembatan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu—mengalami pemotongan Rp1,31 triliun, setara dengan 9 persen dari anggarannya. Konsekuensi langsung terlihat pada tahun ajaran 2025, daya tampung untuk mahasiswa baru penerima KIP Kuliah menyusut signifikan, sementara mahasiswa yang telah diterima menghadapi keterlambatan pencairan dana hingga berbulan-bulan. Kerugian ini tidak berhenti pada KIP Kuliah saja. Program beasiswa lainnya—Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi—juga mengalami pemotongan 10 persen masing-masing, semakin mempersempit peluang mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.

Dampak kumulatif dari pemotongan ini menciptakan skenario yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, **angka putus kuliah** diproyeksikan akan melonjak karena mahasiswa tidak mampu menghidupi diri di kampus tanpa beasiswa. Kedua, aspirasi anak-anak keluarga miskin untuk menjadi sarjana pertama akan terputus di tengah jalan. Ketiga, dan yang paling menyedihkan, kesempatan untuk "naik kelas" secara sosial-ekonomi melalui pendidikan tinggi semakin menipis bagi kelompok paling rentan. Dengan kata lain, pemangkasan ini memperkuat

mekanisme reproduksi kesenjangan—anak kaya tetap bisa sekolah, sementara anak miskin ditinggalkan di belakang, **orang miskin dilarang kuliah!**

Dimensi 2: Operasional & Infrastruktur

Kedua, tantangan operasional dan infrastruktur perguruan tinggi mencapai titik kritis. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dipangkas drastis sebesar 50 persen—turun dari Rp6,018 triliun menjadi hanya Rp3 triliun.[7] Pemotongan sebesar ini menghadirkan dilema yang tidak dapat dihindari bagi setiap universitas negeri: apakah mereka akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk kompensasi, atau melakukan pemotongan operasional yang ekstrem? Mayoritas universitas memilih jalan kedua, dengan konsekuensi yang absurd.

Contoh paling nyata adalah tindakan Universitas Indonesia yang mematikan semua pencahayaan kampus setelah pukul 17.00 hari—**sebuah simbol yang menyakitkan tentang cahaya pendidikan yang redup pada institusi pendidikan tertua di Indonesia.**[8] Namun, efisiensi berlebihan ini jauh melampaui sekadar penghematan listrik. Anggaran pemeliharaan fasilitas, laboratorium, dan infrastruktur digital kampus semua terpangkas habis. Mahasiswa kini belajar di ruang kelas yang minim cahaya dan pengatur suhu ruang, laboratorium yang tidak terawat dengan peralatan usang, dan fasilitas digital yang ketinggalan zaman. Ini bukan lagi persoalan kenyamanan akademik, melainkan hambatan nyata terhadap proses pembelajaran yang efektif. Kualitas pengalaman belajar menurun secara terukur, dan yang lebih mengkhawatirkan, daya saing universitas Indonesia terus merosot relatif terhadap institusi pendidikan di luar negeri.

Dimensi 3: Riset & Inovasi

Ketiga, dimensi riset dan inovasi—yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa—mengalami penyusutan parah. Dana riset BRIN dipangkas Rp1,429 triliun (24,46 persen dari total anggaran),[9] sementara anggaran riset di Kemendikti juga mengalami pemotongan signifikan. Dampak dari kedua pemotongan ini sangat serius: ekosistem penelitian nasional menjadi sangat tertekan. Dosen dan peneliti dihadapkan pada pilihan yang menyedihkan. Mereka tidak dapat melanjutkan penelitian berkualitas tinggi karena ketiadaan dana. Akibatnya, standar publikasi mereka turun dari jurnal internasional terindeks Scopus—yang membuka peluang kolaborasi global—menjadi publikasi nasional yang jangkauan dan dampaknya jauh lebih terbatas. Yang paling merugikan, penelitian-penelitian inovatif yang sebenarnya menjanjikan harus dibatalkan karena tidak ada pembiayaan.

Fenomena ini tidak hanya mengorbankan produksi pengetahuan baru, tetapi juga menghilangkan kesempatan berharga Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan sains, teknologi, dan inovasi global. Sementara negara-negara tetangga terus mengakselerasi ekosistem riset mereka, Indonesia justru sedang melangkah mundur—sebuah pilihan strategis yang sangat keliru mengingat persaingan global semakin ketat.

Dimensi 4: Pengembangan Kemahasiswaan

Keempat, pengembangan kemahasiswaan mengalami degradasi sistemik. Organisasi mahasiswa (Ormawa/UKM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan program-program pengembangan mahasiswa lainnya semua terkena pemotongan anggaran yang signifikan. Di Universitas Gadjah Mada (UGM) saja, dana Ormawa menyusut antara 15-50 persen[10], dan pola pemotongan yang sama terulang di berbagai kampus lainnya. Ketika Ormawa kehilangan pendanaan, mahasiswa tidak lagi memiliki ruang untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan kompetensi *soft skill* yang seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan universitas.

Temuan konkret dari pemangkasan ini merambat pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Universitas Sumatera Utara (USU) yang sebelumnya dapat mendanai setiap tim dengan puluhan juta rupiah kini hanya mampu memberikan Rp8 juta per tim—sebuah penurunan drastis yang membuat banyak ide brilian tidak dapat terealisasi.[11] Di UGM, jumlah tim PKM yang lolos pendanaan turun tajam dari 3.520 tim menjadi hanya 1.590 tim—sebuah penurunan 45 persen yang memukul. Secara finansial, jumlah proposal PKM yang diterima turun dari 181 proposal dengan total Rp1,596 miliar menjadi hanya 56 proposal dengan Rp419,4 juta.[12]

Ironi yang menyakitkan adalah bahwa mahasiswa kini terpaksa mengubah desain proyek mereka agar sesuai dengan budget yang sangat terbatas, mencari sponsor pribadi di luar universitas, atau bahkan membatalkan partisipasi dalam kompetisi nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat—yang memerlukan biaya logistik besar—juga menjadi terhenti. Puncaknya, **kriteria pemilihan kegiatan dan proyek mahasiswa tidak lagi berlandaskan kualitas ide dan inovasi, melainkan pada kuota anggaran yang tersisa.** Universitas, yang seharusnya menjadi inkubator terbaik bagi inovasi dan talenta muda bangsa, kini terlihat menolak inovasi bukan karena kekurangan ide, tetapi karena kekurangan dana—sebuah paradoks yang sangat mengecewakan.

Dimensi 5: Kesejahteraan Dosen

Kelima, kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik—fondasi nyata dari setiap sistem pendidikan—juga terjadi tekanan serius. Tunjangan dosen non-PNS dipangkas Rp676 miliar.[13] Sebagai respons terhadap tekanan finansial ini, beberapa universitas bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen kontrak dan tenaga kependidikan non-PNS.

Hasilnya adalah **degradasi kualitas dari sistem inti pendidikan tinggi.** Rasio dosen-mahasiswa menjadi semakin tidak ideal, sementara beban kerja dosen tetap meningkat drastis. Dosen yang demotivasi karena ketidakstabilan finansial, lelah dari beban kerja yang berlebihan, dan tertekan oleh ketidakpastian masa depan tidak dapat diharap-

kan untuk mengajar dengan dedikasi penuh atau membimbing mahasiswa dengan serius. Konsekuensinya adalah penurunan kualitas pembelajaran secara langsung dan terukur, yang pada gilirannya mempengaruhi pencapaian akademik mahasiswa.

Kesimpulan & Analisis Sistemik

Dari kelima dimensi di atas, jelas bahwa pemangkasan anggaran pendidikan tinggi 2025 bukan sekadar persoalan birokrasi atau efisiensi administratif yang dapat ditangani dengan manajemen yang lebih baik. Ini adalah krisis sistemik yang menggerogoti setiap organ pendidikan tinggi Indonesia, dari akar hingga cabang. Dampak jangka pendeknya sudah mulai terasa; akses pendidikan tertutup bagi kelompok kurang mampu, kualitas pembelajaran menurun karena infrastruktur yang buruk, riset terhenti karena keterbatasan dana, mahasiswa tidak dapat mengembangkan potensi penuh mereka, dan dosen tidak termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Namun, efek jangka panjang akan jauh lebih menghancurkan. Jika tren ini berkelanjutan, daya saing sumber daya manusia Indonesia akan terus menurun di panggung global. Kesenjangan pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan bawah akan semakin melebar, menciptakan mobilitas sosial yang stagnan dan ketidakadilan struktural yang semakin dalam.

Yang paling paradoks adalah bahwa visi "Indonesia Emas 2045" membutuhkan investasi pendidikan dan riset yang sangat besar, tetapi kebijakan saat ini justru melangkah ke arah yang berlawanan. Dengan kata lain, alih-alih berinvestasi untuk membangun fondasi masa depan yang kuat, pemerintah malah mengurangi investasi di sektor yang paling krusial, pada saat ketika dunia sedang mengakselerasi kompetisi melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Keputusan ini bukan hanya salah secara ekonomi—ia juga salah secara moral, karena merugikan generasi muda yang seharusnya disiapkan untuk menghadapi tantangan global abad ke-21.

C. Bagaimana dengan APBN 2026? Angka besar, tetapi arahnya melenceng...

Pada 23 September 2025, pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (RUU APBN 2026) menjadi UU APBN 2026. Salah satu yang diumumkan adalah anggaran pendidikan 2026 yang menyentuh angka Rp757,8 triliun, angka yang di atas kertas tampak menggembirakan.

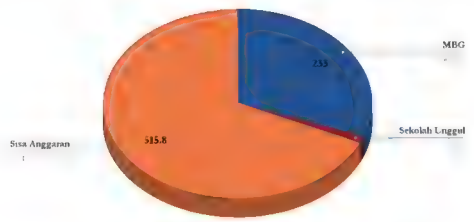

Gambar 4. Pemangkasan Anggaran Program Beasiswa Dikti
Disarikan oleh penulis melalui RAPBN, 2026[14]

Namun, porsi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru diletakkan di pos pendidikan, dengan estimasi total MBG sekitar Rp335 triliun dan porsi yang diambil dari anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp223 triliun, sehingga menggerus ruang fiskal fungsi inti pendidikan.

Padahal, menurut pada *Classification of the Functions of Government* (COFOG) yang menjadi rujukan internasional dan terintegrasi dalam praktik statistik keuangan pemerintah, fungsi pendidikan mencakup layanan langsung seperti pendidikan prasekolah, dasar, menengah, pasca-menengah, non-tertiari, dan layanan penunjang pendidikan, bukan program nutrisi massal.[15] Lebih lanjut, COFOG juga melarang pemerintahan untuk mencampurkan fungsi (*mutual exclusivity*) pada belanja negara, *"Every line item in a well-designed budget classification system should be independent of all other line items... It is important that every expenditure item and transaction be attributed to each of the three classifications shown above clearly and unambiguously, without duplication, overlap or repetition."* yang menyiratkan bahwa tidak boleh ada tumpang tindih fungsi.[16] Dengan demikian, Program MBG tidak bisa dimasukkan ke fungsi pendidikan jika substansinya adalah kesehatan/gizi. Selain itu, pedoman klasifikasi anggaran IMF–GFS menekankan bahwa belanja harus diklasifikasi menurut tujuan utama (*primary purpose*), sehingga program makanan bergizi publik lebih tepat ditempatkan pada fungsi kesehatan atau perlindungan sosial, bukan pendidikan.

Lebih lanjut, IMF *Technical Note and Manuals on Budget Classification* (2009)[17] bahkan menegaskan bahwa, *"The functional classification categorizes expenditure according to the purposes and objectives for which they are intended."* dan lebih lanjut dijelaskan, *"Classifying expenditures and revenues correctly is important for: (1) policy formulation and performance analysis (2) allocating resources efficiently among sectors"*. Dengan kata lain, belanja harus diklasifikasi menurut tujuan utamanya. Sementara itu, tujuan utama MBG adalah memberikan manfaat sosial berupa makanan kepada individu (siswa) untuk tujuan kesejahteraan, yang bukan menjadi biaya utama untuk menjalankan sistem pengajaran, maka klasifikasi yang paling tepat adalah Perlindungan Sosial (Divisi 10). Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang memberikan definisi komprehensif mengenai pendidikan sebagai *"...usaha sadar dan terencana untuk **mewujudkan** suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."* Definisi tersebut mengandung makna holistik bahwa pendidikan melampaui sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembangunan karakter, kompetensi, dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan—bukan intervensi kesehatan, maupun gizi peserta didik. Oleh karena itu, jika tujuan utama MBG adalah nutrisi

dan kesehatan anak, maka harus masuk fungsi kesehatan atau perlindungan sosial, bukan pendidikan.

Meski tidak ada yang menolak gizi anak sebagai tujuan mulia, tetapi memaksa MBG masuk pos pendidikan adalah pemelintiran fungsi yang menabrak standar klasifikasi dan mengacaukan akuntabilitas lintas sektor. Ketika 30.7 persen dari anggaran pendidikan dipakai untuk MBG, publik berhak bertanya: berapa ruang yang tersisa untuk perbaikan sekolah rusak, laboratorium, perpustakaan, peningkatan mutu guru, dan pemenuhan wajib belajar secara bermartabat. Sebagai hak konstitusional dan bagian dari *Economic, Social and Cultural Rights* (ESC), pendidikan membawa kewajiban minimum *core* yang tidak boleh diregresikan, kecuali dengan pembenaran yang ketat dan proporsional.[18] Pengalihan anggaran dari fungsi pendidikan ke program di luar cakupan COFOG pendidikan berpotensi menjadi langkah regresif yang menabrak prinsip pemenuhan bertahap tanpa kemunduran, apalagi ketika dampaknya terasa langsung di akses, mutu, dan pemerataan.

D. Mandatory Spending 20 persen Bukanlah Angka yang Dapat Diatur sesuai Kehendak Penguasa!

Pemangkasan dan pengalihan tersebut telah diingatkan berakibat pada menurunnya kualitas guru, memburuknya fasilitas, terbatasnya sumber belajar, lonjakan putus sekolah, dan risiko pemutusan guru honorer karena rapuhnya pendanaan operasional. Kebijakan efisiensi yang menyasar pos-pos pendidikan dasar dan menengah memantik paradoks: di saat kebutuhan kapasitas sekolah dan inklusi meningkat, justru kemampuan layanan publik menyempit secara kasat mata. MK bukan hanya pernah membatalkan bagian anggaran pendidikan yang tidak memenuhi 20 persen, tetapi juga menegaskan bahwa cara menghitung harus taat pada hukum pendidikan dan tidak boleh dikaburkan oleh agregasi yang menyesatkan. Mengulangi jurus lama "dipenuhi nominalnya, dikandaskan pelaksanaannya" adalah bentuk pembangkangan konstitusional yang telah diperingatkan konsekuensinya oleh MK sejak krisis kepatuhan anggaran 2006–2008.

Jalan Keluar: Luruskan Fungsi, Perkuat Akuntabilitas, Pulihkan Pendidikan!

Pemerintah sepatutnya dapat mengkaji ulang anggaran pendidikan dalam APBN 2026, khususnya untuk menghindari efek serupa pada rencana efisiensi tahun 2026 dan postur anggaran MBG yang mendominasi anggaran pendidikan. Pengkajian ulang tersebut harus berlandaskan prinsip *"mencerdaskan kehidupan bangsa"* sebagai tujuan utama pendidikan. Setidaknya, beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah:

1. Relokasi MBG ke fungsi kesehatan atau perlindungan sosial sesuai COFOG–GFS, lalu rumuskan skema sinergi lintas sektor tanpa membebani pos pendidikan.
2. Kunci 20 persen pendidikan dalam kerangka *output–outcome* berbasis layanan inti (guru, sarpras, kurikulum, literasi–numerasi–sains) agar tidak dapat "dipakai nama baiknya" untuk program *non-pendidikan*.
3. Susun ulang prioritas 2026, tutup defisit kesejahteraan guru dan pendanaan sekolah sebelum program baru, dengan transparansi publik atas daftar program yang didanai dan dipangkas.
4. Patuhi prinsip non-regresi hak pendidikan dan pastikan setiap efisiensi disertai justifikasi HAM yang ketat serta analisis dampak ke kelompok rentan.

Negara tidak sedang diuji soal kemampuan menjumlahkan anggaran, melainkan soal kesetiaan pada konstitusi dan akal sehat kebijakan publik. Selama "20 persen" didefinisikan sebagai ruang gelap untuk menyusupkan program non-pendidikan, yang dikorbankan adalah hak anak belajar di kelas yang layak, hak guru untuk dihargai secara profesional, dan hak warga atas masa depan yang lebih cerdas—suatu harga yang terlalu mahal untuk ditukar dengan kosmetik fiskal. Jika manipulasi anggaran dan pembelokan

---

1 Febiola, A. (2025, July 23). Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen | tempo.co. Tempo.co. Retrieved November 9, 2025, from https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-sri-mulyani-soal-anggaran-pendidikan-tak-sampai-20-persen-2049673

2 ibid

3 Yunus, S. (2025, February 13). Imbas Efisiensi Anggaran Kemendiktisaintek: Dana Beasiswa Berpotensi Dipangkas, UKT Bisa Naik | tempo.co. Tempo.co. Retrieved November 9, 2025, from https://www.tempo.co/politik/imbas-efisiensi-anggaran-kemendiktisaintek-dana-beasiswa-berpotensi-dipangkas-ukt-bisa-naik-1206420

4 Savitri, D. (2025, February 10). Kemendikdasmen Kena Efisiensi Anggaran hingga Rp 8 T, PIP-Tunjangan Guru Terdampak? detikcom. Retrieved November 9, 2025, from https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7771208/kemendikdasmen-kena-efisiensi-anggaran-hingga-rp-8-t-pip-tunjangan-guru-terdampak

5 Saptati, R. (2025, April 10). Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025. Media Keuangan. Retrieved November 9, 2025, from https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025

6 Pustakajc.co. (2025, Februari 14). Pendidikan. Pemangkasan Anggaran Pendidikan 2025: https://www.pustakajc.co/pendidikan/view/3398/pemangkasan-anggaran-pendidikan-2025-kemendikdasmen-dan-kemendiktisaintek-terkena-efisiensi-besar?halaman=all

7 Pustakajc.co. (2025, Februari 14). Pendidikan. Pemangkasan Anggaran Pendidikan 2025: https://www.pustakajc.co/pendidikan/view/3398/pemangkasan-anggaran-pendidikan-2025-kemendikdasmen-dan-kemendiktisaintek-terkena-efisiensi-besar?halaman=all

8 Yusrial, M. R., & Tempo. (2025, Maret 5). Tempo-Politik. Universitas Indonesia Jadi Gelap Akibat Pemangkasan Anggaran. https://www.tempo.co/politik/universitas-indonesia-jadi-gelap-akibat-pemangkasan-anggaran-1215649

9 Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025, February 13). Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasional. Retrieved November 9, 2025, from https://www.brin.go.id/press-release/122268/brin-pastikan-efisiensi-anggaran-tidak-pengaruhi-kegiatan-riset

10 Forum Komunikasi UGM. (2025). "Tuntutan Pagu: Saling Berpegangan Tangan untuk Mengembalikan Hak Mahasiswa dan Ormawa".

11 Yolanda. (2025, Juli 14). Suara USU. Efisiensi Anggaran Pendidikan Berakibat pada Kualitas Mahasiswa. https://suarausu.or.id/efisiensi-anggaran-pendidikan-berakibat-pada-kualitas-mahasiswa/

12 Azahro, N. (2025, July 13). Dampak Efisiensi, Jumlah Tim Lolos Pendanaan PKM UGM 2025 Turun Drastis - Krjogja. Kr Jogja. Retrieved November 9, 2025, from https://www.krjogja.com/kampus/1246292258/dampak-efisiensi-jumlah-tim-lolos-pendanaan-pkm-ugm-2025-turun-drastis

13 Tim Liputan. (2025, February 15). Kalbar News. Efisiensi Anggaran Pendidikan: Solusi atau Ancaman bagi Kualitas Pembelajaran? https://www.kalbarnews.co.id/2025/02/efisiensi-anggaran-pendidikan-solusi.html

14 UU APBN dan Nota Keuangan 2026. (2025). Kementerian Keuangan. Retrieved November 9, 2025, from https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

15 De Clerck, S., & Wickens, T. (2015). Government Finance Statistics Manual 2014 (International Monetary Fund, Ed.). INTERNATIONAL MONETARY FUND. https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/2014/gfsfinal.pdf

16 Jacobs, D., Hélis, J., & Bouley, D. (2009). Budget Classification; Prepared by Davina Jacobs, Jean-Luc Hélis, and Dominique Bouley; IMF Fiscal Affairs Department; IMF Tech. International Monetary Fund. Retrieved November 9, 2025, from https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0906.pdf

17 ibid

18 Shields, K. (2017). The minimum core obligations of economic, social and cultural rights: The rights to health and education (Research Summary). The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/39654842-d461-5f0b-a20e-4b3ca4908228/content

Tawa Hambar di Kota Gudeg

Fotografer: Ariel

Di bawah langit sore Yogyakarta yang muram, pada Kamis (12/6), yang seolah sedang menumpahkan duka, kami menelusuri tepi Kali Code. Rintik hujan yang turun seakan memberikan nyanyian sunyi di atas sungai yang mengalir. Tepat di sana, langkah kami terpaku pada sebuah rumah tua yang kayunya terlihat lapuk, seakan menolak untuk hilang dalam pusaran waktu. Di balik pintu yang sedikit reyot itu, hidup seorang pria berusia 85 tahun bernama Wondo.

Rakyat Kecil yang Menua dalam kepasrahan di Balik Istimewanya Yogyakarta

"Saya ini rakyat kecil, Mbak. Saya ini sudah tua, sudah gabisa menuntut lagi. Saya serahkan hidup saya ke pemerintah," getir Wondo dalam kepasrahan mendalam akan hidupnya.

Ketika pertama kali menjejakkan kaki di pekarangan rumahnya, Wondo menyambut kami dengan senyuman tulus, walaupun kerutan wajahnya sudah sangat terlihat dan giginya yang telah banyak tanggal. Awalnya, Wondo bercerita tentang kehidupan yang kini ia jalani sendiri semenjak kehilangan istrinya. Duka mendalam yang ia alami membawa Wondo pada pilu kesendirian di hari tuanya. Kami pun bertanya bagaimana ia melalui kehidupan dibalik kesendirian dan keterbatasannya di usia senja, hingga mata kami tak sengaja melihatkan luka kaki Wondo yang tak kunjung memulih.

Meskipun begitu, senyum getir yang ia miliki masih saja menghiasi wajahnya kala menceritakan betapa tersiksanya menjadi rakyat kecil yang menggantungkan harapan terhadap pemerintah. Ia menjelaskan bahwa di tengah kekurangannya, ia seolah dipaksa untuk mengemis akan haknya melalui kebijakan yang semakin hari semakin tak manusiawi. Wondo menuturkan bahwa bantuan awal yang ia terima sebesar 300 ribu, namun kini telah dipotong dengan dalih efisiensi anggaran.

Fotografer: Ariel

"Saya jalan kaki dari rumah ke kantor pos, dengan kaki saya yang cacat ini satu jam baru sampai kantor pos. Akan tetapi, sekarang saya melihat televisi, bantuannya dipangkas menjadi 200 ribu,"jelas Wondo dengan raut muka sedikit bingung dan pasrah akan kebijakan yang kian hari makin tak membersamainya.

Dari pinggiran lain Kali Code di pelataran kaki lima, kami tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan paruh baya yang menawarkan dagangannya. Rini sapaan akrabnya. Sembari melihat kendaraan berlalu-lalang, kami bertanya mengenai suka duka beliau selama berjualan di tengah-tengah keadaan negara yang semakin mengkhawatirkan. Rini terkekeh getir, mengatakan bahwa ia sudah mencoba meminta bantuan dari pemerintah, namun tak kunjung diberi kejelasan.

Dengan napas yang berat, Rini seakan tumpah. "Sudah cari bantuan ke mana-mana, Mbak. Dari LBH *nggak* lolos, dari sekolah *nggak* lolos, semuanya *nggak* lolos. Cuma disuruh foto rumah terus *nggak* ada kelanjutannya," bukanya. Dengan sisa-sisa harapan yang ia punya, Rini hanya berharap agar ijazah anaknya yang ditahan sejak lulus sekolah itu agar dapat dikembalikan.

"Saya cuma mau minta ijazahnya anakku dikeluarkan. Ijazahnya ditahan karena belum lunas pembayarannya sampai sekarang. Dinas pendidikan juga gak bisa bantu apa-apa," harap Rini kepada pemerintah yang seakan dapat membantunya.

Kami menggeser langkah ke arah selatan. Di sini puluhan pedagang gerobak berjualan seakan mengitari Alun-alun Kidul. Kerlap-kerlip lampu dan aroma berbagai makanan dari gerobak-gerobak kecil mengantarkan kami dalam perjumpaan dengan Sugi, salah satu pedagang gerobak. Sugi, melalui hari-harinya dengan duduk di bangku plastik depan gerobaknya, menatap lalu-lalang kendaraan yang melintas di tepi jalan–sebuah rutinitas yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama kurang lebih dua tahun ke belakang.

Sugi merupakan seorang perantau dari Magelang yang kini mengandalkan hidup dari usaha kecil yang ia jalankan sendiri. Meskipun sudah sedari awal ia menerima kenyataan bahwa upah minimum regional (UMR) Jogja tak menjanjikan banyak hal. Sebagai pedagang, ia hidup dengan bergantung pada naik-turunnya harga bahan dan minat pembeli yang kian menurun. Ia mengaku tak terikat pada angka, karena rezeki datang tanpa kepastian. Bagi Sugi, yang penting adalah bertahan meski kadang keuntungan hanya cukup untuk sekadar menanak nasi dan membeli tempe.

Sugi sempat bercerita bahwa masa sulit kini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik banyak pedagang lainnya. Ia pun menerangkan bahwa paguyuban pedagang memang masih berjalan, tetapi lebih sering menjadi kewajiban administratif ketimbang ruang untuk saling menolong. Iuran tetap harus dibayar meski dagangan tak selalu laku. Di sela senyumnya yang tenang, terselip ironi kecil: Ia ternyata seorang lulusan akuntansi ekonomi dari universitas ternama, kini menyaksikan perekonomian bangsa yang sedang "rusak-rusaknya," namun hanya bisa bersabar, karena hanya itu yang dapat dilakukan.

Lebih ke selatan lagi, di Kampung Siliran, kami tak sengaja bertemu Toyo, seorang penjual angkringan yang sudah 17 tahun tinggal di Yogyakarta. Ia seorang perantau asal Indramayu, sempat menetap di Jakarta, lalu memutuskan tinggal di kota Yogyakarta demi ketenangan hidup yang tak ia temukan di Ibu Kota. Sambil menghangatkan diri dengan teh dan nasi kucing, kami bertukar cerita tentang perbedaan rotasi kehidupan yang ia alami selama berada di Yogyakarta. Menurutnya, di Jogja hidup berjalan lebih lambat, lebih manusiawi. Meski penghasilannya lebih kecil, ia merasa ada ruang untuk bernapas. Namun di antara ketenangan yang di tawarkan, ada harga pula yang harus dibayar demi keberlangsungan hidup.

"Keluhan sih tentu ada aja ya, contohnya saya kan bisa dibilang perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, untuk hal bansos itu ada aja kekurangannya, kadang kala tidak tepat sasaran. Biasanya tuh ada faktor kedekatan," ungkap Toyo dengan santainya. Toyo merasa bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika pola kebijakannya terus berjalan seperti ini. Toyo menyoroti lebih dari sekadar kekecewaan birokrasi. Baginya, bagaimana jika ada seorang janda tua yang rentan, namun tangannya terhalang tembok dingin bernama administrasi.

"Harusnya ada dari pihak mereka yang turun lapangan jadi jangan hanya berdasarkan data tapi harusnya data dan fakta," kesal Toyo.

Dari kawasan yang tenang di bawah bayang-bayang Keraton—seolah kedamaian masih menjadi milik kota ini—langkah kami terseret menuju pusat kota yang lebih "hidup." Jalanan yang ses-

ak, lampu-lampu toko menyala seakan merayakan lenyapnya siang, sementara suara pedagang dan pengamen bersahutan dalam simfoni kemacetan yang begitu merdu. Namun di balik gemerlap yang menjadi citra Yogyakarta, wajah lain kota ini perlahan menampakkan diri. Kami bertemu Kasilah, seorang ibu pengumpul sampah yang sangat murah senyum, ketika kami menelusuri jalan di Titik Nol.

Kasilah, seorang warga lokal yang tinggal tidak jauh dari Titik Nol. Sudah terhitung 15 tahun sejak Kasilah mengumpulkan sampah di sepanjang jalan Titik Nol sampai ke Malioboro setiap harinya. "Sudah 15 tahunan cuman buru-buru gini, *nggak* kerja apa-apa. Mau kerja tapi sama kampung *nggak* boleh, katanya sudah tua gak usah kerja jauh-jauh, dikasih makanan nasi kampung aja gitu. Pagi-pagi cari sampah, kalau masih ada yang bagus saya ambil, buat saya, " ujar Kasilah dengan senyum sumringah yang tidak luntur dari wajahnya.

Perkataan Kasilah seolah menampar keras wajah kami dengan kenyataan bahwa kebahagiaan masyarakat kecil yang dijanjikan oleh pemerintah selama tak lebih dari sebuah bualan semata. Merasa prihatin dengan kondisi Kasilah, kami dengan mencoba memberanikan diri untuk bertanya mengenai keberadaan keluarganya, namun jawabannya lagi-lagi menghadirkan pilu yang lain.

"Kalau keluarga sih udah nggak ada urusan sama saya, Mbak. Suami saya nakal, kalau marah sedikit suka nampar, suka nendang juga, gak urusan saya tuh. Anak saya dua, satu di Kalimantan, satu di sini ngojek tapi nggak mau [bicara sama saya," ucapnya dengan senyum yang seolah tak pernah lepas dari hari-harinya.

Kasilah mengaku ia sudah tidak lagi berharap pada bantuan pemerintah. Selagi masih mampu, ia akan mencari makan dengan caranya sendiri. Dalam langkah-langkah kecilnya yang menyusuri trotoar Malioboro, terselip keteguhan yang barangkali sudah lama hilang dari ruang-ruang kebijakan.

Fotografer: Ariel

Yogyakarta memang kerap disebut kota yang istimewa, namun keistimewaan itu rupanya tidak dirasakan oleh semua warganya. Di balik tembok tua dan gemerlap lampu jalanan, ada kehidupan yang berjalan dalam diam, mereka yang menggantungkan harapan pada kebijakan yang tak kunjung berpihak. Dari tepian Kali Code hingga pusat kota, mereka menua bersama kepasrahan. Barangkali bagi sebagian orang, bertahan adalah bentuk perlawanan paling sunyi di negeri yang sering lupa mendengarkan suara rakyatnya.

[Kezia, Veni]

KOMIK

oleh Ridho Alam

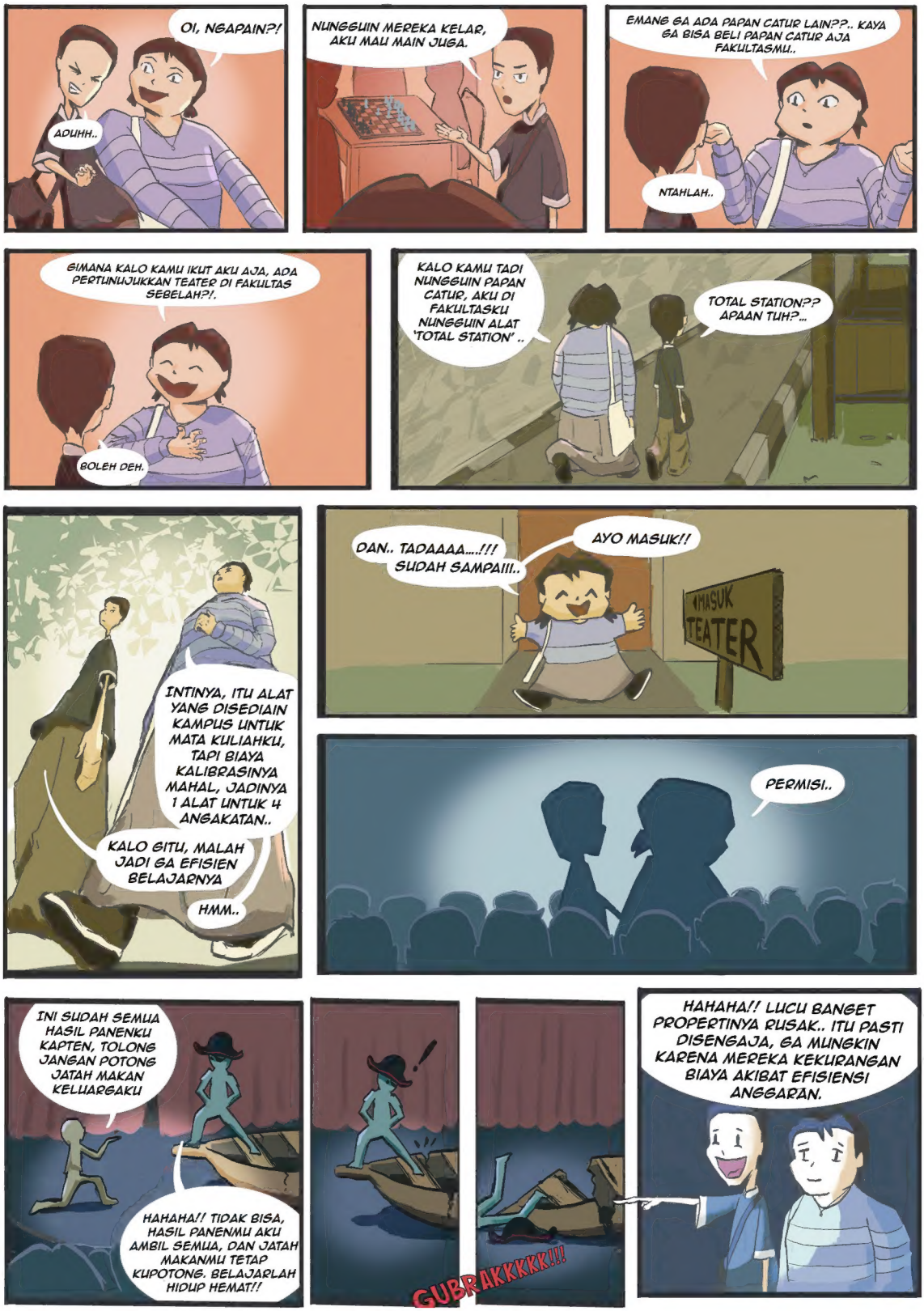

Selayaknya bayi, ia butuh orang yang dengan ikhlas menyuapinya. Kemudian, ketika hendak merancang berdiri, ia butuh tangan yang mampu dijadikan pembantu awal bagi pijakan kakinya. Begitulah Pijar.

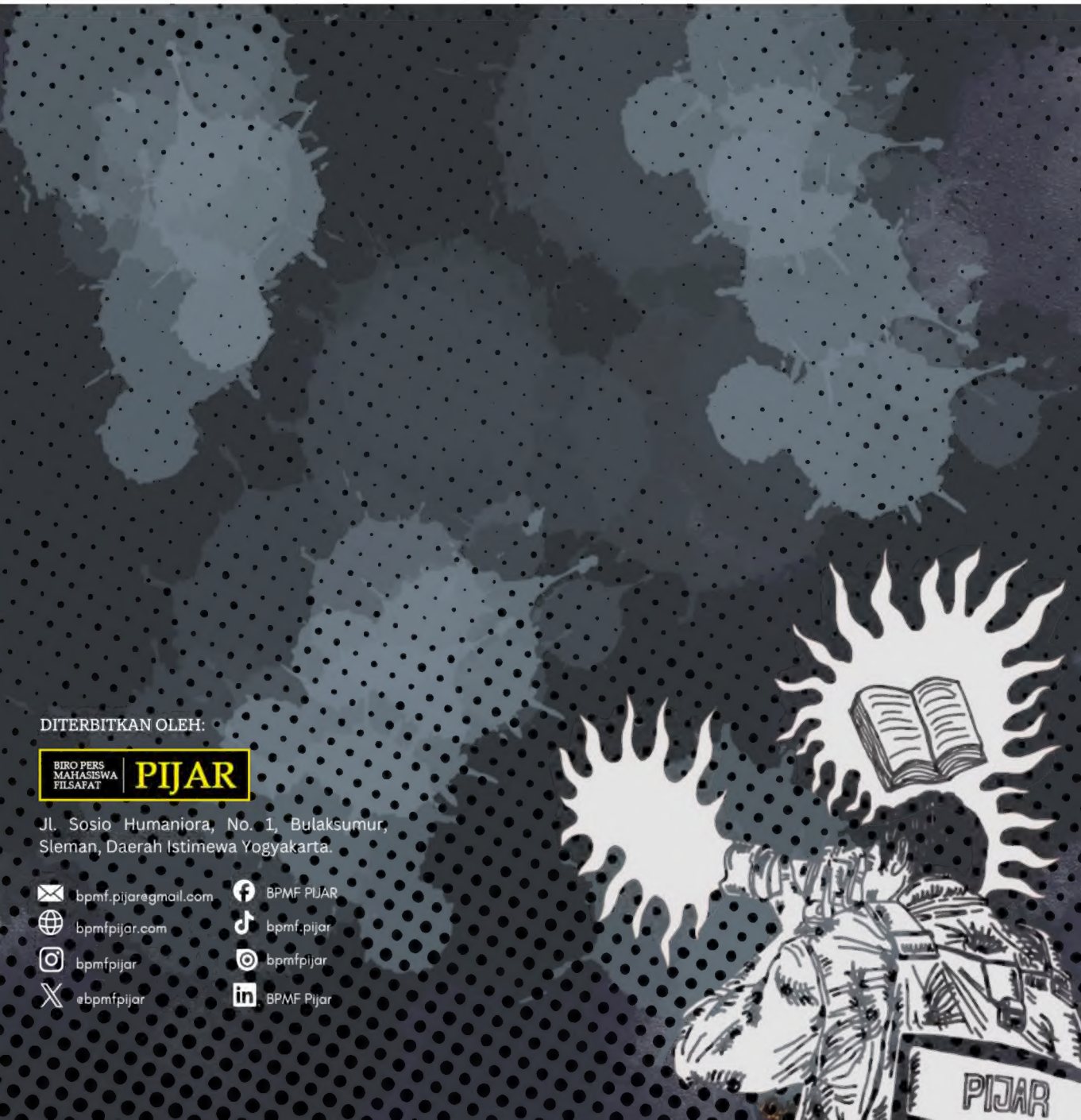

DITERBITKAN OLEH:

BIRO PERS MAHASISWA FILSAFAT | PIJAR

Jl. Sosio Humaniora, No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

bpmf.pijar@gmail.com
bpmfpijar.com
bpmfpijar
@bpmfpijar
BPMF PIJAR
bpmf.pijar
bpmfpijar
BPMF Pijar